

PENGEMBANGAN INDUSTRI MARITIM DI NUSA TENGGARA BARAT (NTB) : PELUANG DAN TANTANGAN

(M Firmansyah, M Masrun, B Busaini)

1-9

KOTA TUA SEBAGAI DESTINASI WISATA KOTA : KENAPA TIDAK (IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK)

(Aang Afandi, Dewi Rahayu)

10-20

KESEIMBANGAN MODEL PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PESISIR KABUPATEN BONEBOLANGO

(M Mattoasi, Candra Cuga, Muhammad Sarlin, S Sudirman)

21-31

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF INDONESIA

(Silvi Dewi Purwanti, Farida Rahmawati)

32-44

POTENSI DAN STRATEGI PENGEMBANGAN INDUSTRI SASIRANGAN KOTA BANJARMASIN

(Akhsanul Rahmatullah)

45-53

DAMPAK RELOKASI PASAR TADISIONAL TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI PEDAGANG DI PASAR KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK

(Ermita Yusida, Frada Nadya Megatara Putra, Hadi Sumarsono)

54-66

POTENSI EKONOMI RENCANA KAWASAN TRANSMIGRASI LONG APARI KABUPATEN MAHAKAM ULU KALIMANTAN TIMUR

(Dirgahayu Erri, Hasta Herlan Asymar)

67-76

Pengembangan Industri Maritim di Nusa Tenggara Barat (NTB): Peluang dan Tantangan

M. Firmansyah^{1)*}, Masrun²⁾, Busaini³⁾

¹⁾²⁾³⁾ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram

* E-mail corresponding author: firmansyah.feb@unram.ac.id

Received: 10-10-2020;
Accepted: 27-02-2021;
Available online: 30-04-2021

Ecoplan Vol. 4 No. 1, April 2021,
hlm 1-9.

ISSN p: 2620-6102
e: 2615-5575

Keywords: Maritime
industries, Fishing, and Raw
Materials

Abstract - One of the West Nusa Tenggara Governor's (2018-2023 era) mission is to encourage industrialization. This research tries to provide answers related to opportunities in the fisheries sector for industrialization and its challenges. The study was conducted with a qualitative approach. Qualitative (primary) data was obtained by conducting interviews with several experts in marine and fisheries and through FGD with related agencies. In contrast, secondary data was obtained from the fishing and marine services of (DKP) NTB Province. The results showed that NTB's fisheries were still relatively large in production and the area of fish land (capture and cultivation). And also, Non-fish production is suitable to be used as the main source of industrialization. However, several obstacles that need to be addressed, such as low human resources, infrastructure, supervision, and law enforcement of illegal practices in fisheries, low fiscal support and coordination among stakeholders, have not been resolved. Data validity is needed to be related to fisheries aspects, cross-stockholder forums such as Maritim product investment forums consisting of government, academia, and the business world, and directing industrial development towards the industrial Maritim cluster (ICM).

Abstrak - Salah satu misi Gubernur Nusa Tenggara Barat (era 2018-2023) adalah mendorong industrialisasi. Sementara itu, perhatian terhadap sektor perikanan belum diberi porsi yang memadai untuk menjawab kebutuhan tersebut. Tujuan penelitian ini menjelaskan peluang pengembangan perikanan di NTB sebagai bahan baku industri. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan melakukan wawancara terhadap ahli dibidang perikanan, terdiri dai akademisi dan dinas perikanan. Hasil penelitian menunjukkan potensi perikanan NTB masih relatif besar, baik dalam usaha tangkap (off shore) maupun budidaya. Beberapa kendala seperti sumber daya manusia (SDM) yang rendah, infrastruktur perikanan yang belum memadai, pengawasan dan penegakan hukum atas praktik ilegal fishing belum maksimal, dukungan fiskal yang rendah dan koordinasi di antara para pemangku kepentingan yang belum maksimal juga perlu diselesaikan. Pembangunan industri menuju klaster industri maritim (ICM) dapat disarankan untuk dibangun.

Kata Kunci: Industri Maritim, Perikanan dan Bahan Baku

PENDAHULUAN

Laut diyakini berperan penting menciptakan kekayaan dan kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang, sehingga abad ke-21 dianggap eranya ekonomi kelautan (Kronfeld-goharani, 2018; Wang & Wang, 2019). Pembangunan kelautan atau ekonomi biru (Fernández-macho *et al.*, 2015) menyediakan ruang pengembangan ekonomi seperti perikanan, *akuakultur*, pembuatan kapal, pariwisata dan transportasi laut. Laut juga menjadi sumber energi terbarukan dan bioteknologi (Fernández-macho *et al.*, 2015). Keterbatasan lahan darat menyebabkan banyak negara melihat laut sebagai sumber daya penting, untuk itu diperlukan kebijakan pengembangan kelautan serta upaya memperkuat regulasi di dalamnya (Wang and Wang, 2019).

Mengingat pentingnya industri kelautan, era 1990-an China mengembangkan visi ekonomi kelautan berbasis teknologi dan pengetahuan (Su and Yang, 2018). Sementara Indonesia sejak Orde Baru pembangunan infrastruktur lebih berorientasi darat, walau pasca reformasi 1998 pembangunan maritim mulai disiapkan (Wicaksana, 2017).

Luas laut Indonesia adalah 70 persen, namun kemiskinan masyarakat nelayan masih relatif tinggi (Retnowati, 2011; Fatmasari, 2016). Belum tergambar kebijakan efektif menjadikan maritim sebagai titik tumpu pembangunan nasional, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan. Isu-isu kemaritiman terbaru yang ramai dibicarakan di ruang publik masih seputar tol laut, ekspor *baby lobster*, impor ikan, sementara nelayan dan berbagai masalahnya belum banyak diselesaikan. Salah satu jalan menuntaskan kemiskinan adalah dengan industrialisasi bidang maritim.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), oleh Gubernur terpilih periode 2018-2023 mencanangkan industrialisasi sebagai program utama. Sehingga, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023, NTB memprioritaskan pembangunan beberapa kawasan industri, antara lain Global Hub Kayangan Lombok Utara, Kawasan SAMOTA (Teluk Saleh, Pulau Moyo dan Gunung Tambora), Kawasan Industri Pariwisata Mandalika dan Kawasan Industri Smelter di Sumbawa Barat.

Dari semua kawasan tersebut, ada 2 industri di aspek maritim yaitu pengembangan teluk saleh dan industri pariwisata super prioritas nasional di kawasan Mandalika Lombok. Dari dua kawasan maritim dalam RPJMD tersebut, pengembangan Teluk Saleh yang dirancang untuk pengolahan hasil laut. Secara keseluruhan pengembangan perikanan tentu tidak hanya di Teluk Saleh, karena potensi laut NTB yang relatif besar.

Dibutuhkan manajemen bisnis yang baik untuk menyiapkan industri maritim tersebut (Chen *et al.*, 2000). Langkah awal penyiapan tentu dengan mengidentifikasi potensi dan berbagai tantangan yang dihadapi. Sehingga, tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji peluang dan tantangan pengembangan industri maritim di NTB.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif adalah mendeskripsikan dan memaknai (Vanderstoep and Johnston, 2009) fenomena atau kejadian serta melakukan interpretasi berdasar kejadian yang diamati. Data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara terhadap beberapa partisipan (informan) yang terdiri dari pegawai dinas perikanan, akademisi dan pelaku bisnis. Adapun deskripsi informan: informan_1 berinisial Ir. P, MM akademisi, Informan_2 berinisial NK, SPi, M.Si birokrat, Informan_3: DM, MSc birokrat dan Informan_3 Dr. SH, M.Si sebagai akademisi. Di samping data kualitatif, penelitian ini juga menyajikan data sekunder sebagai pelengkap analisis berupa data produksi perikanan, potensi dan pemanfaatan perikanan provinsi NTB yang diperoleh di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Maritim dan Pembangunan Ekonomi

Industrialisasi merupakan proses perubahan (*shifting*) aktivitas ekonomi dari sektor pertanian (agraris) menjadi sektor industri, atau berbasis agraris dan kerajinan tangan digantikan industri yang berbasis mesin (Pula, 2017). Walaupun masih diperdebatkan, industrialisasi diyakini pertama kali terjadi di Inggris pada akhir abad ke-17 dengan beberapa faktor pendorong antara lain liberalisasi, pasar yang semakin kompetitif, kewirausahaan, fenomena alam dan dorongan menuju teknologi dan inovasi (Pula, 2017).

Dalam pembangunan industrialisasi, terdapat beberapa unsur dalam mengukur indeks kinerja industri yang harus dipenuhi, terdiri dari (Setiawati and Nachrowi, 2012: output, faktor produksi dan biaya produksi. Output terdiri dari nilai tambah dan pertumbuhannya, upah dan pertumbuhannya, jumlah perusahaan dan pertumbuhannya. Dari aspek faktor produksi terdiri dari jumlah tenaga kerja, barang

modal, dan kemajuan teknologi. Sedangkan dari aspek biaya produksi terdiri dari produktivitas tenaga kerja, barang modal dan efisiensi (Setiawati and Nachrowi, 2012). Kombinasi dari output dan biaya, maka roh industrialisasi adalah efisiensi, keunggulan (kompetitif) tidak saja dari kualitas namun juga harga serta komitmen politik pemerintah (Storm, 2017).

Pentingnya industri dalam wilayah laut perspektif teori ekonomi bukanlah hal baru, abad ke-18 Adam Smith telah menggambarkan keuntungan ekonomi dari keberadaan transportasi laut (Stopford 2009). Smith baru menyentuh aspek distribusi, padahal dalam konteks produksi laut (bahari) tentu menjanjikan banyak bisnis yang dapat dikembangkan, seperti (Retnowati, 2011): Perikanan (tangkap dan budidaya), pengolahan hasil budidaya, industri bioteknologi, industri tambang dan energi, pariwisata bahari, penyediaan transportasi laut, penyediaan jasa maritim, pemanfaatan pulau-pulau kecil untuk pariwisata, penggunaan sumber daya non-konvensional, pengembangan kultur dan budaya bari dan bisnis terkait jasa lingkungan (konversi dan biodiversitas).

Banyak determinasi bisnis sektor kelautan yang dapat dikembangkan. Oleh karena itu, penting bagi negara dan daerah membangun sektor kelautan khususnya dalam mengatasi persoalan yang masih dihadapi, yaitu kemiskinan. Hasil studi menunjukkan, bisnis akuakultur di Asia mampu meningkatkan ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, inklusi sosial, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan tetap mempertahankan ekosistem bumi (Pomeroy *et al.*, 2017; Kronfeld-goharani, 2018).

Dengan luasnya dampak ekonomi bisnis maritim, tentu diperlukan perencanaan bisnis yang efektif. Dalam mengembangkan bisnis maritim, tidak lepas dari empat rantai bisnis beserta turunannya, yaitu aspek produksi, distribusi, komersialisasi dan pasar (Firmansyah, 2016). Walaupun pembangunan industri memasuki generasi ke-4 atau biasa dikenal 4.0 namun secara prinsip sebenarnya tidak jauh dari penataan produksi, distribusi, komersialisasi dan pasar. Persaingan industri generasi terbaru hanya lebih jauh dalam akses pasar dan upaya mengurangi hambatan perdagangan (Stimson, Stough, & Roberts 2002).

Di tengah kemajuan teknologi informasi (4.0) yang kian masif ditandai lahirnya bisnis *unicorn*, pembangunan nasional masih saja berorientasi darat. Pengabaian pembangunan maritim kurang sejalan dengan jati diri bangsa yang secara geografis berbentuk kepulauan (Dahuri, 2016). Kemajuan bidang maritim tidak berarti membatasi ruang gerak bisnis darat. Kemajuan sistem logistik justru meningkatkan efisiensi bisnis darat karena biaya transportasi yang lebih efisien. Indonesia merupakan negara yang paling mahal biaya logistiknya, yaitu diperkirakan 24 persen dari PDB, sedangkan negara lain umumnya di bawah 10 persen dari PDB (Dahuri, 2016).

Dinamika bisnis sektor maritim akan sejalan dengan perkembangan bisnis secara umum, bahkan ekonomi maritim mampu menjadi menyanggah perkembangan bisnis global dan perdagangan global (Chen *et al.*, 2000). Dibutuhkan beberapa instrumen untuk mendorong bisnis maritim maju. Keterampilan kerja seperti komunikasi, teknik penyelesaian masalah, kemampuan beradaptasi, manajemen diri, kerja tim serta literasi dan teknologi digital (Chen *et al.*, 2000) perlu diperkuat.

Di samping itu, aspek keberlanjutan (*sustainable*) merupakan hal penting lain untuk dipertimbangkan. Salah satu aspek penentu keberlanjutan adalah dengan menjadikan kultur atau nilai-nilai lokal yang berkembang dalam masyarakat sebagai instrumen untuk menjaga kelestarian laut dan ekosistemnya.

Aspek Perencanaan Sektor Maritim

UU No. 31 tahun 2004 mengatur tata kelola maritim, atau spesifiknya perikanan. Undang-undang ini mengatur pengelolaan ikan dan ekosistemnya, penangkapan, konservasi, nelayan, korporasi, pelabuhan dan seterusnya. Tujuan yang ingin dicapai dari keberadaan UU ini mulai dari meningkatkan taraf hidup, peningkatan devisa, kesempatan kerja, pemenuhan kebutuhan gizi, nilai tambah dan daya saing, industrialisasi dan juga *sustainability* (Puspitasari, Soemarmi and Juliani, 2016).

Payung hukum pengembangan industri manufaktur cukup rinci, pemerintah daerah hanya perlu menyusun *road map* dan rencana yang tepat untuk mencapai industrialisasi. Perencanaan bisnis maritim dalam konteks ini dengan merencanakan tiap-tiap tahapan bisnis yang akan dilewati sektor bisnis. Tahapan itu, dengan mengikuti alur *value chains* bisnis. Secara umum *value chains* terdiri dari input, produksi, distribusi, pemasaran dan pasar. Sebagai contoh tergambar proses *value chains* ikan lele dan ular di Kamboja berdasar hasil studi Pomeroy *et al* (2017). Di mana, rantai nilai dimulai dari (Pomeroy *et al.*, 2017):

1. Input, di situ ada akifitas pasokan benih, pakan dan juga tersedia dokter hewan.
2. Produksi, hasil produksi (bahan baku) tersebar dalam 43,8 persen ke pengepul dan pedagang kecil, 37,5 persen masuk ke *wholesale-buyer* sisanya langsung ke pasar.

3. Pengepul, hasil pengepul terinci ke dalam 10, 4 persen langsung ke pasar, 15,9 persen masuk ke *processing* (pengolahan) dan 17, 5 persen masuk ke *wholesale-buyer*.
4. Prosesing, hasilnya 41,1 persen masuk ke *wholesaler* sisanya langsung ke pasar.
5. Perdagangan, di sana ada aktivitas *wholesaler* dan supermarket yang menyediakan kebutuhan pasar domestik, Konsumsi, dalam aspek ini produk mencakup kebutuhan pasar domestik (Pomeroy et al, 2017).

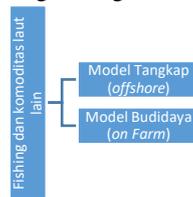
Studi terkait *value chains* juga dilakukan di Indonesia, komoditas yang diteliti adalah ikan bandeng. Ada beberapa hasil dari pengolahan ikan bandeng yaitu Abon, kerupuk, otak-otak, bandeng presto, bandeng beku (Pomeroy et al., 2017).

Otonomi maritim dapat dilakukan dengan memperkuat kapasitas internal pelaku usaha, di antaranya menurut David (2011) dengan cara merencanakan SDM, pemasaran, aspek produksi dan juga keuangan (Benyamin, 2013). Porter merinci beberapa tahapan strategis untuk mengembangkan bisnis yang juga perlu dipersiapkan yaitu persaingan antar pengusaha (dalam konteks daerah, persaingan antar daerah) merebut pasar, peluang masuknya pemain baru pada usaha yang sama, jenis produk substitusi, kekuatan pemasok sebagai penentu intensitas produksi dan kekuatan atau psikologi konsumen (Benyamin, 2013).

Kapasitas Produksi Bahan Baku

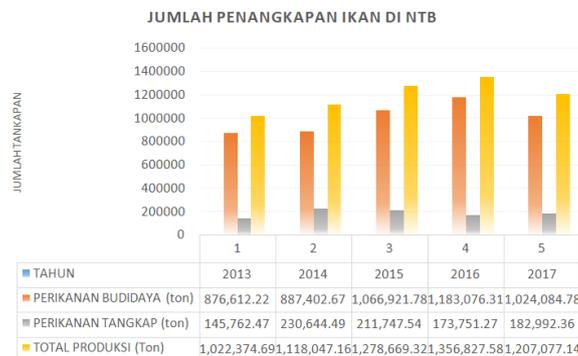
Pada 2017 Provinsi NTB memiliki jumlah nelayan di laut dan perairan umum sebanyak 68.240 orang, jumlah kapal sebanyak 24.707 unit (DKP Prov NTB 2018). Bila dibuat angka rasio maka satu kapal digunakan 3 orang nelayan. Jumlah ikan yang dihasilkan mencapai 182.992 ton ikan, terdiri dari 179.134 ton di laut dan 3854 ton di perairan umum. Bila dibuat rasio satu kapal menghasilkan sekitar 7,4 ton per tahun, atau 0,6 ton per bulan. Dari angka tersebut tentu masih jauh dari kapasitas memadai. Dalam meningkatkan produksi sektor maritim sebagai bahan baku, perlu direvitalisasi setidaknya tiga aspek, yaitu: penangkapan, budidaya dan pengembangan non ikan.

Gambar 1. Pengembangan Produksi Kelautan



Semua ahli perikanan yang ditanya dalam penelitian ini apakah sektor maritim layak dijadikan sebagai bahan baku industri, mayoritas menyatakan layak. Pernyataan ahli tentu beralasan karena potensi hasil ikan dan non ikan yang relatif besar di NTB. Produksi ikan tangkap dan budidaya NTB dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1. Produksi Perikanan di NTB



Sumber: DKP Provisi NTB, 2018

Dari tabel 1 menunjukkan, jumlah produksi perikanan tangkap jauh lebih kecil dari perikanan budidaya. Padahal berdasar rencana alokasi ruang laut berdasar dokumen RZWP3K NTB luas perikanan tangkap sebesar 2.384.459,59 hektar, sedangkan perikanan budidaya hanya seluas 72.863, 58 (DKP

Provinsi NTB, 2018). Dari total produksi ikan, yang dimanfaatkan untuk pengolahan industri UMKM (Usaha Menengah Kecil Mikro) pada 2017 adalah sebesar 199.895 ton atau 0,017 persen saja. Jumlah UMKM yang mengelola perikanan sebagai produk industri 2017 adalah 2426 unit. Berdasar fakta tersebut, peluang untuk pengembangan industri berbasis produksi perikanan dalam skala yang lebih besar masih terbuka lebar.

Tabel 2. Data Potensi dan Tingkat Pemanfaatan Sumberdaya Ikan tangkap Pada WPP 573 dan WPP 713 Provinsi NTB

Jenis ikan	WPP 573		WPP 713	
	Potensi (ton/tahun)	Tingkat Pemanfaatan SDI (%)	Potensi (ton/ tahun)	Tingkat Pemanfaatan SDI (%)
Pelagis kecil	294.092	0,91	104.546	0,61
Pelagis besar	505.942	0,78	419.342	0,86
Ikan demersal	103.501	0,96	77.238	1,04
Ikan karang	8.778	1,36	365.420	0,34
Udang panaeid	6.854	1,36	37.268	1,70
Lobster	844	0,54	1.020	1,40
Kepiting	465	1,05	5.016	1,59
Rajungan	659	0,64	6.740	1,52
Cumi-cumi	6.556	1,40	10.010	1,70
Total	929.330		1.026.599	

Sumber: DKP Provinsi NTB, 2018

Keterangan:

- WPP 573 = Area tangkap sekitar perairan Samudra Hindia bagian Selatan Jawa hingga NTB, Laut Sawu dan Laut Timur Bagian Barat.
- WPP 713=Area tangkap meliputi perairan selat Makassar, Teluk Bone, laut Bali dan Flores

Selain produk ikan, NTB menjadi salah satu pemasok garam nasional, di samping itu memiliki potensi rumput laut, ubur-ubur dengan pangsa pasar ekspor yang cukup memadai, khususnya ke negara Cina. Masalahnya produk-produk non ikan seperti garam belum dikelola secara baik, salah satu masalahnya adalah tata niaga, seperti tingginya impor garam negara, kualitas garam yang rendah (kualitas KW-2 ke bawah) dan lain-lain.

Di samping garam, jumlah produksi rumput laut NTB pada 2017 adalah 68.240 ton. Produksi rumput laut mengalami pasang surut (fluktuatif), sehingga komersialisasi produk maritim perlu gencar dilakukan, sering kali produk lokal kalah bersaing karena masyarakat lokal sendiri tidak mengenal produk asli daerahnya, produk-produk itu jauh dari konsumen. Penggunaan produk asli daerah oleh masyarakat lokal belum banyak dilakukan. Komoditas garam misalnya, garam luar bermerek kapal api dan dolpin mendominasi baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun rumah-rumah makan.

Sumber Daya Fisik Dan Non Fisik

Ada kesamaan dan perbedaan prioritas yang dibangun berdasar pandangan empat informan ahli terkait menjadikan industrialisasi maritim di NTB. Namun bila disimpulkan beberapa prioritas itu, terdiri dari aspek fisik antara lain: 1). Ketersediaan data valid terkait kapasitas perikanan NTB untuk kebutuhan riset dan perhitungan investasi, 2). Penguatan Modal bagi usaha perikanan 3). Infrastruktur dan fasilitas pendukung.

Provinsi NTB menyadari pentingnya data sebagai acuan Analisa pembangunan. Sehingga diluncurkan program NTB satu data. Dinas Kelautan dan Perikanan juga menyodorkan data dalam website NTB satu data. Namun demikian, data-data yang disodorkan harus dipastikan validitasnya sehingga menjadi acuan investor untuk melakukan perhitungan *benefit-cost* investasi perikanan.

Ada beberapa peluang investasi perikanan yang ditawarkan oleh Pemerintah Provinsi, yaitu (KKP, 2018): Produk pengolahan kelautan dan perikanan, pengembangan gudang beku (*cold storage*), investasi perikanan tangkap, pembangunan industri wisata bahari dan investasi perikanan budidaya. Pemerintah daerah-pun memberi insentif untuk kemudahan berinvestasi melalui Pergub No.10 Tahun 2016, selama perusahaan menyerap tenaga kerja lokal, alih teknologi, daya saing daerah dan seterusnya.

Dari aspek non-fisik menurut ahli, antara lain: 1) Menyediakan SDM kemaritiman yang menguasai teknologi penangkapan dan pemasaran produk. Hal ini penting mengingat sektor maritime adalah sektor yang padat karya dan padat pengetahuan (Chang and Zhang, 2018). 2). *Law enforcement* terhadap pelaku *illegal fishing* dan perilaku kriminal lain dalam kelautan, 3). Kemitraan dan koordinasi lintas *stackholder* yaitu lintas sektor, lintas wilayah dan lintas *science*.

Beberapa kendala yang masih dihadapi NTB dijelaskan oleh informan ahli berikut:

“Kemiskinan, destruktif and illegal fishing, IUU Reported, koordinasi lintas stakeholders yang masih lemah, minimnya investasi, rendahnya penguasaan teknologi, lemahnya kapasitas sumber daya manusia di birokrasi, keberpihakan penganggaran di sektor maritim yang masih sangat minim, pengawasan dan law enforcement yang masih lemah, minimnya riset di sektor maritim, lemahnya penataan kelembagaan dan tata niaga” (Informan-4)

Provinsi NTB masih terkendala pada persoalan praktik ilegal di sektor perikanan. Di samping disebabkan oleh kemiskinan, juga minimnya pemahaman nelayan akan bahaya yang ditimbulkan dari praktik ilegal. Rendahnya pengawasan oleh pemangku kebijakan tentu menjadi alasan lain dari praktik ilegal di sektor perikanan.

Contoh praktik ilegal misalnya menangkap ikan dengan bom, padahal beberapa tahun sebelumnya telah terbentuk Satgas Pengawas penangkapan ikan (antara, 2017). Tentu saja persoalan *illegal fishing* tidak boleh ada lagi ke depan, karena tidak saja terkait *sustainability* bagi ekosistem ikan namun juga terkait kepastian hukum dalam pengembangan investasi perikanan. *Illegal fishing* juga menunjukkan rendahnya koordinasi dan pengawasan masing-masing *stackholder* daerah.

Teknologi yang didorong untuk dikembangkan adalah teknologi berkaitan dengan peningkatan budidaya dan tangkap serta teknologi dalam pemasaran hasil ikan. Penggunaan teknologi dibutuhkan infrastruktur (alat) sekaligus keahlian nelayan. Sehingga, pelatihan dalam pembuatan teknologi canggih dalam usaha perikanan perlu dipikirkan diselenggarakan secara berkala. Pengelolaan pasar berbasis *market place* atau *platform* adalah keniscayaan di era industri 4.0. sehingga pasar perikanan dapat menjangkau secara luas.

Riset Dan Pengembangan (R and D)

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia perikanan dan kelautan untuk mencapai industrialisasi salah satunya ditopang oleh perguruan tinggi. Di Provinsi NTB, ada dua kampus yang memiliki program studi perikanan yaitu, Universitas 45 dengan fakultas kelautan dan perikanan dan Universitas Mataram dengan fakultas pertanian, program studi budidaya perairan. Universitas Mataram awalnya berencana membuka fakultas kelautan dan perikanan namun terkendala moratorium pembukaan fakultas baru oleh pemerintah pusat.

Dengan demikian, riset dan pengembangan industri perikanan tentu menjadi terhambat bila tidak didukung sumber daya manusia yang memadai di bidang tersebut. Di samping itu, rendahnya kualitas dan kuantitas riset. Bila dilihat dari *google scholar* dapat diamati peta riset terkait perikanan dan kelautan di NTB, umumnya dilakukan oleh peneliti di luar NTB, misalnya dari KKP, BPPT dan IPB. Sementara kontribusi peneliti di NTB sendiri masih sangat terbatas.

Industrialisasi dibutuhkan laboratorium pengembangan yang setiap saat mengkaji aspek produksi perikanan dan kelautan, pemasaran sampai dengan pendampingan *start-up* usaha perikanan. Dengan demikian, fakultas Teknik industri perlu juga tersedia bagi daerah untuk mendukung industrialisasi perikanan.

Dukungan Penganggaran (APBD)

Dukungan penganggaran daerah terhadap pengembangan sektor perikanan dan kelautan menjadi penting dalam meletakkan industrialisasi di sektor ini. Politik anggaran daerah dapat terlihat pada pembiayaan APBD 2019 untuk pengembangan usaha perikanan dan kelautan. Program pemberdayaan masyarakat pesisir terdiri dari beberapa kegiatan yaitu: 1). Pengembangan Usaha Masyarakat Pesisir dan pulau-pulau kecil dengan program Penguatan usaha budidaya perikanan, terdiri dari: Penguatan Usaha Perikanan Tangkap Penguatan, Usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. 2). Program Pengembangan Budidaya Perikanan: Pengelolaan dan Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya, Pengelolaan dan Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan, Pengelolaan Sistem Pembenihan Ikan. 3). Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan: Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, Pengelolaan dan Pengembangan Unit Penangkapan Ikan dan Kenelayanan, Pengelolaan Sumber daya Ikan dan Pengendalian Penangkapan Ikan. 4). Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan: Pengembangan Pengolahan dan Jaminan Mutu Hasil Perikanan, Pengembangan Usaha dan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan, serta Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan.

Di samping itu, ada Program pengelolaan Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdiri dari beberapa kegiatan yaitu: Pengawasan dan Pengendalian Sumber daya Kelautan dan Perikanan, Pelestarian dan

Pemulihan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Penataan Ruang Laut dan Pengelolaan Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Pantai Sekotong.

Bila di lihat dari postur APBD dapat dijelaskan bahwa upaya peningkatan kuantitas dan kualitas hasil laut sebagai bahan baku industri oleh Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi NTB telah tepat sasaran. Hasil produksi tersebut dapat ditindaklanjuti oleh dinas perindustrian untuk penguatan aspek hilir (industri).

Tata Niaga Bisnis

Menurut informan-2 kendala lain selain anggaran yang relatif kecil adalah validitas data potensi dan pengawasan terhadap program yang lemah. Sehingga, program hanya sukses di awal namun tidak berkelanjutan. Secara lengkap, pemaparan informan 2 sebagai berikut:

“Belum tersedianya data potensi dengan baik. Kurangnya kerja sama antar stake holder. Pengawasan program kurang terlaksana dengan baik”(Informan-2)

Umumnya beberapa dinas yang menangani rantai industri dari hulu sampai hilir belum terkoordinasi dengan baik. Masing-masing dinas terkesan berjalan sendiri. Harusnya dalam konteks industrialisasi produk perikanan dan kelautan yang dikembangkan dinas perikanan dan kelautan, perlu dijemput dinas perindustrian untuk dikembangkan sebagai bahan baku industri, dipasarkan atau dijual dinas perdagangan, dibantu dinas koperasi untuk membangun keuangan nelayan dan dibesarkan oleh dinas penanaman modal dan pelayanan satu pintu (DPMPT-SP) untuk investasinya.

Kerja sama yang kurang optimal tidak saja terjadi antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah) namun juga dengan pihak swasta. Swasta yang paling mengerti seluk beluk industri dan bisnis di dalamnya. Dalam mempermudah upaya koordinasi antar *stockholder* informan-3 memberi solusi untuk dibentuk forum dari setiap komoditas. Forum ini melakukan pertemuan dan membahas secara tuntas terkait produksi dan pengembangan produk. Misalnya *Fish Investment Forum* (FIF), Rumput Laut Investment Forum (Rulif) atau *Salt Investment Forum* (SIF). Lebih jauh informan-3 menjelaskan sebagai berikut:

“perlu adanya forum di tiap komoditas yang fokus memikirkan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka mempercepat komoditas menjadi sektor unggulan...”

Kementerian Kelautan dan Perikanan secara berkala menyelenggarakan *Marine and Fisheries Business and Investment Forum* dengan agenda percepatan bisnis dan investasi perikanan nasional. Hal yang sama perlu dilakukan Pemerintah Provinsi NTB. Targetnya, memperkenalkan potensi perikanan, menawarkan insentif bisnis dan menjelaskan lahan industri yang *clear and clean* untuk pembangunan pabrik dalam industri kelautan.

Ekosistem Industri: Sebagai Tata Kelola

Model budidaya dibutuhkan sumber daya nelayan yang memadai, teknologi, infrastruktur, kualitas pembibitan dan pendampingan. Budidaya diharapkan produksi ikan melimpah dan berkelanjutan, sehingga berpeluang untuk di bangun *Maritim Industrial Cluster* (MIC) berbasis usaha pengolahan ikan. MIC dianggap mampu menciptakan daya saing ekonomi dan persaingan global (Karahana and Kirval, 2018; Xiao and Wang, 2019), kluster dapat memfasilitasi berkembangnya industri 4.0 (Jankowska and Göt, 2017). Model pengembangan kluster industri secara umum berkembang di darat. Namun, berdasar beberapa kajian sebelumnya terbukti mampu dikembangkan dalam bisnis sektor maritim.

Pengolahan ikan dapat berupa industri pengalengan ikan dan pengolahan produk ikan ke dalam berbagai bentuk (determinasi). Di samping itu, untuk memenuhi kebutuhan pasar tertentu dapat pula dilakukan ekspor ikan mentah. Konsep kluster yang dikembangkan Porter misalnya pengumpulnya industri yang sejenis dalam satu kawasan atau secara konseptual sebagai konsentrasi geografis perusahaan yang saling berhubungan, di dalamnya ada pemasok, penyedia layanan, perusahaan industri terkait dan lembaga terkait dalam bidang tertentu (Djoumessi, Chen and Cahoon, 2019). Pengembangan kluster sangat mungkin dilakukan di NTB, karena memiliki beberapa teluk besar dan potensial, di antaranya Teluk Saleh, Teluk Bima dan Teluk Waworada. Beberapa teluk ini menghasilkan komoditas ikan seperti ikan kerapu, udang vaname, lobster, ubur-ubur dan seterusnya.

Dukungan Regulasi

Perda No.12 tahun 2017 adalah berkaitan dengan “rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2017-2037” Perda mengatur *sustainability* sektor perikanan sekaligus upaya meningkatkan produksi ikan. Secara rinci perda menjelaskan langkah-langkah perlindungan dan pengembangan ekonomi di sektor perikanan. Lebih jauh informan 3 menjelaskan sebagai berikut:

“*Pengawasan dan pendampingan secara intensif terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan perikanan, Peningkatan kapasitas SDM di level pemerintah dan masyarakat pelaku pemanfaatan sektor maritim (nelayan, pembudidaya, etc), Penataan kelembagaan sesuai kapabilitas, dukungan infrastruktur dan dukungan fiskal yang memadai bagi pengembangan sektor kemaritiman, penguatan jejaring dan kemitraan dengan privat sektor, perijinan yang tidak berbelit dan akuntabel, memperkuat koordinasi dan sinkronisasi program lintas sektor. Menjamin penerapan Perda no 12 tahun 2017 secara akuntabel dan transparan*”.

Dengan demikian, secara regulasi atau aspek aturan pengembangan sektor perikanan telah tersedia di NTB, tinggal implementasinya.

KESIMPULAN

Berdasar jumlah produksi dan luas lahan, Provinsi NTB layak menjadikan sektor perikanan sebagai dasar bahan baku industrialisasi. Secara regulasi telah tersedia payung hukum untuk memperkuat sektor perikanan sebagai sumber industrialisasi. Namun demikian, rendahnya SDM di sektor maritim, infrastruktur, pengawasan dan *law enforcement* terhadap praktik ilegal dalam sektor kelautan, dukungan fiskal yang masih rendah dan koordinasi antar *stakeholder* masih menjadi kendala.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Mengingat peluang pengembangan sektor maritim masih cukup besar untuk kebutuhan industrialisasi, pemangku kepentingan perlu mengupayakan peningkatan produksi produk perikanan secara kuantitas dan kualitas. Beberapa upaya yang perlu dilakukan adalah 1). Menyiapkan penganggaran dan program yang memadai dalam memperkuat sektor kelautan, 3. Menyediakan data valid terkait aspek perikanan sebagai dasar analisis tata kelola, 2). Melahirkan forum bersama yang mendorong industrialisasi maritim, 3). Mengarahkan pembangunan industri ke arah *industry cluster maritim* (ICM).

DAFTAR PUSTAKA

- Antara (2017) ‘NTB bentuk satgas pengawas “illegal fishing”’, *antara.com*. Available at: <https://www.antaraneews.com/berita/647576/ntb-bentuk-satgas-pengawas-illegal-fishing>.
- Benyamin, P. (2013) ‘Manajemen Dan Pengembangan Pemasaran Pada Perusahaan Perikanan Di Sidoarjo’, *AGORA*, 1(1).
- Chang, Y. and Zhang, X. (2018) 'Optimization of Continuing Education of Marine Human Resources in China Based on System Stability', *Educational Sciences: Theory & Practice*, 18(5), pp. 2403–2409.
- Chen, P. S.-L. *et al.* (2000) 'Employability skills of maritime business graduates: industry perspectives.', *WMU Journal of Maritime Affairs*, 17(2), pp. 267–292.
- Dahuri, R. (2016) ‘Ironi Ekonomi Dualistis’, in Munir, B. (ed.) *NTB Pusat Pangan Halal Dunia*. Yogyakarta: Regional Institute 104, pp. 6–7.
- Djoumessi, A., Chen, S. L. and Cahoon, S. (2019) 'Factors influencing innovation in maritime clusters: An empirical study from Australia', *Marine Policy*, (December 2018).
- DKP Provinsi NTB, 2018. Potensi Usaha dan Peluang Investasi Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB. Provinsi NTB
- Fatmasari, D. (2016) ‘Analisis Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat Pesisir Desa Waruduwur, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon’, *Al-Amwal*, 6(1), pp. 144–166.

- Fernández-macho, J. *et al.* (2015) 'Measuring the maritime economy : Spain in the European Atlantic Arc', *Marine Policy*. Elsevier, 60, pp. 49–61.
- Firmansyah, M. (2016) 'Bisnis Pangan Halal Beserta Turunannya: Peluang dan Tantangan', in Munir, B. (ed.) *NTB Pusat Pangan Halal Dunia*. Yogyakarta: Regional Institute 104, pp. 51–66.
- Jankowska, B. and Götz, M. (2017) 'Clusters and Industry 4.0 - do they fit together?', *European Planning Studies*, 25(9), pp. 1633–1653.
- Karahan, C. B. and Kirval, L. (2018) 'Clustering potential of Istanbul maritime sector Clustering potential of Istanbul maritime sector', *Maritime Business Review*, 3(3), pp. 314–336.
- KKP (2018) *Potensi Usaha dan Peluang Investasi Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan: Kementerian Kelautan dan Perikanan*. Available at: [https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/A_PDS/Potensi Usaha dan Investasi/NTB.pdf](https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/A_PDS/Potensi%20Usaha%20dan%20Investasi/NTB.pdf).
- Kronfeld-goharani, U. (2018) 'Maritime economy : Insights on corporate visions and strategies towards sustainability', *Ocean and Coastal Management*. Elsevier, 165(February), pp. 126–140.
- Pomeroy, R. *et al.* (2017) 'Linkages and Trust in the Value Chain for Small-scale Aquaculture in Asia', *Journal of the World Aquaculture Society*, 48(4), pp. 542–554.
- Pula, B. (2017) 'Industrialization and Deindustrialization', *The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social Theory*, (1962), pp. 1–3.
- Puspitasari, N., Soemarmi, A. and Juliani, H. (2016) 'Fungsi Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Sebagai Sarana Pendukung Industri Perikanan Di Jakarta Utara', *DIPONEGORO LAW JOURNAL*, 5(4), pp. 1–17.
- Retnowati, E. (2011) 'Nelayan Indonesia Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi, dan Hukum)', *Perspektif*, XVI(3), pp. 149–159.
- Setiawati, D. and Nachrowi, N. D. (2012) 'Pembangunan Indeks Kinerja Industri Industrial Performance Index Development Pendahuluan Tinjauan Referensi', *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 13(1), pp. 47–68.
- Stopford, M. (2009) *Maritime Economics*. Third Edit. London and new york: Routledge.
- Su, M. and Yang, Y. (2018) 'Evolution of district marine policies in China : The case of Shandong Province', *Marine Policy*. Elsevier Ltd, (December 2017), pp. 0–1.
- Vanderstoep, S. W. and Johnston, D. D. (2009) *Research Methods For Everyday Life: Blending Qualitative and Quantitative Approaches*. San Francisco: John Wiley & Sons, Inc.
- Wang, Y. and Wang, N. (2019) 'The role of the marine industry in China' s national economy : An input – output analysis', *Marine Policy*. Elsevier Ltd, 99(October 2018), pp. 42–49.
- Wicaksana, I. G. W. (2017) 'Indonesia's maritime connectivity development: Domestic and international challenges', *Asian Journal of Political Science*, 25(2), pp. 212–233.
- Xiao, W. and Wang, L. (2019) 'The Identification of Maritime Industry Clusters Using Maritime Industry Super-network', *Ekoloji*, 28(107), pp. 2023–2029.

Kota Tua Sebagai Destinasi Wisata Kota: Kenapa Tidak (Implementasi Kebijakan Publik)

Aang Afandi ^{1)*}, Dewi Rahayu ²⁾

¹⁾ Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Malang, Jl. Soekarno Hatta No 9, Malang, 65141, Indonesia

²⁾ Jurusan Ilmu Ekonomi, Universitas Lambung Mangkurat, Jl. Brigjend H. Hasan Basry, Indonesia

E-mail corresponding author: aang.afandi@polinema.ac.id

Received: 31-01-2021;
Accepted: 08-04-2021;
Available online: 30-04-2021

Ecoplan Vol. 4 No. 1, April 2021,
hlm 10-20.

ISSN p: 2620-6102
e: 2615-5575

Keywords: *old town, city
tourism, tangible &
intangible asset*

Abstract – *Cities in Indonesia continue to improve, both physically and non-physically, to become smart cities. This is also the function of the city as the center of activity in a region. On the other hand, some cities have a history with their old cities. This old city asset deserves to be maintained, preserved, and developed as a city tourism destination. This study aims to identify how a city that has old city assets can manage its assets as a city tourist destination, then to identify the potential of cities in Indonesia and to make stages that the city must carry out if it wants to utilize the assets of the old city as a city tourist destination. The study method used is to explore the city in the management of the old town area so that it can get a picture of what is being done by comparing it to several other cities in the world and related to the prerequisites of a destination as city tourism. The results show the stages that can be used as a reference for the city to develop the old city. The results of this study need further deepening, related to the recommended stages and the need for Delphi methods, as a form of FGD with experts in their fields where this activity is indeed multi-scientific background. So that the governance of material and intangible cultural heritage can be achieved without neglecting the various values that must be fulfilled. It is hoped that this phasing can serve as a raw model in the management of the old town (cultural heritage) in other cities.*

Abstrak - Kota – kota di Indonesia terus berbenah, baik fisik maupun non fisik, untuk menjadi smart city. Hal itu sekaligus sebagai fungsi kota sebagai pusat aktivitas suatu wilayah. Disisi lain, beberapa kota yang memiliki sejarah dengan keberadaan kota tuanya. Aset kota tua inilah sebenarnya layak untuk dipertahankan, dilestarikan dan memungkinkan dikembangkan sebagai destinasi pariwisata kota. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana sebuah kota yang memiliki aset kota tua mampu mengelola aset nya sebagai destinasi wisata kota, berikutnya mengidentifikasi potensi kota – kota di Indonesia dan Menyusun pentahapan yang mesti dilakukan oleh kota bila ingin memanfaatkan aset kota tua sebagai destinasi wisata kota. Metode kajian yang digunakan adalah berupaya mengeksplorasi kota dalam tata Kelola Kawasan kota tua sehingga memperoleh gambaran tentang apa yang dilakukan dengan komparasi pada beberapa kota lain di dunia dan dikaitkan pula dengan prasyarat destinasi sebagai pariwisata kota. Hasilnya menunjukkan pada pentahapan yang secara umum dapat dijadikan acuan bagi kota untuk mengembangkan kota tua. Hasil penelitian ini perlu pendalaman lebih lanjut, berkaitan dengan pentahapan yang direkomendasikan dan perlu adanya *delphi methods*, sebagai bentuk FGD dengan para ahli dibidangnya yang mana aktivitas ini memang multi latar belakang bidang keilmuan. Sehingga tata Kelola cagar budaya benda dan tak benda dapat tercapai, tanpa mengabaikan berbagai nilai – nilai yang mesti

dipenuhi. Harapannya pentahapan ini dapat sebagai raw model dalam pengelolaan kota tua (cagar budaya) di Kota – Kota yang lain.

Kata Kunci: Kota Tua, Pariwisata Kota, aset benda dan tak benda

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berbagai kota di Indonesia terus berbenah, baik pengembangan dan pembangunan fisik maupun aktivitas non fisik. Sehingga harapannya menjadi *smart city*, yang warga kotanya semakin nyaman dengan tempat tinggalnya. Termasuk memenuhi masyarakat lain yang membutuhkan aktivitas di Kota. Sementara itu, terdapat beberapa kota di Indonesia yang memiliki kota tua dengan aset bangunan – bangunan tersisa dan warisan tak benda yang tersisa atau bahkan masih terjaga di kalangan masyarakat lokal. Tentunya aset cagar budaya benda dan tak benda perlu dilestarikan sebagai fungsi menjalankan pelestarian cagar budaya. Selain itu juga berpeluang untuk destinasi pariwisata kota.

Beberapa kota masih mengabaikan aset cagar budaya ini, sementara ada beberapa kota yang mulai merevitalisasi dan memanfaatkannya. Bisa jadi di antara kota ini, cenderung ikut – ikutan dengan kota lain. Walaupun ada pula yang lebih “*seriously*” mengelola cagar budaya.

Pengelolaan dan pelestarian Cagar budaya ini masih menghadapi berbagai persoalan yang serius, walaupun telah ada Undang – Undang No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, namun aturan teknisnya sampai saat ini belum tersedia. Sementara itu muncul banyak persoalan saat implementasi dilapang salah satunya adalah aturan yang saling berbenturan. Selanjutnya pengelolaan cagar budaya ini tidak hanya memerlukan peran arkeolog saja, namun semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat. (Indriani, 2017). Hal inilah sebenarnya yang mesti dianalisis bagaimana seharusnya hubungan dan apa saja yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan ini.

Idealnya, dalam pengembangan Kawasan kota tua ini memerlukan pentahapan yang runtut yang mampu menghasilkan Kawasan kota tua yang memenuhi kaidah tata Kelola cagar budaya, memiliki potensi sebagai destinasi wisata, sekaligus memberikan benefit ataupun dukungan aktivitas ekonomi pada masyarakat luas. Satu hal lagi, tanpa meminggirkan masyarakat lokal yang merupakan sentral dari warisan tak benda dari Kawasan kota tua tersebut.

Landasan Teori

Destinasi wisata

Menurut (Seakhoa-King, 2020) menjelaskan bahwa destinasi wisata sebagai wilayah geografis dengan batas yang jelas, seperti negara atau pulau. Sehingga diterapkan pada berbagai skala, mulai dari obyek wisata individu kecil dengan luasan beberapa hektar, hingga seukuran negara atau bahkan benua. Dengan demikian maka pada destinasi pariwisata tersebut tentunya terdapat produk pariwisata. Adapun produk pariwisata bisa berupa atraksi, fasilitas dan layanan kepada wisatawan. Dengan demikian destinasi merupakan bagian dari paket wisata yang disusun sedemikian rupa, sementara itu pemaknaan dari paket wisata (*package tour*) adalah suatu perjalanan wisata dengan memiliki satu atau beberapa motif yang disusun sedemikian rupa dengan berbagai fasilitas yang disediakan. (Nuriata, 2014)

Berbagai destinasi wisata yang ditawarkan oleh suatu negara atau wilayah sangat beragam, mulai dari destinasi wisata alam, wisata budaya, wisata ziarah, wisata industri dan lain sebagainya.

Kota, sebagai sebuah pusat aktivitas ekonomi, sosial dan budaya pada lingkungan tertentu tentunya juga bisa menawarkan aset kota itu sebagai wisata kota.

Kota cenderung selalu dianggap sebagai tempat yang menarik bagi wisatawan untuk mendapatkan pengalaman rekreasi yang kuat. Konsepsi pariwisata perkotaan atau disebut dengan urban tourism ini sebenarnya telah terjadi pada pertengahan 1700-an Ketika bangsawan Eropa mulai berkeliling di kota – kota Eropa lainnya. Dengan adanya perluasan jaringan transportasi, munculnya tempat hiburan komersial, pembangunan hotel dan resor, taman umum, teater, menjadi bagian wisata kota ini (Dixit, 2020).

Dengan demikian, berarti setiap kota memiliki peluang yang sama untuk memanfaatkan sumber daya kotanya untuk digunakan dan sebagai aset untuk pengembangan kota sebagai kota wisata. Yang menarik bahwa kota bisa menjadi destinasi dengan multi-motivasi, artinya orang melakukan aktivitas di kota dengan beragam jenis motivasi, seperti bisnis, hiburan dan rekreasi, mengunjungi keluarga/ kerabat, Kesehatan, berbelanja ataupun yang lainnya. Dengan peluang wisata multidimensi ini sebenarnya berpeluang banyak dan beragam aset kota yang dapat dimanfaatkan. Seperti keberadaan pasar tradisional, pasar modern, *factory outlet* dapat dioptimalkan sebagai fungsi wisata belanja, keberadaan pusat kebugaran, Spa, Perawatan wajah dan kulit, berbagai rumah sakit dapat dikembangkan sebagai wisata Kesehatan ataupun berbagai aset lainnya.

Dalam sejarahnya, kota ada dan berkembang sudah cukup lama, puluhan bahkan ratusan tahun. Dengan perjalanan sejarah yang Panjang ini tentunya kota memiliki bangunan – bangunan tua, yang merupakan wujud dari kota tua dimasa lalu. Kota tua ini bisa berupa bangunan – bangunan, lanskap / view kota, budaya yang berkembang, makanan khas atau wujud – wujud lainnya.

Sementara itu, jika dikaitkan dengan konsep pariwisata perkotaan yang dapat dikaitkan dengan aset kota tua yang dimiliki maka dapat dikaitkan dengan, kota wisata sejarah (*tourist-historic city*), merupakan konsep pariwisata perkotaan yang menjadikan sejarah sebagai daya Tarik wisatanya. Salah satu pekerjaan rumah utama yang dihadapi adalah upaya konservasi terhadap peninggalan sejarah yang dimiliki.

Kota budaya (*cultural city*), konsep ini juga sering diidentikkan dengan kota sejarah atau kota heritage. Namun kota budaya jauh lebih luas dibandingkan kota sejarah. Kota budaya meliputi: 1) museum dan wisata heritage, 2) distrik – distrik budaya (pecinan, kampung arab), 3) masyarakat etnis, 4) Kawasan hiburan, 5) wisata sejarah, dan 6) trail sastra, hal ini sesuai yang dikemukakan oleh (Evans dan Ricards dan Wilson, 2007). Dengan demikian wisata budaya ini berkaitan dengan *tangible dan intangible* aset yang dimiliki, dan yang lebih menarik lagi pada wisata budaya ini adalah interaksi dengan masyarakat dengan budaya khususnya. Dua konsep di atas sebenarnya yang saling berkaitan dengan wisata kota tua.

Pengertian Kota Tua

Dalam kamus Oxford disebutkan Kota Tua (*Old Town*) adalah bagian tua dari kota atau kota yang memiliki Batasan atas modernitas, yang maknanya bahwa kota yang identik dengan modernitas, tetapi justru bagian ini memiliki karakteristik yang sebaliknya. Istilah ini mulai dikenal semenjak akhir abad ke-16. Dengan demikian konsep kota tua ini adalah aset kota yang terdiri dari bangunan, lanskap, budaya, masyarakat dengan *tangible* dan *intangible* aset-nya yang ada pada wilayah bagian kota, yang masih bisa ditemui, diidentifikasi dan dilihat.

Keberadaan kota tua ini dimungkinkan masih terabaikan, mulai dikelola atau bahkan dikelola dengan baik. Terdapat kota tertentu yang dapat mengelola dan mengembangkannya dengan baik tetapi ada juga yang masih mengabaikan aset potensial tersebut. Adapun tujuan dari jurnal ini adalah mengidentifikasi konsepsi awal tentang bagaimana sebuah kota di Indonesia, memiliki daya Tarik terhadap pemanfaatan Kota Tua sebagai aset wisata.

METODE PENELITIAN

Pada dasarnya penelitian yang dilakukan ini adalah jenis riset cepat (*quick research*) dengan menggunakan data sekunder sebagai data dan informasi yang digunakan, aktivitas ini merupakan *preliminary research* yang perlu pendalaman lebih lanjut.

Teknik pengumpulan data

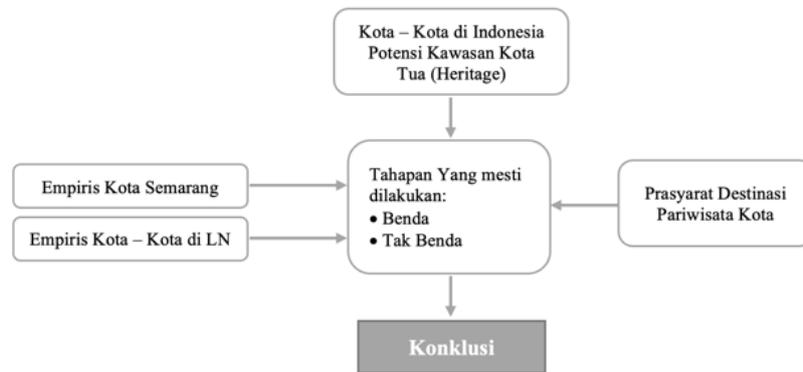
Kajian ini merupakan kajian awal, sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan adalah eksplorasi studi Pustaka untuk melengkapi berbagai informasi yang dibutuhkan.

Teknik analisis

Teknik analisis yang digunakan adalah eksploratif naratif, yakni mengeksplorasi berbagai informasi yang ada, lantas informasi ini dianalisis sedemikian rupa dan dinarasikan untuk membangun informasi awal tentang pariwisata kota tua ini.

Tahapan Penelitian

Tahapan yang dilakukan pada penelitian ini adalah mengidentifikasi dan mengeksplorasi proses yang dilakukan oleh kota Semarang dalam mengelola dan mengembangkan Kawasan kota tuanya menjadi destinasi wisata, yang akan di komparasi-kan dengan kota – kota lainnya yang melakukan hal yang sama; berikutnya, mengidentifikasi kota – kota yang memiliki potensi keberadaan Kawasan kota tua; ketiga, prasyarat apa saja yang mesti dipenuhi oleh kotanya dalam pengembangan destinasi wisata utamanya yang berbasis sejarah atau cagar budaya; keempat, Menyusun tahapan pengembangan cagar budaya benda dan tak benda; kelima, rekomendasi / konklusi akhir.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Benchmarking Analisis

Bahan ini digunakan untuk bahan pijakan awal bagaimana sebuah kota memiliki aset kota tuanya dan dikelola sedemikian rupa sebagai aset wisata kota. Sebagai bahan referensi, *benchmarking* kota tua yang dijadikan pendalaman pada kajian ini adalah Kota Tua Semarang.

Kota Tua Semarang

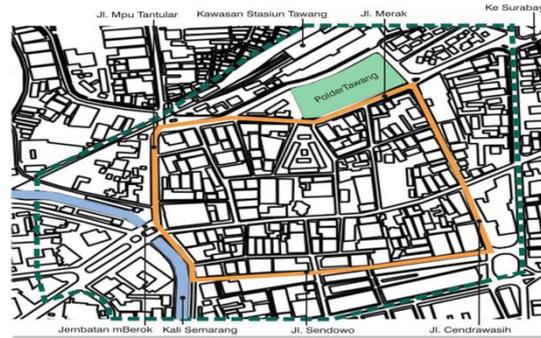
Pada sejarahnya, Kawasan ini dikelilingi oleh benteng. Dengan Batasan:
 Utara: Noorderwalstaat / Jl. Merak
 Timur: Oosterwalstraat / Jl. Cendrawasih
 Selatan: Zuiderwalstraat / Jl. Kepodang
 Barat: Westerwalstraat / Jl. Mpu Tantular.



Gambar 1. Kota Lama Semarang (sumber: www.seputarsemarang.com, diunduh pada 21 Januari 2021)

Kawasan ini berada di Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara, dengan luas Kawasan 40 hektar. Kawasan kota tua ini berada disisi utara kota di wilayah dataran rendah, yang acapkali juga terjadi rob/banjir karena struktur permukaan tanah yang relatif rendah. Kawasan ini berdekatan dengan pesisir laut utara atau Laut Jawa, berada dapat struktur tanah yang datar (tidak berbukit) sehingga memiliki hamparan datar yang luas.

Jumlah bangunan yang ada sebanyak 245 buah, terdiri dari 177 buah (72%) milik pribadi dan 68 buah (28%) milik perusahaan. Bangunan ini digunakan untuk rumah tinggal sebanyak 139 buah (56%), bangunan kosong 19 buah (0,7%) dan bangunan non hunian sebanyak 87 buah (35%). Secara status, 130 buah haknya di ketahui namun masih ada 115 buah yang status hak belum diketahui. Sampai dengan saat ini sudah 105 buah bangunan yang telah dikonservasi.



Gambar 2 Peta Versi Bappeda
Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2021.

Jika akan menelusuri Kota lama Semarang, kita bisa memulai dari titik nol km tepatnya dari Kantor Pos, menemui Gedung *Het Groot Huis*, kantor residen Semarang era kolonial sekarang sebagai kantor keuangan, yang biasa dikenal sebagai Gedung Papak. Lantas kita menyeberangi Jembatan kali Berok, di sungai inilah pada masa itu kapal – kapal pedagang berlabuh. Di sisi timur sungai, terbentang jalan utara ke selatan yakni jalan Mpu Tantular yang merupakan batas barat dari Kota lama. Jika kita jalan ke timur, maka jalan inilah salah satu jalan utamanya, yakni jalan Letjen Suprpto, kita akan menemui Gedung tua yang digunakan Bank Mandiri Mpu Tantular, Old City 3D Art, Semarang *Creative Galery* dan galeri UMKM. Lantas kita menemui Gereja Blenduk, Bangunan yang digunakan Jiwa Sraya dan Taman Srigunting. Jalan Letjen Suprpto ini merupakan bagian dari jalan Anyer Panarukan 1000 km. Kota Lama Semarang ini pada dasarnya mengadaptasi bangunan – bangunan Belanda sehingga dikenal sebagai kampung Eropa atau biasa disebut dengan *De Oude stad* (Kota Lama) *Eiropeshebuurt* (Kampung Eropa).

Kawasan kota Lama Semarang meliputi

Beberapa bangunan tua yang ada di Kawasan ini berupa bangunan perkantoran, gereja, klenteng, termasuk pusat pemerintahan, industry serta perdagangan. Fasilitas kota yang tersedia adalah Gedung teater Marabunta (*schouwburg*), lantas ada pengadilan Negeri (kantor *landraad*), took perhiasan bergensi (*N.V.Goud en Zilvermederij voorheen F.M. Ohlenroth & Co.*, kantor perusahaan yang mengelola perkebunan di Jawa Timur dan Jawa Tengah (terdapat 2 kantor), hotel Jansen, dan toko alat musik *Seelig & Son*. Terdapat pula kantor percetakan dan penerbitan besar, serta maskapai asuransi Jiwa Hindia Belanda, yang akhirnya menjadi Kantor Asuransi Jiwa Sraya.

Sejarah Revitalisasi Kawasan Kota Lama Semarang.

Tahun 2000-an

Penetapan kota lama sebagai salah satu cagar budaya di Kota Semarang yang dilindungi. Mulai terdapat penambahan elemen kota dan perbaikan fisik, seperti *fasade*, jalan pedestrian, ruang jalan dan *street furniture* (Sitompul & Roychansyah, 2018).

Identifikasi

Mengidentifikasi bangunan cagar budaya (*heritage*) dan status kepemilikannya. 2011: Menyusun grand desain kota lama Semarang. 2015: Desain teknis detail (*Detailed engineering design*) Kota lama.

Revitalisasi Tahap I (2017-2018)

Dengan dukungan dari Kementerian PUPR, mulai dikerjakan pada tahun 2017. Telah mencapai 80% dari 116 bangunan telah mengalami revitalisasi. Gedung – Gedung cagar budaya digunakan untuk perkantoran, restoran, café, kedai kopi dan tempat wisata (Gewati, 2019).

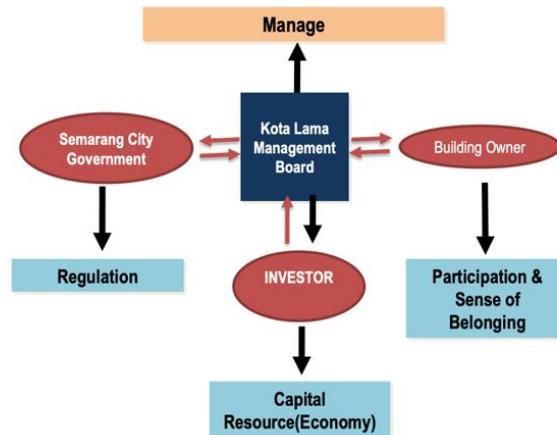
Revitalisasi Tahap II (2019-2020)

Pembangunan museum Bundaran Bubakan dan rumah pompa di Berok. Rumah pompa yang berfungsi sebagai pengendali banjir ini, sekaligus digunakan untuk melakukan fungsi daya Tarik wisata. Berikutnya penataan jalan, di jalan Sleko yang menghubungkan antara Kota Lama dengan Kawasan Melayu. Kawasan ini juga menghubungkan dengan Kawasan pecinan dan kampung Melayu. Berikutnya penataan jalan Suari. Untuk pembangunan tahap II ini, didukung oleh Kementerian PUPR sebesar Rp 60 miliar. (TribunJateng.com, 2020)

Tata Kelola Kota Lama Semarang.

Mengacu dari Konsep Bappeda Kota Semarang terdapat 3 bagian Lembaga yang terlibat secara garis besar:

- 1) Pemerintah Kota Semarang, yang memiliki peranan dalam Menyusun dan menyiapkan regulasi tentang pengelolaan Kota Tua. Pemerintah ini nantinya secara teknis akan dilakukan oleh Badan Pengelola Kawasan Kota Lama Semarang. Lembaga ini nantinya sebagai fungsi Kota Lama *Management Board*.
- 2) Pemilik bangunan. Partisipasi dan rasa memiliki para pemilik tanah dan bangunan ini tentunya memiliki peran yang besar.
- 3) Investor, merekalah yang mempunyai sumber daya ekonomi yang mestinya bersedia menginvestasikan aktivitas ekonominya di Kawasan Kota Lama Semarang.



(sumber: Bappeda Kota Semarang, <https://www.connective-cities.net>, 2021)

Landasan hukum.

- 1) Keputusan Walikota Semarang No. 646/50 1992 tentang Konservasi Bangunan – bangunan Kuno/Bersejarah di Wilayah Kodya Semarang.
- 2) Perda No. 2 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK).
- 3) Perda No. 8 Tahun 2003 tentang RTBL Kawasan Kota Lama Semarang.
- 4) Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Para Pemangku Kepentingan.

Pemerintah

Pemerintah daerah yang memiliki kewenangan terhadap Kawasan kota lama adalah Pemerintah Kota Semarang, di mana Walikota membentuk Badan, yakni Badan Pengelola Kawasan Kota Lama Semarang (BPK2L). Beberapa fungsi yang dijalankan adalah: pengawasan terhadap Gedung – Gedung, inventarisasi bangunan yang diabaikan dan mengajak secara persuasif para pemilik bangunan untuk memanfaatkan Kembali aset tersebut, layanan rekomendasi perijinan, penyediaan informasi dan data tentang Kawasan kota lama. Selain badan ini, maka SKPD yang yang dilibatkan pula adalah Dinas Kebudayaan & Pariwisata, Dinas Penataan Ruang Kota, dan Bappeda (Noor S, 2019).

Masyarakat

Berdasar penelitian Mangihut & Khadiyanto (2014), partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kota lama Semarang belum dilakukan secara optimal, hal ini disebabkan oleh tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat, tingkat penghasilan yang masih rendah dan pola kerja yang dilakukan. Penelitian ini memperoleh informasi bahwa para Kepala Keluarga rata – rata hanya lulusan SD, rata – rata mereka sebagai pekerja dengan tingkat pendapatan hanya sebatas UMR dan kepemilikan bangunan tempat tinggalnya juga tidak jelas, walaupun mereka telah tinggal berpuluh puluh tahun.

Organisasi Nirlaba. (1) OASE (*Oudestad Art and Culture Semarang*) merupakan salah satu organisasi yang memiliki peran dalam pengelolaan Kawasan kota lama Semarang. Organisasi ini juga melakukan pendampingan pada masyarakat yang tinggal di Kawasan Kota Lama Semarang. (2) **Asosiasi Masyarakat Bangun Oude Stad (AMBO)**

Dibentuk pada tahun 2012. Baru pada tahun 2017, organisasi ini memiliki aktivitas yang lebih permanen, dengan mengadakan beberapa festival di kota lama. (3) *Oen Semarang Foundation*, Bersama

dengan Asosiasi Masyarakat Mbangun *Oude Stad* melakukan beberapa kali festival, dimana event Festival Kota Lama Semarang telah dilakukan mulai 2012 – 2019.

Bahan Pembelajaran yang diperoleh:

- 1) Mengambil figur yang tepat untuk pengelola BPK2L beserta SDM yang ada di dalamnya.
- 2) Pendanaan yang tepat. Pemerintah Kota Semarang memiliki keterbatasan dalam pendanaan, sehingga dukungan dari Pemerintah Pusat sangat dibutuhkan. Dikombinasi dengan perencanaan yang baik, komunikasi kepada pemerintah pusat.
- 3) Infrastruktur yang baik sebagai kunci. Jalan yang baik, drainase akan mendorong aktivitas ekonomi di Kawasan ini.
- 4) Peran keterlibatan komunitas (*community*).

Potensi Kota Lama yang terdapat di Berbagai Kota di Indonesia.

Beberapa kota di Indonesia memiliki Kawasan kota lama yang menjadi Kawasan cagar budaya dan berpeluang untuk menjadi aset destinasi pariwisata. Kota - kota ini di antaranya adalah:

No	Kota	Uraian	Kondisi
1.	Jakarta		Sudah di revitalisasi
2.	Bandung	Kawasan Braga, Jl. Asia Afrika	Sudah di revitalisasi
3.	Cirebon	Kawasan Kota Tua Lemahwungkuk Kawasan Jamblang. Pecinan.	Belum.
4.	Surabaya	Jl. Kalimalang, Jl. Veteran & Jl Karet	Belum optimal
5.	Yogyakarta	Benteng Vredenburg, Kantor Pos Besar, Bank Indonesia, Gedung BNI, Gedung Agung, Gedung AMS (Algemene Middelbare School) Normalschool dll. Termasuk Kawasan Kota Gedhe	Sudah direvitalisasi. Terletak tersebar, bukan pada satu Kawasan.
6.	Medan	Masjid Raya Al-Mahsun, Istana Maimun, Kawasan Kesawan, wahrenhuis, Gedung London Sumatera (Lonsum), Gedung BI Medan, Kantor Pos Besar Medan, Tjong A Fie Mansion, Gedung Balaikota Lama Medan	Ada beberapa bangunan yang terjaga dengan baik. Ada beberapa yang kondisinya buruk.
7.	Palembang	Kawasan Sekanak Kampung Arab	
8.	Padang	Pengaruh Hindia Belanda	
9.	Singkawang		
10.	Mataram	Kawasan Ampenan	
11.	Salatiga	Jl. Diponegoro	
12.	Solo	Kampung Batik Laweyan	
13.	Kendari	Area sisi utara Jembatan Oprit	Proses pengembangan
14.	Makasar	Kec. Waju, Ujungpandang, & Mariso (www.koran.tempo.co.id)	Perlu pengembangan lebih lanjut
15.	Magelang	Kampung Tua Kwarasan, Museum Jendral Sudirman (www.kompas.com)	Belum dikembangkan
16.	Bogor	Kawasan Pecinan Suryakencana, Jalan utama Bogor	Perlu pengembangan
17.	Pontianak	Pelabuhan Seng Hie, Pasar Tengah, Masjid jami, SDN 14 Pontianak,	Perlu Pengembangan

No	Kota	Uraian	Kondisi
18	Barus, Tapanuli Tengah	Kebok Sajoek. (www.kumparan.com) Desa Labu Tua, Pesisir Barus	

Sumber: disarikan dari berbagai data, 2021

Sementara itu Kementerian PUPR dalam dokumen kota pusaka telah mengkompilasi 51 kota di berbagai Propinsi di Indonesia yang Bersama - sama berupaya melakukan pelestarian terhadap bangunan cagar budaya (www.sim.pu.go.id, 2021)

Kajian yang dilakukan Ismail (2016) Menemukan konsepsi bahwa mempertahankan bangunan cagar budaya akan berhasil jika hal ini memenuhi fungsi layanan bagi generasi muda, jika generasi muda tak membutuhkannya maka mereka akan merasa tidak membutuhkan untuk ikut serta menyelamatkan bangunan ini. Generasi mud aini pada umumnya pergi ke kota untuk berbelanja dan makan. Sehingga untuk menyediakan struktur bangunan tersebut, tentunya tidak perlu membangun yang baru, tetapi memanfaatkan bangunan – bangunan untuk tujuan yang sama. Sehingga dapat mempertahankan bentuk asli bangunan tersebut, tetapi mengubah aktivitas didalamnya.

Cara terbaik menjaga kelestarian bangunan menurut hasil kajian ini adalah dengan mengubah aktivitas pada bangunan tersebut tetapi tetap mempertahankan bentuk aslinya. Otoritas Pembangunan Daerah Iskandar (Johor Bahru) berupaya melakukan hal tersebut melalui gelar inisiatif warisan dan budaya cagar budaya, dokumentasi semua warisan dan aktivitas budaya, dan meningkatkan permintaan akan warisan dan pariwisata budaya. Sampai akhirnya bisa dipastikan cagar budaya yang ada di Kota Johor Baru menjadi salah satu bagian Situs Warisan Dunia Unesco.

Temuan Pratama (2017) berkaitan dengan keberadaan Kota Tua Jakarta dijelaskan bahwa identitas kota tua Jakarta terbentuk atas keberadaan Taman Fatahillah, Museum Sejarah Jakarta, dan bangunan tua di Kawasan Taman Fatahillah. Identitas ini dibentuk atas 3 atribut, yakni (1) keberadaan ruang publik yang bertemakan sejarah, (2) bangunan tua dan (3) tempat edukasi dengan konten kesejarahan. Brand image yang dihasilkan adalah *The Most Memorable Place of Batavia*.

Sementara itu Kepala Unit Pengelola Kawasan (UPK) Kota Tua Jakarta, Novianto Setio, mengembangkan pariwisata Kota Tua ini melalui Event di Kota Tua, seperti festival tempo dulu, festival kuliner jadul, pembinaan karakter komunitas. Pengembangan karakter Kawasan juga dilakukan seperti pengembangan Kawasan Glodok sebagai kampung etnis China, Pekojan kampung Arab, dan Kawasan pesisir Sunda Kelapa. Selain itu, pengetahuan pemilik / pengelola terhadap cagar budaya memang semestinya dikembangkan, pemahaman atas pentingnya konservasi mesti dibangun (Santoso, 2019). Salah satu PR Kota Tua Jakarta adalah belum tersedianya makanan atau oleh – oleh khas yang menjadi daya Tarik wisatawan.

Sementara Amiluruh Soeroso, Pengamat Kebijakan Publik UGM (Santoso, 2019) menyatakan bahwa keunikan yang ditonjolkan Yogya adalah pada nilai sejarah, sosial budaya, dan arsitektural yang dimiliki oleh setiap Kawasan. Ketika di-komparasi-kan dengan keberadaan Kota Tua George Town Penang, keberadaan kota tua tersebut dipersepsikan mampu memberi dampak positif pada bisnis lokal, konservasi dan restorasi bangunan cagar budaya, dan mampu mendorong kesejahteraan umum bagi penduduk George Town. Banyak responden setuju bahwa restorasi dan konservasi bangunan cagar budaya merupakan warisan yang mesti dijaga. Namun separuh responden memandang aktivitas wisata bisa mengancam nilai - nilai cagar budaya. Hal yang sama terjadi di berbagai tempat bahwa para pemangku kepentingan keterlibatannya masih rendah dalam perencanaan dan pengembangan (Omar, 2013).

Sementara itu riset yang dilakukan Khodeir, Aly, & Tarek (2016), aplikasi keberlanjutan retrofit dari bangunan cagar budaya di Mesir dengan mengintegrasikan alat HBIM (heritage Building Informasi Modeling / Permodelan Informasi Bangunan Cagar Budaya) ditemukan bahwa Permodelan HBIM sebagai alat komputasi ini dapat dipergunakan sebagai kumpulan data informasi yang komprehensif, khususnya terkait dengan pemugaran bangunan. Temuan riset ini adalah memberikan kerangka kerja yang berguna untuk retrofit bangunan warisan yang berkelanjutan pada konteks Mesir. Di mana kerangka kerjanya meliputi: inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian. Model HBIM ini tentunya menarik sebagai salah satu referensi.

Prasyarat pengembangan destinasi

Firmansyah, Dirjen Pengembangan Destinasi pariwisata (dalam Mutya, 2013) menyatakan terdapat 4 unsur menjadi suatu destinasi layak sebagai destinasi wisata, yakni:

- (1) Daya Tarik, di mana daya Tarik ini bisa dibuat atau yang telah ada di destinasi tersebut. Secara umum Kawasan cagar budaya memiliki daya Tarik yang telah ada, yakni keunikan arsitektural bangunan.

Namun pada kondisi yang kemungkinan buruk, mulai rapuh, kotor dan tak layak kunjung. Tak layak kunjung karena berbahaya, atau berdebu dan tak aman. Sehingga perlu adanya renovasi / revitalisasi tanpa merusak struktur dan arsitektur aslinya.

- (2) Aksesibilitas. Destinasi mesti memiliki transportasi dan sarana jalan yang baik. Pada umumnya Kawasan kota tua, memiliki akses jalan yang baik menuju ke Kawasan tersebut. Namun sarana jalan ini justru buruk di destinasinya, umumnya kualitas yang buruk, gorong – gorong yang jelek atau tidak ada, bahkan pedestriannya pun juga demikian. Sehingga penataan Kembali akses ke dan di Kawasan kota tua mesti dilakukan.
- (3) Infrastruktur fasilitas dan penunjang kebutuhan wisatawan. Bisa dilakukan oleh hotel, restoran, ASITA, PHRI ataupun pihak lainnya.

Sedangkan Rai Utama, mengidentifikasi aspek – aspek:

- (1) Aspek daya Tarik destinasi. Bisa alam (memungkinkan bangunan), masyarakat maupun budaya.
- (2) Transportasi / aksesibilitas.
- (3) Akses fasilitas utama dan pendukung.
- (4) Aspek kelembagaan.

(Utama & Rai, 2013) melanjutkan bahwa untuk mencapai 4 hal di atas juga mesti diperhatikan,

- (1) Penataan sentra bisnis masyarakat local. Seperti pasar malam tradisional, makanan tradisional, pagelaran seni, Spa dan sejenisnya yang melayani terapi dan relaksasi.
- (2) Penataan penginapan, hotel dan sejenisnya, yang memungkinkan diarahkan ke sub urban agar mengurangi ke-crowded-an kota.
- (3) Penataan daerah ataraksi wisata baik yang alami ataupun buatan diarahkan pada Kawasan rural / countryside.

Berbagai modal kota atau ikon kota yang memungkinkan dijadikan destinasi wisata yang menarik, seperti pusat peribadatan, alun alun, kantor balai kota, monument kota, museum, jalan – jalan tertentu yang menjadi ikon atau area area tertentu yang atas inovasi dan kreatifitas pengelola kota bisa menjadi destinasi yang layak dinikmati (Afandi, Indrawan, & Ratnawardhani, 2019).

Tahapan Yang Disiapkan oleh Kota

Beberapa pentahapan yang mesti disiapkan kota dalam pengembangan aset kota tuanya sebagai destinasi wisata adalah:

1. Penjajakan awal. Mengidentifikasi dan mengeksplorasi apakah kota memiliki potensi aset wisata kota yang layak dan potensial untuk dikembangkan.
2. Identifikasi sumber daya yang tersedia. Terdiri: (a) sumber daya cagar budaya benda dan tak benda, tak benda ini idealnya tidak diabaikan; (b) Daftar cagar budaya; (c) Rencana tata ruang tersedia dan posisi cagar budaya; (d) Peraturan sampai dengan peraturan di tingkat daerah berkaitan dengan cagar budaya; (e) kebutuhan sumber daya lainnya yang berkaitan.
3. Inisiasi dengan pemangku kepentingan. Aktivitas ini cukup berat jika hanya bertumpu pada pemerintah (government centered). Kolaborasi dengan para pemangku menjadi kekuatan yang Tangguh. Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Masyarakat local, komunitas, swasta / Lembaga bisnis, bahkan Lembaga dunia (UNESCO, dan lainnya) semuanya memiliki peran masing – masing dalam upaya pengembangan.
4. Mengembangkan visi dan misi yang jelas dalam upaya pengembangan kota tua, bukan hanya sekedar latak mengikuti kota lainnya. Setiap kota memiliki potensi dan kearifan lokal, yang layak untuk dikembangkan. Visi ini bukan hanya sekedar dokumen tertulis, lebih dari itu menjadi visi dan spirit Bersama bagi para pemangku kepentingan.
5. Benchmarking pada kota lain, yang dinilai memiliki kemiripan identitas budaya / latar belakang, kota yang memiliki aset cagar budaya tersebut dan mampu mengelolanya dengan baik.
6. Penetapan Gedung ataupun Kawasan cagar budaya.
7. Menyusun dokumen perencanaan sekaligus rencana aksi, baik aktivitas tahunan ataupun multi tahunan. Rencana ini sebenarnya bukan hanya aktivitas revitalisasi asset benda saja (bangunan) tetapi seharusnya juga asset tak benda.
8. Penjajakan mekanisme dan sistem pendanaan yang digunakan, sehingga tidak hanya membebankan pada APBD, lebih ideal lagi ternyata meminimkan pendanaan melalui sumber APBD.
9. Penyiapan dan pembentukan badan otoritas jika dibutuhkan. Perlu disesuaikan dengan tingkat kebutuhan yang diperlukan.
10. Revitalisasi. Revitalisasi ini bisa dilakukan dalam beberapa tahap / beberapa tahun, dengan pentahapan yang runtut.

11. Pengembangan tata Kelola dan pemberdayaan masyarakat Kawasan kota tua, sebagai aset tak benda.
12. Upaya perolehan benefit atas keberadaan aset cagar budaya tersebut, yang salah satu fungsi utamanya untuk sumber pendanaan operasional tata Kelola Kawasan cagar budaya, tidak menampik bahwa kesempatan untuk mengembangkan sebagai Kawasan ekonomi juga bisa dilakukan, karena salah satu urat nadi juga bersumber dari aktivitas ini, tanpa mengabaikan nilai – nilai keberlanjutan dan kelestarian aset benda dan tak benda.

Berikutnya untuk pengembangan dan pengelolaan warisan budaya tak benda (intangible heritage) yang dapat berupa kuliner (masakan, minuman, oleh – oleh / makanan khas), seni pertunjukan, kerajinan tangan, dan ritual (upacara adat). Adalah:

- 1) Inisiasi dengan masyarakat lokal / setempat.
- 2) Identifikasi intangible asset yang masih ada dan menelusur yang berkaitan dengan hal tersebut.
- 3) Perlu adanya pendampingan dan pemberdayaan oleh NGO terlebih lagi bila masyarakat nya memiliki tingkat Pendidikan yang belum terlalu tinggi, meningkatkan kesadaran mereka menariknya menjaga nilai – nilai lokal, aset warisan budaya tak benda ini dan nilai sosial ekonominya.
- 4) Dorongan dan dukungan dari Perguruan Tinggi, sekolah kejuruan ataupun Lembaga terkait lainnya guna peningkatan kualitas nilai warisan budaya tak benda ini. Misal bagaimana makanan resep masa lalu, memenuhi kaidah higienitas, memenuhi syarat gizi dan standar – standar lainnya. Dimungkinkan pula sampai dengan sertifikasi halal, bila dibutuhkan.
- 5) Upaya memulai adanya event, festival dan bentuk promosi lainnya.
- 6) Mensinergikan nilai menjaga warisan budaya dengan konsep ekonomi agar memiliki nilai tambah kesejahteraan bagi masyarakat, walaupun ini bukan satu – satunya tujuan.
- 7) *Membranding* warisan budaya tak benda sebagai IKON KOTA.

Langkah – Langkah tersebut diatas merupakan raw model awal kebijakan public yang bisa diadaptasi kota dalam pengelolaan kotanya secara komprehensif, tentunya tetap mengacu pada Undang – Undang yang berlaku.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengidentifikasi pentahapan yang mesti dilakukan pemerintah, yang memungkinkan untuk dimodifikasi sedemikian rupa menyesuaikan dengan kondisi empiris lapang. Karena karakteristik setiap kota memiliki keunikan, dan kearifan lokal yang berbeda. Sehingga perlu penyesuaian dan agar presisi. Termasuk pula dalam pentahapan pengembangan warisan budaya tak benda (*intangible*). Pentahapan yang direkomendasikan ini akan lebih menarik bila diuji melalui serangkaian FGD para ahli maupun praktisi dibidang cagar budaya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih pada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, semoga kajian ini bisa ditindak lanjuti dengan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A., Indrawan, A. K., & Ratnawardhani, E. A. (2019). Analisis Model Penilaian Kota Ideal Destinasi Wisata. *Barista: Jurnal Kajian Bahasa dan Pariwisata*, 6(1), 1-7.
- Dixit, S. K. (2020). *Tourism in Asian Cities*. Routledge.
- Gewati, M. (2019, Agustus 26). *Revitalisasi Tahap 1 Kelar, Wajah Baru Kota Lama Semarang Mulai Nampak*. Retrieved from <https://regional.kompas.com/>
- Indriani, A. (2017, April). Retrieved Maret 29, 2021, from Pelestarian Cagar Budaya Terbentuk Ketidaksiapan Aturan Pelaksana: www.mediaindonesia.com
- Ismail, W. H. (2016). Young visitors in the city: Their perceptions of heritage buildings. *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 234, 470-477.
- Khodeir, L. M., Aly, D., & Tarek, S. (2016). Integrating HBIM (Heritage Building Information Modeling) tools in the application of sustainable retrofitting of heritage buildings in Egypt. *Procedia Environmental Sciences* 34 , 258-270.
- Mangihut, T. E., & Khadiyanto, P. (2014). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Kota Lama Semarang. *Jurnal Ruang*, 2(2), 101-110.
- Mutya. (2013). *5 Syarat Suatu Tempat Bisa Jadi Destinasi Wisata di Indonesia*. lifestyle.okezone.com. Retrieved from www.lifestyle.okezone.com

- Noor S, F. A. (2019). *Peran Stakeholder Dalam Pengelolaan Kawasan Kota Lama Semarang, Jawa Tengah*. Repository STP Bandung.
- Nuriata. (2014). *Paket Wisata, Penyusunan Produk dan Penghitungan Harga*. Bandung: Alfabeta.
- Omar, S. I. (2013). George Town, Penang as a world heritage site: The stakeholders' perceptions. *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 91, 88-96.
- Pratama, O. (2017). Evaluasi Kesesuaian Branding "Manhattan of Asia" dan Identitas Kota Tua Jakarta. *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 8, pp. 143-150.
- Santoso, Y. I. (2019). *Mengembangkan potensi pariwisata di Kota Tua*. <https://lifestyle.kontan.co.id/>.
- Seakhoa-King, A. A. (2020). *Tourism Destination Quality: Attributes and Dimensions*. Emerald Group Publishing.
- Sitompul, C. M., & Roychansyah, M. S. (2018). Identifikasi Perkembangan Morfologi Kotalama Semarang. *Temu Ilmiah Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia (IPLBI)*, (pp. 7-13). Semarang.
- TribunJateng.com. (2020, Juli 20). Retrieved from Revitalisasi Kota Lama Semarang Tahap Dua Ditargetkan Rampung Akhir Desember 2020: <https://jateng.tribunnews.com/>
- Utama, I. G., & Rai, G. B. (2013). Pengembangan wisata kota sebagai pariwisata masa depan indonesia. *Seminar Nasional UNHI*. Denpasar.

Keseimbangan Model Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Kabupaten Bonebolango

Mattoasi^{1)*} Candra Cuga²⁾ Muhammad Sarlin³⁾ Sudirman⁴⁾

^{1,4)}Fakultas Ilmu Ekonomi, ^{2,3)}Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Gorontalo

*E-mail corresponding author: mattoasi@ung.ac.id

Received: 24-02-2021;
Accepted: 08-04-2021;
Available online: 30-04-2021

Ecoplan Vol. 4 No. 1, April 2021,
hlm 21-31.

ISSN p: 2620-6102
e: 2615-5575

Keywords: *Balance;*
management; *Coastal*
Community Welfare.

Abstract - Village funds distributed to every village, especially in Bone Bolango District, are for development purposes and community empowerment. This study aims to determine the balance model of village fund management through Village-Owned Enterprises (Kemendes PDTT, 2019). The research method used is a mixed-method (mix-method) by recording quantitative data and qualitative data through in-depth interviews for any information given to village heads and village officials in Bone Bolango District, Gorontalo Province. The results showed that community involvement in creating balance is fundamental to realizing a prosperous society. Although, on the other hand, the problem of managing village funds is that they are not maximally used to incubate poverty, have not been on target, or have not matched the potential of the village; the focus of development is still oriented towards infrastructure, which is still found in the field.

Abstrak - Dana desa yang disalurkan kepada setiap desa khususnya di Kabupaten Bone Bolango selain untuk pembangunan juga diperuntukkan untuk pemberdayaan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model keseimbangan pengelolaan dana desa melalui Badan Usaha Milik Desa (Kemendes PDTT, 2019). Metode penelitian yang digunakan metode campuran (Mix-Methode) dengan menyatukan data kuantitatif dan data kualitatif melalui wawancara secara mendalam bagi setiap informasi kepada kepala desa dan perangkat desa yang ada di Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penglibatan masyarakat dalam menciptakan keseimbangan merupakan hal fundamental untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Disisi lain, permasalahan pengelolaan dana desa yaitu penggunaan yang belum maksimal untuk menentaskan kemiskinan, belum tepat sasaran atau belum sesuai dengan potensi desa, fokus pembangunan masih berorientasi pada infrastruktur masih ditemukan di lapangan.

Kata Kunci: Keseimbangan; Pengelolaan; Kesejahteraan Masyarakat Pesisir

PENDAHULUAN

Desa sebagai wilayah terkecil secara administrasi dari negara dan berada dibawah kecamatan, ditinjau dari jumlah penduduk juga paling rendah dengan penduduk yang bersifat homogen (UUD No. 6 Tahun 2014, Kartohadikusumo; 2004). Meskipun wilayahnya paling kecil, desa diberikan wewenang untuk mengelola sumber daya secara mandiri melalui pendanaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembangunan Desa, sesuai yang diamanatkan dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan melalui: (1) penyediaan kebutuhan dasar; (2) pembangunan sarana dan prasarana; (3) pengembangan potensi ekonomi lokal; dan (4) pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) Lingkungan secara keberlanjutan. Untuk mencapai tujuan pembangunan desa dilakukan melalui pendekatan “desa membangun” dan “membangun desa”(Permendes No. 2 tahun 2016).

Untuk mewujudkan amanat undang-undang tersebut maka perlu pengelolaan yang tepat dan juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dengan mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang penggunaan dana desa dengan perbandingan 60% untuk pemberdayaan dan 40% untuk pembangunan fisik. Fenomena lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa mengalami perubahan dimensi sasaran yakni pembangunan fisik lebih dominan dibandingkan dengan pemberdayaan masyarakat (Julianto, 2017). Penggunaan dana desa menurut Radio Republik Indonesia (RRI)(2019) menunjukkan bahwa penggunaan dana desa masih terpusat pada pembangunan infrastruktur yang masif sedangkan untuk usaha ekonomi hanya 8%. Hal ini juga didukung berbagai fakta riset (Inten & Liliana , 2017; Sulis, 2017) mengungkapkan bahwa penggunaan dana desa lebih cenderung kepada pembangunan fisik, selain itu (Boedijono, Wicaksono, Puspita, Bidhari, Kusumaningrum, Asmandani, 2018). Mendapatkan bahwa 80,51% digunakan untuk pembangunan. Dari hasil ini kita mengetahui bahwa pemberdayaan masyarakat belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah desa termasuk desa yang ada di Kabupaten Bonebolango propinsi Gorontalo.

Data Badan Statistik menempatkan Gorontalo dalam Indeks Pembangunan Manusia Dalam perkembangannya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Gorontalo terus meningkat setiap tahunnya dan pada tahun 2017 mencapai 67,01. Namun demikian, level IPM Gorontalo tersebut termasuk ke dalam kategori menengah ke bawah atau lebih rendah dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan-kebijakan yang mampu meningkatkan kualitas pengembangan manusia seperti memperbaiki kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan, sehingga kesejahteraan akan merata dan jurang kesenjangan antara kaya dan miskin dapat dipersempit, (BPS Gorontalo, 2019), Sebagai Provinsi yang memiliki 657 Desa yang tersebar di enam kabupaten dan kota dengan mayoritas status desanya tertinggal terutama pada desa-desa pesisir (Ditjen PPMD; 2018). Kondisi ini seharusnya menjadi perhatian agar semua desa terutama yang ada di daerah pesisir dapat meningkatkan statusnya sebagai standar yang digunakan untuk mengukur indeks “desa membangun” (UUD No. 6 Tahun 2014)

Dari berbagai persoalan tersebut maka perlu dilakukan pengelolaan sumber daya atau potensi desa yang seimbang yang bersifat partisipatif dan kolaboratif antara pemerintah dengan masyarakat sebagai sasaran untuk peningkatan kesejahteraan di wilayah pesisir Provinsi Gorontalo. Oleh karena itu, dibutuhkan analisis terhadap faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat agar berkelanjutan (Tumbel, 2017). Untuk itu, penelitian ini hendak menelusuri berbagai masalah pengelolaan dana desa dalam upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah pesisir Kabupaten Bonebolango.

Kesejahteraan masyarakat selama ini telah menjadi perhatian pemerintah melalui program “Desa Membangun” sebagai jargon membangun dari pesisir wilayah Indonesia, akan tetapi untuk menunjang hal tersebut diperlukan pengelolaan sumber daya yang memadai dan memiliki kesesuaian dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat. Untuk itu pelibatan masyarakat untuk menciptakan keseimbangan menjadi hal fundamental untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Berbagai masalah telah terjadi dengan pengelolaan dana desa dari penggunaan yang belum optimal untuk menentaskan kemiskinan, belum tepat sasaran atau belum sesuai dengan potensi desa, fokus pembangunan masih terfokus pada infrastruktur sehingga masalah-masalah ini belum menciptakan keseimbangan pengelolaan dana desa. Karenanya dibutuhkan kajian mendalam tentang masalah yang terjadi dalam pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya wilayah pesisir Kabupaten Bonebolango.

TINJAUAN PUSTAKA

Keseimbangan penggunaan dana desa menjadi penting, karena selain aspek pembangunan fisik juga dituntut untuk memberdayakan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Kemendes PDTT, 2019) sebagai aktivitas yang lebih dominan dibandingkan dengan pembangunan fisik. Urgensi penggunaan dana desa ini juga sejalan dengan beberapa kajian antaranya Jensen dan Meckling (1976); Tricker (1984) dan Williamson (1985) serta Donaldson (1985) bahwa struktur tata kelola pemerintahan yang sesuai dapat memberi dampak terhadap pengelolaan sumber daya organisasi untuk masyarakat sebagai prinsipal yang telah mengamanahkan kepada pemerintah (Agen). Sejalan dengan kehendak pemerintah untuk mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat, maka terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan khususnya dalam pengelolaan dana desa. Selain aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban seperti yang dihendaki dalam (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014), dana desa pengelolaannya harus memperhatikan aspek keterbukaan dan pertanggungjawaban yang sesuai; partisipasi masyarakat dan tertib anggaran selalu berdasarkan peraturan yang berlaku.

Beberapa dampak nyata di masyarakat menggambarkan sebuah konsekuensi dari pengelolaan dan penggunaan Dana Desa, karena sesungguhnya "Implementasi suatu kebijakan dalam pengertian yang luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Lester & Stewart, 2000).

Kebijakan Dana Desa ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dimaksudkan untuk mewujudkan Desa kuat, maju, mandiri, dan demokratis, sehingga untuk itu peran dan potensi desa harus diberdayakan (Jamaluddin, Sumaryana, Rusli, & Buchari, 2018). Pemberdayaan masyarakat di desa harus dapat dikelola dan diorganisir dengan baik. Sejalan dengan kehendak pemerintah untuk mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat, maka terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan khususnya dalam pengelolaan dana desa. Selain aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban seperti yang dihendaki dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, pengelolaan dana desa harus memperhatikan aspek keterbukaan dan pertanggungjawaban yang sesuai, partisipasi masyarakat dan tertib anggaran selalu berdasarkan peraturan yang berlaku.

Ada beberapa kajian yang relevan terhadap implementasi Permendagri No. 113 Tahun 2014 di dalam pengelolaan dana desa. Intan dan Liliana (2015) menemukan bahwa pengelolaan dana desa belum maksimal sesuai dengan harapan karena sumber daya manusia di desa masih terbatas. Tidak berbeda dengan hasil penelitian lain seperti Blane (2015) menemukan bahwa pengelolaan dana pemerintah pada setiap level akan bermasalah jika tidak terdapat pengembangan sistem yang digunakan termasuk di dalam pemerintahan desa. Sistem yang dimaksudkan disini mulai tahap perencanaan, proses hingga tahap evaluasi program Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian Lasmi & Verni (2020) bahwa setiap dana desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan dana desa yang lebih baik akan berujung kepada pelaporan, pertanggungjawaban dan interpretasi terhadap laporan yang dihasilkan. Hal ini sejalan dengan beberapa hasil penelitian yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan yang baik diawali dari perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban dan interpretasi, sehingga program yang telah dirancang berdasarkan program telah sesuai dan dilaksanakan berdasarkan skala prioritas di dalam memenuhi kebutuhan masyarakat (I Wayan, I Nyoman & Iyus, 2016; Justita, 2016; Abu, 2015); Nurul & Iin, 2017; Astuti & Yulianto, 2016; Sulis, 2017). Demikian halnya yang dikemukakan oleh Abidin (2015) bahwa kelembagaan setiap desa dapat mendukung terlaksananya pengelolaan dana desa yang maksimal. Beberapa syarat menurut Abidin (2015) pengelolaan dana desa diharapkan harus terpenuhi yaitu akuntabilitas, transparansi serta partisipasi masyarakat sangat diperlukan serta peningkatan sumber daya manusia pada masing-masing desa serta koordinasi dengan pemerintah kecamatan agar pengelolaan dana desa sesuai dengan peruntukannya (Abidin, 2015).

Sejalan beberapa uraian berkaitan pengelolaan dana desa, juga telah dikemukakan oleh Azis (2016) yang menyatakan bahwa penggunaan dana desa belum efektif karena kapasitas dan kapabilitas pemerintah dan pegawainya masih rendah serta penglibatan masyarakat sangat rendah. Hasil penelitian Thomas (2013) dan Yuyun (2015) menunjukkan bahwa terdapat berbagai hal yang menyebabkan pengelolaan dana desa belum optimal sebagaimana amanah Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Hal ini disebabkan oleh pembangunan fisik menjadi perhatian utama, selain sumber daya manusia dan koordinasi kurang maksimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian *mix methods*, yaitu penelitian dengan menggunakan dua pendekatan penelitian yakni kualitatif dan kuantitatif. Penelitian campuran merupakan penelitian yang mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif, (Creswell, 2010; Sugiyono, 2011). Untuk pendekatan kualitatif dikerjakan dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan analisis memori kolektif (Berg, 2007; Biernacki, 2005; Zerubavel, 2003; Nash, 2001). Tujuan utama yang hendak dihasilkan adalah rekonstruksi sejumlah peristiwa, dokumen, yang terjadi dimasyarakat selama penggunaan dana desa dalam mencapai kesejahteraan. Selain itu juga untuk melihat relasi antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam bersama-sama dalam melihat potensi desa, merumuskan kegiatan, kebijakan serta dampak kebijakan pemerintah pada masyarakat. Pendekatan kualitatif di gunakan peneliti untuk menemukan tema-tema konflik, stratifikasi sosial dan interes masyarakat dan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa dan kesejahteraan masyarakat pesisir Kabupaten Bonebolango.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemanfaatan dana desa mendapat perhatian bagi peneliti untukmendapatkan gambaran tentang pemanfatan dana desa yang selama ini telahdilakukan oleh pemerintah desa, dari hasil paparan data tentang temuan penelitimaka temuan tersebut akan dibahas secara empris dengan melihat dari berbagai perspektif pengetahuan. Berikut ini pembahasan dari hasil temuan peneliti.

Pengalaman Kepala Desa dan Kemampuan Membaca Potensi sebagai Penunjang dalam Pengelolaan Dana Desa

Kemampuan dan pengalaman kepala desa menjadi faktor yang memberikan dampak baik terhadap pengelolaan dana desa. Dapat disimpulkan bahwa semua kepala desa yang menjadi subjek dari penelitian ini merupakan orang yang telah memiliki pengalaman dalam memimpin setiap organisasi. Selain pengalaman yang dimiliki, mayoritas kepala desa memiliki gelar S1 dan S2 sehingga menjadi daya tarik masyarakat, karena pengetahuan dan pengalamannya diharapkan mampu mengelola sumber-sumber ekonomi yang tersedia untuk kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Kondisi ini sesuai dengan pendapat Rofi bahwa pengalaman kerja seseorang akan banyak berpengaruh terhadap keahlian dan keterampilan yang dimilikinya (Nurrofi, 2012).

“Pengalaman juga itu penting untuk menopang menjadi pemimpin pak kebetulan saya punya pengalaman sejak di Manado sebagai penggerak masyarakat di kompleks saya untuk gotongroyong bekerja sama memeperbaiki ekonomi di sana, saya di sana kasih kursus orang-orang terutama anak muda untuk menjahit daripada nganggur dan berhasil jadi saya tahu bagaimana melibatkan masyarakat pak, di Desa ini saya juga sudah paham betul kondisi Desa pak karena saya sudah lama menjadi Guru di sini jadi saya tahu betul kondisi masyarakat di Desa ini dan apa yang dibutuhkan saat ini”. (Ayah Botu Barani; W/03/20-04-2020). “...Ayahanda ini sudah lama disini pak, dia ini sebelum jadi ayahanda di sini dulunya itu guru SD disini terus dia pensiun beberapa tahun lalu, baru mencalonkan jadi ayah di sini jadi so lama di sini sudah tahu tentang desa ini, memang ayah ini belum lama dilantik pak jadi ayah. Kalau lihat ayah ini ya bagus pak selalu bekerja membantu masyarakat tidak ada perbedaan semua 14 orang dapat bantuan, banyak kegiatan masyarakat juga, jadi biar masih baru tapi ayah ini sudah tahu desa ini makanya masyarakat banyak yang pilih dia ini. (NA; W/07/20-04-2020)ayah ini sudah lama di sini pak, dari guru di sini, terus jadi pengawas jadi kepala dinas, baru S2 lagi, makanya masyarakat pilih dia jadi ayahanda d isini, siapa yang tidak pilih dia pak S2 pasti pintar pak, sudah tahu juga desa ini karena sudah lama dari tahun 90 an pak, pensiunan kepala dinas lagi, makanya masyarakat senang pilih karena pendidikannya pak. (NS;09/10-10-2020).

Berkaitan dengan tingkat pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh seseorang termasuk kepala desa yang diharapkan dapat mengelola sumber daya desa, maka hal ini juga seirama dengan

pemikiran Spencer and Spencer dalam Sudarmanto (2009) kompetensi merupakan karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan atau kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Pemikiran Spencer and Spencer (2008) yang di dukung dari hasil penelitian ini juga telah dikuatkan oleh Dessler (2000); Sudarmanto (2009); Stoner & Wankel (1996) bahwa selain pendidikan, pelatihan merupakan salah satu bagian dari langkah-langkah proses manajemen sumberdaya manusia dalam organisasi.

Kesadaran Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Berbagai Potensi Desa

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kesadaran masyarakat dan partisipasi dalam pengelolaan dana desa, menunjukkan bahwa di ke empat lokasi penelitian (Desa Molotabu; Desa Botutonuo; Desa Biluango dan Desa Botuberani) bahwa kesadaran dan partisipasi masyarakat di dalam meningkatkan keseimbangan pengelolaan dana desa belum terwujud secara maksimal yang menyebabkan masih belum terjadinya perubahan pada diri masyarakat. Namun demikian kesadaran dan partisipasi masyarakat tidak memberi dampak terhadap keseimbangan pengelolaan dana desa karena setiap bantuan yang telah diberikan habis begitu saja tanpa tindak lanjut dari masyarakat itu sendiri dalam mengembangkan usaha. Kondisi ini berbeda dengan pendapat Gaventa & Valderma (2001) menegaskan bahwa “partisipasi masyarakat telah mengalihkan konsep partisipasi menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan warga masyarakat.

Masalah utama sebenarnya yang kami hadapai pak kesadaran masyarakat yang sangat kurang kalau dikasih bantuan mereka tidak berpikir bagaimana keberlanjutan bantuan tersebut kadang dikasih bantuan ya sudah habis itu bantuan pak, mereka berpikir nanti dapat lagi bantuan, mereka tidak berpikir setelah dikasih bantuan itu harapannya dapat membantu untuk memperbaiki ekonomi mereka misalnya dari pra sejahtera ke sejahtera kalau mereka dikasih tahu mereka cuek saja pak ini masalah yang saya hadapi di lapangan, dan mereka selalu berharap dapat bantuan lagi ini rumah-rumah bagus pak kalau lihat tapi ini ekonomi susah semua pak makanya saya heran bangun rumah bagus-bagus cuma ekonominya susah makannya ubi heran saya, jadi merubah pemikiran masyarakat dulu untuk diberikan kesadaran untuk keberlanjutan ekonomi pak. (Ayah Botu Berani;W/03/20-04-2020);yang susah itu di sini masyarakat susah diajak kerjasama makanya selalu mis komunikasi dengan masyarakat pak, sehingga sering kali ketidakmampuan masyarakat dalam mengelola keuangan UMKM, masyarakat itu kurang sadar dengan kondisi yang ada, pernah ada bantuan di sini tentang usaha kerajinan batu alam tapi ya Cuma habis dimodal pak, (Ayah Desa Botutonuo;W/04/01-06-2020)

Konsep Gaventa & Valderma (2001) yang ditemukan di dalam lokasi penelitian mendapati bahwa jika masyarakat memiliki kepedulian terhadap program pemerintah di desa maka hal tersebut akan memberikan keberhasilan, yang terbukti melalui peternakan sapi masyarakat di Desa Molotabu yang kandangnya dibuat bersama oleh kelompok telah berhasil digulirkan kepada masyarakat yang memerlukan sehingga memberi dampak kepada mereka. Hasil penelitian ini sesuai dengan konsep Durkheim (1957) bahwa masyarakat agraris bersifat homogen, para anggotanya melakukan kegiatan yang relatif sama sehingga *division of labor*-nya menjadi sangat sederhana. Di samping itu, masyarakat tersebut memiliki nilai-nilai, ide, aspirasi atau tujuan hidup yang juga relatif sama. Kesederhanaan cara pikir masyarakat agraris ini tercermin pada tumbuh kembangnya suatu bentuk kesadaran kolektif atau aktivitas kebersamaan yang dimiliki menjadi kuat (Septiarti, 1994). Dengan demikian, betapa pentingnya komunikasi yang kolaboratif dilakukan.

Asistensi Berkala/Pelatihan dan Pengawasan Bagi Kelompok Masyarakat sebagai Sasaran dalam Pengelolaan Dana Desa

Berkaitan dengan keseimbangan pengelolaan dana desa khususnya di desa pesisir Kecamatan Kabila Bone, dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 3 hal penting di dalam memaksimalkan penggunaan dana desa baik proporsi penggunaan maupun efektivitas penggunaannya yaitu asistensi, pelatihan dan pengawasan. Hasil penelitian ini juga sejalan kehendak pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang efektivitas pengelolaan dana desa.

Kami di sini juga perlu dana untuk pelatihan pak bos anggaran itu harus ada cuma sekarang belum ada jadi saya mau masyarakat yang diberikan bantuan itu diberikan bantuan pelatihan juga jangan dilepas begitu saja ini pengalaman saya di Manado dan berhasil pak Alhamdulillah, dan terus didampingi pak masyarakat itu jangan dipelas sampai betul-betul mahir dan juga mau untuk melakukannya sendiri bila perlu mereka sampai mahir mendesain kebetulan saya ini akan memberikan bantuan dan juga sudah ada bantuan mesin jahit cuma belum bisa dipake dengan baik belum ahli juga tidak tepat sasaran pak, nelayan dikasih mesin jait untuk apa akhirnya cuma tataru saja itu sebenarnya itu untuk apa tapi ya nanti kita akan berikan 19 pelatihan mereka pak terutama di sini ini akan mudah banyak yang nganggur nanti itu yang kita kasih mesin jahit dan juga pelatihan sampai mereka mahir desain dan menghasilkan pak biar ini anak muda jangan cuma minum-minum saja dan kesana kemari tidak jelas. (Ayah Botu Berani; W/03/20-04-2020). Yang dibutuhkan di desa sebenarnya pak orang yang ahli misalnya di sini kan banyak kemiri Cuma untuk mengolanya ini masyarakat di sini belum bisa jadi Cuma berkebun lalu petik jual Cuma begitu saja sama juga madu pak ini Cuma diambil di hutan baru jual begitu saja tanpa pengelohan, pengemasan yang baik, saya sebagai kepala desa maunya itu ada ahli atau pendamping untuk mengelola hasil kebun atau madu dengan benar sampai kepada penjual kalau itu ada pak pasti bagus dan masyarakat akan terbantu, karena yang susah ini pemasaran dan pengelolaan pak jadi masyarakat ya jual begitu saja. (Ayah Biluango; W/02/20-04-2020)

Aktivitas asistensi, pelatihan dan pengawasan sebagai aspek penting di dalam pengelolaan dana desa yang belum diterapkan dalam lokasi penelitian ini juga sejalan dengan Bima, Kamal, & Djanggih (2020) yang mengatakan bahwa pengelolaan dana desa harus menjadi prioritas sehingga perlu pola preventif di dalam pengelolaan dana desa agar tidak terjadi kebocoran seperti yang telah dilansir oleh *Indonesian Corruption Watch* (2015-2018). Perlunya asistensi, pelatihan dan pengawasan juga sejalan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2020) bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa harus ditingkatkan agar mencapai sasaran yang lebih efektif dan efisien. Demikian juga Mulyani (2020) mengatakan bahwa pengetatan pengelolaan keuangan desa wajib dilakukan agar sesuai dengan pemanfaatannya.

Ketepatan Penggunaan Dana Desa Sesuai dengan Potensi Desa

Di dalam penelitian ini ditemukan bahwa selama ini penggunaan dana desa belum maksimal dan sesuai dengan potensi desa yang ada. Hal tersebut tergambar melalui hasil penelitian yang telah dilakukan, ketidaksesuaian ini memberikan dampak negatif bagi masyarakat diantaranya dana atau bantuan sebagai swadaya masyarakat tidak berfungsi secara maksimal, hal ditemui dalam penelitian yakni bahwa dana desa yang digunakan untuk pembedayaan masyarakat desa belum tepat sasaran kasus yang dijumpai adalah nelayan mendapat mesin jahit hal ini membuat mandeknya kegiatan ekonomi masyarakat karena ketidaktepatan bantuan dengan sasaran.

Pengelolaan dana desa selama ini belum tepat pak menurut saya karena saya melihat tahun-tahun sebelumnya itu begitu kan saya baru dilantik empat bulan lalu dan saya sudah

lama di sini pak sejak tahun 90-an sudah di sini jadi saya tahu ini desa. Coba ini lampu listrik jalan dulu bangun ini lampu untuk apa desa pak, desa tidak butuh ini nanti malam ini desa pak macam kota pak terang sekali dan anggarannya ini besar menurut saya ini belum tepat sasaran pak, sekarang jadi susah juga ini kan pake pulsa pak harus beli dan dananya besar sementara dana desa tidak bole untuk beli pulsa jadi sekarang tinggal dari masyarakat itu patungan beli pulsa, kalau tidak ada ya tidak menyala, saya tahu ini pak kan proyek jadi ada untungnya jadi penting bagi saya itu harus utama sasaran yang dibutuhkan masyarakat, mesin jahit kasih nelayan kan untuk apa, lalu yang dapat bantuan itu-itu saja atau keluarga sendiri selama ini itu yang terjadi pak. (Ayah Botu Barani;W/03/20-04-2020).terdapat lampu jalan yang berada di Desa Botu Barani yang nota bene ini merupakan jalan tran yang pendanaannya seharusnya bukan mejadi tanggungjawab desa, lampu jalan ini berjejer sepanjang jalan desa Botu barani, menurut ayah botu barani bahwa listrik ini dibayai oleh dana desa, dan listriknya menjadi tanggungjawab masyarakat juga, karena ini menurutnya tidak tepat sasaran, salah satu tiang listrik berdiri tepat samping kiri kantor Desa Botu berani. O./03/20-04-2020

Selain hal tersebut kasus lain yang ditemui dalam penelitian ini adalah pembangunan fisik juga tidak sesuai dengan kebutuhan bahkan merugikan masyarakat desa kasus ini dijumpai pada masyarakat desa Botuberani berupa pembangunan lampu jalan desa yang berada pada jalan trans yang nota bene wilayah tanggung jawab provinsi hal ini juga terjadi di desa Biluango, dan sekarang hal ini merugikan masyarakat karena pembiayaan listrik untuk sekarang dibebankan pada masyarakat, hal ini terjadi karena penggunaan anggaran yang belum tepat dikelola selama ini oleh pihak terkait.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan dana desa belum tepat sasaran sehingga berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini tidak sesuai dengan kehendak pemerintah seperti yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang efektivitas pengelolaan dana desa. Demikian juga dijelaskan oleh Bambang Brodjonegoro dalam harian Kontan 11 Januari (2016) bahwa peruntukan dana desa (DD) sering disalahgunakan oleh aparat desa, sehingga manfaat bagi masyarakat desa tidak tercapai.

Pemanfaatan Dana Desa Disesuaikan dengan Asas Proporsional dan Kajian Terlebih Dahulu

Asas proporsional dan juga kajian terlebih dahulu oleh ahli maupun pemerintah menjadi bagian yang tidak boleh diabaikan begitu saja, temuan penelitian ini merujuk bahwa selama ini pemberian bantuan pada masyarakat belum proporsional jumlahnya dan juga dilakukan kajian terlebih dahulu. Hasil wawancara dari berbagai pihak ditemukan bahwa asas ini diabaikan dan belum dilaksanakan dengan baik, para kepala desa menginginkan bahwa kajian diperlukan untuk menentukan pemetaan terkait dengan potensi desa yang dimiliki sehingga pemanfaatan dana desa ini sesuai dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

....sebenarnya yang utama itu yang perlu dilakukan itu pak kajian dulu, maksudnya melakukan kajian terhadap potensi desa terus didaftar sebagai sasaran nanti untuk membangun desa ini, itu dulu utamanya dengan demikian mo dapa tahu itu sasaran pak, kalau itu udah ada bahwa potensi desa ini A,B,C... baru kita tentukan anggarannya secara proporsional pak, jadi pembagian dana untuk pemberdayaan itu memperhatikan potensi desa dan secara proporsi pak, misalnya penggurrn di sini banyak anak muda dicari sosuli dengan kajian terus diberikan bantuan apa begitu sesuai kebutuhan anak muda itu biar sesuai dan juga menghasilkan pak. Itu yang penting selama ini ditentukan dulu anggaran tanpa kajian lebih dulu pak. (Ayah Botu Barani;W/03/20-04-2020). Untuk memanfaatkan Dana desa secara maksimal maka kuncinya yang utama itu tereletak pada Ayahanda (Kepala Desa) karena sebagai pemimpin kita harus adil terhadap masyarakat, selama ini yang sudah dilakukan sebelum saya pembagian untuk pemberdayaan masyarakat belum tepat sasaran misalnya yang terjadi nelayan diberi bantuan mesin jahit, ini namanya tidak tepat sasaran, kemudian kita lihat juga untuk pembagian yang selama ini lebih diutamakan keluarga dengan mengabaikan kebutuhan atau status ekonomi masyarakat dengan

demikian sebagai seorang Ayah 24 tidak boleh seperti ini. Inilah sebabnya selama ini pemanfaatan dana desa belum maksimal sesuai dengan sasaran. (Ayah Botu Barani;W/03/20-04-2020).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi penggunaan keuangan dengan perbandingan 40% untuk pembangunan dan 60% persen untuk pemberdayaan belum sepenuhnya dilaksanakan, dan bahkan kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa dana belanja pembangunan setiap tahun lebih tinggi dibandingkan dengan dana pemberdayaan. Temuan ini juga berbeda Huru, Harahap dan Nasution (2018) bahwa orientasi penggunaan desa lebih pada aspek pembangunan. Selain itu di dalam buku pintar dana desa (2018) dijelaskan bahwa keberhasilan dana desa maka proporsi pemberdayaan kepada masyarakat harus ditingkatkan. Penyaluran dana desa yang mengalami peningkatan setiap tahun, menurut BPKP (2020) diharapkan lebih memberdayakan masyarakat melalui program menciptakan lapangan kerja; mengatasi kesenjangan, dan dapat mengentaskan kemiskinan pada masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini memberikan pemahaman tentang alur dan pola pemanfaatan dana desa yang selama ini dilakukan, untuk itu sebagai kesimpulan dalam penelitian sebagai temuan dan juga pemodelan tentang keseimbangan pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan membutuhkan berbagai variabel diantaranya; 1) pengalaman dan pengetahuan kepala desa sebagai pimpinan di Desa menjadi bagian tersebut karena pengalaman seseorang sangat mempengaruhi kepemimpinan dan juga akan efektif dalam kepemimpinannya, pengetahuan dalam penelitian ini berhubungan dengan latar belakang pendidikan kepala desa, pendidikan akan memberikan nilai tersendiri bagi masyarakat desa sehingga dalam pengelolaan dana desa akan melibatkan pengetahuan yang telah dimiliki oleh kepala desa; 2) Partisipasi dan kesadaran masyarakat: banyak masyarakat belum menyadari pentingnya keterlibatan mereka dalam pengelolaan dana desa ini sebagai sasaran, partisipasi masyarakat akan memberikan manfaat bagi mereka sendiri sehingga tercapai kesejahteraan itu dengan sendirinya; 3) Asistensi berkala/*training/controlling* bagi kelompok masyarakat sebagai sasaran dalam pengelolaan dana desa: sebagai temuan penting dalam penelitian ini yang menjadi bagian yang menciptakan keseimbangan dalam pengelolaan dana desa; 4) Ketepatan penggunaan dana desa sesuai dengan potensi desa: penggunaan dana yang selama ini belum maksimal karena belum tepat sasaran akan tetapi keinginan kepala desa baru akan mewujudkan hal ini; 5) Pemanfaatan dana desa disesuaikan dengan Asas Proporsional dan kajian terlebih dahulu; kegiatan dalam pengelolaan dana desa selama ini belum dilakukan secara proporsional dan kajian terlebih dahulu.

Setelah melakukan kajian yang mendalam tentang keseimbangan pengelolaan dana desa maka tim merumuskan berbagai rekomendasi sebagai pertimbangan bagi pemerintah desa dalam mengembangkan berbagai potensi desa melalui dana desa, yaitu: 1) Perlu tim ahli untuk melakukan berbagai kajian terkait dengan pengembangan potensi desa hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan perguruan tinggi pada wilayah desa tersebut, hal ini diperlukan untuk memastikan secara empiris tentang pengembangan potensi sebelum dilakukan tindakan; 2) Asistensi diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat karena salah satu kendala selama ini adalah kurang asistensi dari ahli untuk melakukan asistensi secara berkala bagi masyarakat karena itu pemerintah harus memberikan asistensi kepada masyarakat sebagai sasaran dan berkesinambungan; 3) Pemerintah desa harus aktif memberikan pemahaman agar masyarakat terlibat aktif dan berpartisipasi secara bersama-sama untuk mengembangkan berbagai potensi desa demi peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 6(1), 61–76.
- Abu, R. (2015). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. [http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/11/eJournal%20\(11-05-15-10-50-31\).pdf](http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/11/eJournal%20(11-05-15-10-50-31).pdf).

- Astuti, T.P. & Yulianto. (2016). Good governance pengelolaan keuangan desa menyongsong berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1 (1): 1-14.
- Azis, N. L. L. (2016). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), 193–211.
- Berg, B. (2007). An Introduction to Content Analysis. In: Berg, B.L., Ed., *Qualitative Research Methods for the Social Sciences*, Allyn and Bacon, Boston, 238-267.
- Biernacki, R. (2005). “The event of place in historical sociology”. In H.J. Graff., L.P. Moch., P. McMichael & J. Woesthoff (Eds), *Looking Backward and Looking Forward: Perspectives on Social Science History*. Madison: University of Wisconsin Press.
- Blane D. L. (2015). *Decentralising to villages in Indonesia: Money (and Other) Mistakes*. <https://doi.org/10.1002/pad.1741>
- Boedijono, Wicaksono, G., Puspita., Y., Bidhari, S., C. Kusumaningrum, N., D., Asmandani, V. (2018). Efektifitas pengelolaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di kabupaten bondowoso. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi Uinat*. 4(1). 9 – 20. <https://garuda.ristekbrin.go.id/author/view/999113>
- Creswell, W. J. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lasmi & Verni. (2020). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat pada Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 11(1). <http://eksis.unbari.ac.id/index.php/EKSIS/article/view/176>
- Dessler, G. (2000). *Human resource management*. 8th edition. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Donaldson, L. (1985). *In Defence of Organization Theory, A Reply to the Critics* (Cambridge, Cambridge University Press). <https://www.coursehero.com/file/p7paqq29/Donaldson-L-1985-In-defence-of-organization-theory-A-reply-to-the-critics/>
- Gaventa, J. & Valderama C. 2001. *Mewujudkan Partisipasi-21: Teknik Mewujudkan Partisipasi Masyarakat Untuk Abad 21, The British Council*. <https://www.google.com/search?q=permendesa+nomor+2+tahun+2016&oq=permendesa+no&aqs=chrome.69i57j0l5.14456j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>
- Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasution, M. A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10 (1), 146-154. <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiiis>
- Saputra, I.W., Sujana, I.W. & Haris, I.A. (2016). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014, *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 6 (1), 1-10.
- Inten, M. & Liliana. (2017). Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(2), 227-429.
- Jamaluddin, Y., Sumaryana, A., Rusli, B., & Buchari, R. A. (2018). Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 6(1), 14-25.

- Jensen, M.C. and W.H. Meckling. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure, *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360.
- Julianto, A. (2017). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan (Studi Komparatif di Desa Mambulu dan Desa Pagaluyon). *E-Journal PIN*. 5(4). <http://ejournal.pin.or.id/site/1415>
- Justitia, D (2016). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia*, 10(2), 26-32.
- Kartohadikusomo. 1984. *Desa*. Jakarta: Balai Pustaka
- Kemendes PDTT. (2019). *Kemendes PDTT Konsolidasikan Percepatan Program Tahun 2019*. https://news.detik.com/berita/d-4410306/kemendes-pdtt-konsolidasikan-percepatan-program-tahun-2019?_ga=2.157263803.1202207018.1566112987-1319973758.1566112987
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). *Buku Pintar Dana Desa*. <https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf>
- Lester, J.P. & Stewart, J. (2000). *Public Policy: an Evolutionary Approach*. Australia: Wodsworth, Second Edition.
- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. No.2 Tahun (2016). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia*.
- Bima, M.R., Kamal, M., Djanggih, H. (2020). Pelatihan dan penyuluhan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (Jipemas)*, 3(1), 63–77. <http://Riset.Unisma.Ac.Id/Index.Php/Jipe>
- Nash, K. (2001). The Cultural Turn in Social Theory: Towards A Theory of Cultural Politics. *Sociology*, 35 (1), 77-92.
- Nurrofi, A. (2012). Pengaruh disiplin kerja dan pengalaman kerja terhadap prestasi kerja karyawan pada departemen produksi PT. Leo Agung Raya Semarang. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan*, 13 (1), h: 1-4.
- Nurul, H. & Iin,W. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (DD) Studi Kasus pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Aksi*, 2 (2). <http://journal.pnm.ac.id/index.php/aksi/article/view/114>.
- Permendagri 20 Tahun (2018) Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*. <https://www.jogloabang.com/desa/permendagri-no-20-th-2018-pengelolaan-keuangan-desa>
- Radio Republik Indonesia, 2 Mei, (2019). *Dana Desa untuk Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Baru 8%*. http://rri.co.id/post/berita/668159/ekonomi/dana_desa_untuk_pemberdayaan_ekonomi_kerakyatan_baru_8.html
- Wisni, S. (1994). Transformasi Sosial Masyarakat dalam Perspektif Strukturalisme - Fungsionalisme Suatu Tinjauan Sosiologis. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, Nomor 3, Tahun XUI, November, 127-138.
- Stoner, James A.F., & Charles Wankel (1986). *Management*, Third Edition, Prentice-Hall International, Inc., Englewood Clffes, New Jersey.
- Sudarmanto (2009). *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta

- Sulis.S. (2017). Efektivitas Pengalokasian Dana Desa di Desa Karang Tunggul Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. *E-Journal Administrasi Negara*. 5(3).
- Thomas. (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebangang, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung. *Jurnal Pemerintahan Integratif*, 1, 51–64.
- Tricker, R.I. (1984). *Corporate Governance: Practice, Procedures and Powers in British Companies and Their Boards of Directors* (Aldershot, Hants., Gower). <https://www.worldcat.org/title/corporate-governance-practices-procedures-and-powers-in-british-companies-and-their-boards-of-directors/oclc/10505517>.
- Tumbel, S., M. (2017). *Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di desa tumaluntung satu Kecamatan tareran Kabupaten Minahasa Selatan*. <https://Www.Neliti.Com/Id/Publications/161029/Partisipasi-Masyarakat-Dalam-Pengelolaan-Dana-Desa-Di-Desa>.
- Undang-undang. 2014. Tentang Dana Desa. <http://www.keuandangesa.com/2017/04/dana-desa-menurut-undang-undang-no-6-tahun>.
- Williamson, O., (1985) *The Economic Institutions of Capitalism* (New York, Free Press). <https://pdfs.semanticscholar.org/a4d6/1a75c4b99d414084cc84f404e5>
- Yuyun, Y. (2015). Potensi Penyelewengan Alokasi Dana Desa Dikaji Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Mimbar Justitia*. 1(02).
- Zerubavel, E. 2004. *Time Maps: Collective Memory and the Social Shape of the Past*. Chicago: University of Chicago Press.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Indonesia

Silvi Dewi Purwanti¹⁾, Farida Rahmawati^{2*)}

¹⁾²⁾ Economics and Development Study, Faculty Of Economics and Business, Universitas Negeri Malang, Malang City, Indonesia

* E-mail corresponding author: farida.rahmawati.fe@um.ac.id

Received: 27-02-2021;
Accepted: 31-03-2021;
Available online: 30-04-2021

Ecoplan Vol. 4 No. 1, April 2021,
hlm 32-44.

ISSN p: 2620-6102
e: 2615-5575

Keywords: Government
Expenditure, TPT, Inclusive
Economic Growth

Abstract - This research is motivated by economic growth, a goal for a country supported by economic development. However, economic growth in Indonesia during the years 2010-2019 has not shown an ever-increasing result at the national level, and poverty and inequality have not been able to decrease. This condition is contrary to the goal of achieving inclusive economic growth. This study aims to measure and analyze Inclusive Economic Growth and the factors that influence it. This study uses two analysis methods: the Poverty-Equivalent Growth Rate (PEGR) model analysis and multiple linear regression analysis with time-series data. The results show that inclusive economic growth in Indonesia has not been consistent every year in the last decade. The time-series data regression analysis results show that the variables of government spending on education and spending on health have a significant effect on inclusive economic growth. The government expenditure variable in education has an inversely proportional impact on inclusive economic growth, while the open unemployment rate (TPT) variable has no significant effect on inclusive economic growth. Efforts that can be made through government policy implications are strengthening the Smart Indonesia Program (PIP) to vocational education. Health facilities, health programs through additional facilities, recruitment of medical personnel to maximize health Indonesia cards, and BPJS.

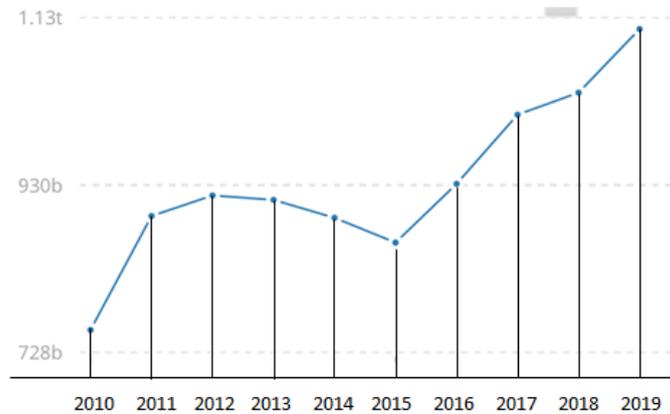
Abstrak - Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan bagi suatu Negara, yang didukung dengan pembangunan ekonomi. Namun pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama tahun 2010-2019 belum menunjukkan hasil yang terus meningkat pada level nasional disamping itu kemiskinan dan ketimpangan yang belum dapat menurun. Kondisi tersebut bertolakbelakang dengan tujuan tercapainya pertumbuhan ekonomi inklusif. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Terdapat dua metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis model Poverty-Equivalent Growth Rate (PEGR) dan analisis regresi linier berganda dengan data time series. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada satu dekade terakhir pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia belum konsisten tercapai setiap tahun. Hasil analisis regresi data time series menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan memiliki pengaruh yang berbanding terbalik terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif, Sedangkan variabel tingkat pengangguran terbuka (TPT) berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Adapun upaya yang dapat dilakukan melalui implikasi kebijakan pemerintah yaitu penguatan Program Indonesia Pintar (PIP), hingga pendidikan vokasi, penguatan

program kesehatan melalui penambahan fasilitas kesehatan, perekrutan tenaga medis, hingga memaksimalkan kartu Indonesia sehat dan BPJS.

Kata Kunci : Pengeluaran Pemerintah, TPT, Pertumbuhan Ekonomi Inklusif.

PENDAHULUAN

Setiap negara pasti memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di suatu negara akan dapat dicapai apabila pembangunan ekonomi juga dapat terpenuhi. Menurut (Sukirno, 2011) bahwa pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang ditambah dengan perubahan, sehingga artinya pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari kenaikan produksi barang dan jasa yang berlaku dari tahun ke tahun melainkan juga perlu diukur aspek lainnya seperti perkembangan pendidikan, perkembangan teknologi, peningkatan kesehatan, peningkatan ketersediaan infrastruktur, peningkatan pendapatan hingga kemakmuran masyarakat.



Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Sumber: World Bank

Pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan perkembangan yang berfluktuatif. Perkembangan pertumbuhan ekonomi tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor baik dari faktor ekonomi maupun non ekonomi. Faktor ekonomi dapat berupa kebijakan pemerintah seperti kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, kondisi ekonomi negara lain dsb dan faktor non ekonomi seperti bencana alam, sosial budaya, dan lain-lain. Terdapat beberapa permasalahan ekonomi yang terjadi di negara ini. Salah satu nya yang utama yaitu tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Indonesia masih menunjukkan angka yang cukup tinggi.

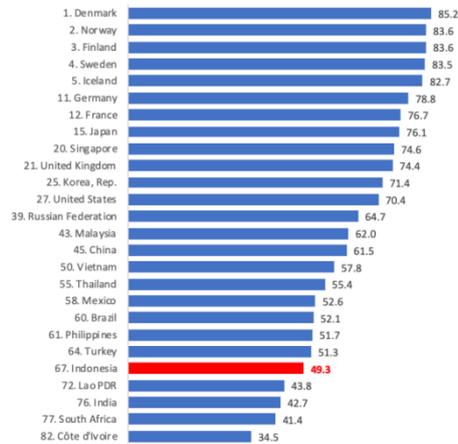


Gambar 2. Tingkat Kemiskinan Indonesia

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (data diolah)

Dilihat dari diagram Gambar 2, data menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia yang cukup tinggi dari tahun ke tahun, penurunan yang belum cukup menunjukkan ke arah yang signifikan. *Social Mobility Index (SMI)* yang dirilis oleh *World Economic Forum* menunjukkan posisi

suatu negara dengan tingkat keadaan kemiskinannya. Meskipun di Indonesia tingkat kemiskinan dalam beberapa tahun mengalami penurunan namun kenyataannya kondisi pertumbuhan ekonomi belum merata kebermanfaatannya. Hal ini juga dapat dilihat dan dinilai melalui *Social Mobility Index*. Pada Gambar 3 merupakan *Social Mobility Index* tahun 2019 yang dipublikasikan oleh *World Economic Forum*, Indonesia menempati urutan ke 67 dari 82 negara.



Gambar 3. Social Mobility Index
Sumber: World Economic Forum

Semakin tinggi nilai *Social Mobility Index* maka akan semakin rendah ketimpangan pada suatu negara tersebut. Indonesia menempati tingkat *Social Mobility Index* yang cukup rendah, sehingga hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan kondisi ekonomi individu terhadap orang tua masih cukup tinggi, yang artinya masyarakat dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah akan mengalami kondisi ekonomi menengah ke bawah pula. Sehingga kemungkinan anak dari keluarga miskin sulit memperbaiki kondisi ekonomi yang akan menyumbang angka kemiskinan. Dari tingkat kemiskinan tersebut terdapat hubungan dengan ketimpangan yang terjadi di Indonesia. Ketimpangan yang terjadi di Indonesia digambarkan dari distribusi PDB yang ada di Indonesia masih banyak dikuasai oleh provinsi-provinsi di Indonesia Bagian Barat, sehingga beberapa kawasan di Indonesia masih menunjukkan kondisi yang masih tertinggal dalam hal ketersediaan prasarana fisik, sosial hingga sumber daya maupun kelembagaannya.

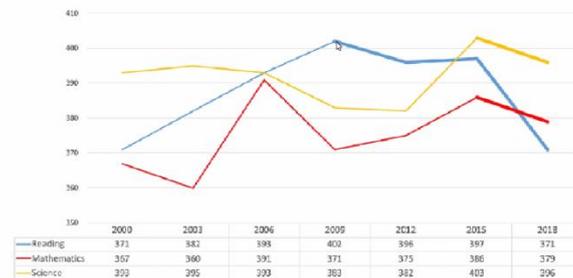


Gambar 4. Gini Ratio Indonesia
Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Ketimpangan yang di Indonesia juga tergambar dalam data gini ratio. Dengan nilai gini ratio yang cukup tinggi menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Indonesia masih cukup tinggi. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang kebermanfaatannya belum dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, maka hal tersebut dapat dinilai dari pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi, adanya ketimpangan yang masih tinggi pula. Persoalan kemiskinan dan kesenjangan yang terjadi tentu bertolak belakang dengan isu pertumbuhan inklusif. Sehingga pencapaian pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia masih cukup kurang. Definisi pertumbuhan inklusif disini yaitu, pertumbuhan ekonomi dapat disebut inklusif apabila pertumbuhan ekonomi tersebut mampu menurunkan kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Pembangunan sumber daya manusia merupakan prioritas pembangunan pemerintah pada rencana pembangunan satu dekade dalam dua periode yaitu 2010-2014 dan pada 2015-2019. Peningkatan kualitas

sumberdaya manusia tersebut dapat dicapai melalui peningkatan pendidikan dan kesehatan. Namun kondisi pendidikan di Indonesia saat ini belum menunjukkan peningkatan yang baik karena dapat dilihat dari Gambar 5.



Gambar 5. PISA score: Indonesia, 2000-2018

Sumber: OECD, PISA 2018

Dari Gambar 5 menunjukkan dari penilaian membaca maupun pengetahuan, meskipun di Indonesia jumlah anak bersekolah terus meningkat, tetapi kemampuan pemahamannya belum menunjukkan peningkatan, sehingga belum baik. Selain pendidikan, kesehatan juga memerlukan perhatian khusus untuk menghasilkan sumber daya manusia yang dapat memiliki pendidikan yang baik pula.

Pemerintah memiliki beberapa kebijakan yang dapat mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas sumberdaya manusia serta menurunkan permasalahan pembangunan yang terjadi. Salah satu kebijakan di Indonesia adalah kebijakan fiskal, yang dapat mendukung peningkatan sumberdaya manusia khususnya pengeluaran pemerintah melalui pengeluaran di bidang pendidikan dan pengeluaran pemerintah dibidang kesehatan, untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sehingga mengarah kepada pemerataan pembangunan. Selain dari pembangunan pada kualitas sumber daya manusia itu sendiri, adanya jumlah tenaga kerja yang produktif juga merupakan hal penting dalam mendukung pembangunan, karena apabila terjadi peningkatan tenaga kerja produktif maka output perekonomian juga dapat meningkat, namun hal tersebut juga harus diimbangi dengan adanya suatu sarana atau prasarana yang mendukung, baik berupa kebijakan ataupun yang lainnya. Sehingga peningkatan tenaga kerja yang produktif atau biasa tergolong dalam angkatan kerja dapat terserap dalam lapangan kerja yang tinggi pula dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam mencapai inklusifitas. Namun kondisi angkatan kerja di Indonesia pada tahun 2010-2019 masih perlu adanya fokus lebih lanjut karena angka pengangguran cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

TINJAUAN PUSTAKA

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi memiliki arti yaitu sebagai kenaikan GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, dan kondisi dimana terjadi adanya perubahan struktur ekonomi atau tidak. Teori pertumbuhan ekonomi menurut Solow sangat tergantung pada pertambahan faktor-faktor produksi, diantaranya yaitu tenaga kerja, akumulasi modal serta kemajuan teknologi (Prasetyo & Sulistyaningrum, 2013).

Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Menurut *Asian Development Bank* (ADB) dalam (Klasen, 2010) menyarankan bahwa penting untuk menentukan episode ekonomi seperti apa yang memiliki karakteristik sebagai pertumbuhan yang inklusif. Maka terdapat suatu kemungkinan untuk melihat hal tersebut, yang pertama yaitu melalui proses, pertumbuhan ekonomi yang inklusif merupakan meluasnya pertumbuhan antar sektor atau intensif terhadap tenaga kerja, maka dari itu pertumbuhan inklusif dapat diartikan sebagai pertumbuhan yang melibatkan partisipasi semua pihak tanpa diskriminasi dan mampu melibatkan seluruh sektor ekonomi. Yang kedua dilihat melalui hasil dari proses pertumbuhan, dalam hal ini konsep pertumbuhan inklusif berkaitan erat dengan konsep pertumbuhan pro poor, yang berarti berdasarkan hasil yang dicapainya, pertumbuhan inklusif merupakan pertumbuhan yang mampu mempengaruhi untuk penurunan kelompok yang “tidak diuntungkan” di dalam perekonomian. Berdasarkan hal tersebut pertumbuhan inklusif dapat disebut pertumbuhan yang tidak mendiskriminasi dan mampu menjamin pemerataan akses pertumbuhan atau, juga dapat dikatakan sebagai pengurangan disparitas antar kelompok.

Menurut (Azwar, 2016) dengan pendekatan yang dirumuskan oleh Klassen (2010), dengan mengadopsi uraian mengenai konsep PEGR maka untuk menghitung pertumbuhan inklusif sebagai berikut :

$$IG_{ij} = \frac{G_{ij}}{G_j} * \frac{-}{G_j}$$

Keterangan :

- IG_{ij} = Koefisien pertumbuhan inklusif
 G_{ij} = Pertumbuhan kelompok i dalam kaitannya dengan indikator j
 G_j = Pertumbuhan indikator j

Dalam hal ini i mengacu pada kelompok kurang beruntung tertentu dan j mengacu pada indikator yang bersangkutan (misalnya, pertumbuhan pendapatan atau ekspansi dalam pendidikan). Dari konsep PEGR yang digunakan untuk menghitung elastisitas sebagai komponen dalam setiap perhitungan koefisien inklusif dapat diturunkan. Dengan menjabarkan kemiskinan (p), ketimpangan (in) dan tenaga kerja (em), dan j mengacu pada indikator pertumbuhan ekonomi (g), maka pertumbuhan inklusif dapat diukur dengan rumusan tiga pendekatan berikut ini :

1. Pertumbuhan inklusif dalam menurunkan kemiskinan, koefisiennya adalah:

$$IG_p = (G_{pg}/G_p)\hat{G}_g$$

2. Pertumbuhan inklusif dalam menurunkan ketimpangan, maka koefisiennya :

$$IG_{in} = (G_{in.g} / G_{in}) \hat{G}_g$$

3. Pertumbuhan inklusif dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja, maka koefisiennya sebagai berikut :

$$IG_{em} = (G_{em.g} / G_{em}) \hat{G}_g$$

Pengeluaran Pemerintah

Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat melakukan redistribusi pendapatan melalui pengeluaran pemerintah dan perpajakan. Ostry (2014) dalam Utama et al., (2017) menyatakan bahwa melalui program redistribusi pendapatan yang melalui investasi untuk infrastruktur, kesehatan, pendidikan, jaminan sosial akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Adolf Wegner memiliki pendapat, dalam suatu bentuk hukum apabila pendapatan perkapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah akan meningkat pula terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul di dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya (Mangkoesoebroto, 1997; Wibowo, 2014).

Tingkat Pengangguran

Menurut (BPS) Pengangguran merupakan penduduk yang termasuk masyarakat produktif dan tergolong dalam angkatan kerja, dimana mereka juga ingin memiliki pekerjaan namun masih belum mendapatkan pekerjaan tersebut. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya kesesuaian yang terjadi pada pasar tenaga kerja, dimana dengan adanya kelebihan penawaran tenaga kerja namun kondisi permintaan tenaga kerja yang hanya sedikit. Adapun perhitungan tingkat pengangguran terbuka yaitu sebagai berikut:

$$Tingkat\ Pengangguran = \frac{Jumlah\ Pengangguran}{Jumlah\ Angkatan\ Kerja} + 100\%$$

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, dimana data yang diperoleh bersumber dari Publikasi *Online* dari *World Bank*, Badan Pusat Statistik (BPS) serta Kementerian Keuangan. Dengan menggunakan variabel dependen (terikat) yaitu Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Indonesia tahun 2010-2019, sedangkan untuk variabel independent (bebas) menggunakan data Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Indonesia tahun 2010-2019, Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Indonesia tahun 2010-2019 dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia tahun 2010-2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data pada level nasional. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan teknik dokumentasi. Pada penelitian ini digunakan dua metode analisis data, sebagai berikut:

Spesifikasi Model Poverty-Equivalent Growth Rate (PEGR)

Analisis deskriptif yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis kondisi pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia. Analisis data menggunakan excel. Pengukuran pertumbuhan ekonomi inklusif dengan konsep PEGR meliputi tiga dimensi pengukuran. Perhitungan dengan metode PEGR merupakan metode yang relevan untuk digunakan menghitung koefisien pertumbuhan ekonomi inklusif dengan membandingkan data keadaan kemiskinan, distribusi pendapatan, dan rata-rata penduduk pada awal periode dengan keadaan pada akhir periode atau disebut dengan teknik analisis *ex-post*, karena jika menggunakan teknik analisis *ex-ante* tidak memungkinkan jika melalui Kurva Lorenz. Peneliti mengadopsi salah satu diantaranya yaitu pengukuran pertumbuhan ekonomi inklusif dalam mengurangi kemiskinan. Dengan menggunakan analisis deskriptif akan dilihat tingkat pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia setiap tahunnya.

Di mana dengan mengungkap hasil pengembangan konsep oleh Klassen (2010) dalam (Amalina et al., 2013) penelitian ini menggunakan indikator kemiskinan, dengan menjabarkan i sebagai kemiskinan (p) yang mengacu pada indikator pertumbuhan ekonomi (g), maka model analisis terkait fenomena inklusifitas pertumbuhan yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$IGp = (Gpg/Gp)\hat{G}g \quad (1)$$

Di mana:

IGp : koefisien pertumbuhan inklusif dalam menurunkan kemiskinan

Gp : elastisitas kemiskinan terhadap pendapatan rata-rata

Gpg : elastisitas kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi

$\hat{G}g$: pertumbuhan ekonomi

IGp menyatakan inklusifitas pertumbuhan dalam menurunkan kemiskinan, sehingga pertumbuhan dinyatakan inklusif apabila nilai $IGp > \hat{G}g$.

Nilai Gpg dan Gp pada persamaan 1 di atas diperoleh dengan cara yang sama dalam konsep PEGR.

Dengan mendefinisikan kemiskinan (P) sebagai fungsi dari jumlah penduduk miskin (z) dan pendapatan rata-rata penduduk (x) yang dirumuskan sebagai berikut:

$$P = P(z, x) \quad (2)$$

Maka perubahan persentase jumlah penduduk miskin pada periode 1 dan periode 2 dapat dituliskan sebagai berikut ini:

$$P12 = P2 - P1 = \ln [P(z2, x2)] - \ln [P(z1, x1)] \quad (3)$$

Dan perubahan persentase pendapatan rata-rata penduduk dapat dihitung sebagai:

$$\Psi = \ln(x2) - \ln(x1) \quad (4)$$

Dengan demikian elastisitas kemiskinan terhadap pendapatan rata-rata (Gp) dapat dihitung sebagai:

$$Gp = P12 / \Psi \quad (5)$$

Sementara perubahan pertumbuhan ekonomi ($\hat{G}g$) yang dihitung dari Produk Domestik Bruto (PDB), sehingga perubahan pertumbuhan ekonomi periode 1 dan periode 2 dapat dituliskan sebagai:

$$\hat{G}g = \ln(PDRB2) - \ln(PDRB1) \quad (6)$$

Dengan demikian, elastisitas kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi (Gpg) dapat dihitung sebagai :

$$Gpg = P12 / \hat{G}g \quad (7)$$

Hasil yang diperoleh dari perhitungan persamaan (5) dan (7) diatas kemudian dimasukkan ke dalam persamaan (1) untuk memperoleh nilai indeks pertumbuhan inklusif yang kemudian digunakan untuk dibandingkan dengan nilai pertumbuhan ekonomi ($\hat{G}g$).

Spesifikasi Model Regresi

Analisis data menggunakan *software Stata 14.0*. Metode analisis yang digunakan didalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan jenis penelitian yang menggunakan deret waktu dan dengan lokasi penelitian di satu tempat.

Berikut merupakan model analisis regresi dengan data *time series* yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 \ln X_{t1} + \beta_2 \ln X_{t2} + \beta_3 \ln X_{t3} + \dots + e$$

Keterangan :

Y	= Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif (%)
β_0	= Konstanta
β_n	= Koefisien Regresi
Ln	= Logaritma Natural
X _{t1}	= Belanja Pendidikan (miliar Rp)
X _{t2}	= Belanja Kesehatan (miliar Rp)
X _{t3}	= Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
T	= Time Series Tahun 2010-2019

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Model Poverty-Equivalent Growth Rate (PEGR)

Tabel 1. Analisis Model PEGR

Tahun	\hat{G}_g	IGp	Hasil
2010	-0.33	-0.32	tidak inklusif
2011	-0.16	-0.15	tidak inklusif
2012	-0.02	-0.01	tidak inklusif
2013	0.005	0.019	inklusif
2014	0.02	0.03	inklusif
2015	0.03	0.04	inklusif
2016	-0.07	-0.06	tidak inklusif
2017	-0.08	-0.07	tidak inklusif
2018	-0.02	-0.01	tidak inklusif
2019	-0.07	-0.06	tidak inklusif

Sumber: data diolah (2020)

Tabel 1 menunjukkan bahwa pada beberapa periode penelitian, nilai koefisien pertumbuhan inklusif di Indonesia tidak pernah konsisten mencapai pertumbuhan yang inklusif, pada tahun 2010-2012 kondisi pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi kemiskinan tidak inklusif, berbeda dengan tahun 2013-2015 kondisi pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia dapat inklusif. Namun pada tahun selanjutnya 2016-2019 dengan Pertumbuhan Ekonomi yang terus mengalami kenaikan tetapi Pertumbuhan tersebut tidak inklusif dalam mengurangi kemiskinan. Dari hasil tersebut pada tahun 2011 dan tahun 2012 pertumbuhan ekonomi menunjukkan angka peningkatan namun dalam tabel menunjukkan pertumbuhan ekonomi tersebut tidak inklusif dalam menurunkan kemiskinan, begitu pula pada tahun 2016 hingga tahun 2019 menunjukkan peningkatan meskipun tahun 2018 sedikit mengalami penurunan, namun inklusifitas pertumbuhan ekonomi belum dapat tercapai pada tahun-tahun tersebut. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi ke arah Pro-Poor, maka terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Indonesia khususnya dalam mengurangi kemiskinan.

Hasil Analisis Statistik Regresi Data Time Series

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	10
Model	.08487791	3	.028292637	F(3, 6)	=	6.90
Residual	.024586771	6	.004097795	Prob > F	=	0.0226
				R-squared	=	0.7754
				Adj R-squared	=	0.6631
Total	.109464681	9	.012162742	Root MSE	=	.06401

igp	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
ln_pend	1.040116	.2823109	3.68	0.010	.3493265 1.730906
ln_kes	-.4528105	.1532369	-2.95	0.025	-.8277676 -.0778534
ln_tpt	-.215043	.2768042	-0.78	0.467	-.8923584 .4622723
_cons	-7.944031	2.708159	-2.93	0.026	-14.57066 -1.317406

Gambar 6. Hasil Regresi aplikasi Stata 14.0

Sumber: data diolah (2020)

Berdasarkan Gambar 6 menunjukkan regresi data *time series*, dengan hasil uji koefisien determinasi (R^2) bahwa masing-masing variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, dan tingkat pengangguran terbuka dalam menjelaskan variabel terikat yaitu pertumbuhan ekonomi inklusif sebesar 77.54%. Dan sisanya sebesar 22.46% dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Dari hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif namun memiliki koefisien pertumbuhan ekonomi inklusif negatif. Variabel pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Variabel tingkat pengangguran terbuka (TPT) berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif.

Dari tiga variabel bebas dan satu variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini maka diperoleh model sebagai berikut :

$$\text{IPEI} = -7.944031 + 1.040116 \text{ Belanja Pendidikan} - 0.4528105 \text{ Belanja Kesehatan} - 0.215043 \text{ TPT} + e$$

Dari hasil pengolahan data, variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Dengan nilai probabilitas $0.010 < 0.05$. Yang artinya ketika belanja pendidikan menurun 1 miliar Rp, maka pertumbuhan ekonomi inklusif akan meningkat 1.040116 sebesar persen secara rata-rata, dengan asumsi variabel lain tidak berubah. Menurut teori, pengeluaran pemerintah termasuk suatu kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan fiskal, yang bertujuan untuk mengontrol stabilitas ekonomi maupun sosial melalui distribusi pendapatan. Pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan merupakan suatu bentuk kebijakan yaitu investasi terhadap sumber daya manusia. Melalui pengeluaran pemerintah khususnya bidang pendidikan, pemerintah dapat mengambil kebijakan melalui secara umum perbaikan sistem pendidikan yang lebih modern, mengadakan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Dengan hal tersebut kemajuan teknologi sangat perlu selaras dengan adanya perbaikan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Secara luas ketika teknologi dapat disebarkan di seluruh wilayah di Indonesia maka juga akan meningkatkan kemampuan dari transfer ilmu pengetahuan antar wilayah yang mereka tidak bisa dapatkan di daerah mereka serta kreatifitas masyarakat, hal ini tidak hanya dapat mendorong output secara agregat namun juga akan dapat mendorong terbukanya lapangan pekerjaan secara merata.

Namun upaya pemerintah dalam satu dekade tersebut belum menunjukkan hasil yang maksimal sehingga pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan ketika menurun dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif. Hal ini terjadi karena jumlah angkatan kerja di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun pada Gambar 7, angkatan kerja tersebut sebagian besar merupakan penduduk dari lulusan pendidikan hingga menengah ke atas. Namun tingkat pengangguran juga belum mampu menurun setiap tahunnya pada Gambar 8, sehingga tingkat pendidikan mencerminkan belum maksimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pengeluaran pemerintah bidang pendidikan. Hal tersebut juga dapat disebabkan bahwa jasa atau akses pendidikan yang memadai belum banyak dirasakan oleh masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah, sehingga pada saat tertentu memperburuk distribusi pendapatan, sehingga hal tersebut bertolak belakang dengan konsep pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Hal ini sejalan dengan penelitian Azwar (2016) bahwa indeks pendidikan memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Dan tidak sesuai dengan

penelitian menurut Prabandari & Santoso (2018) bahwa *fiscal policy* melalui anggaran pendidikan dan kesehatan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan inklusif dimana akses pendidikan terutama untuk masyarakat miskin terbuka sehingga produktivitas masyarakat tersebut dapat meningkat, dengan adanya peningkatan produktivitas dapat meningkatkan penghasilan maka akan membantu masyarakat dari kondisi dengan ekonomi yang rendah maka secara otomatis akan mengurangi ketimpangan.



Gambar 7. Jumlah Angkatan Kerja di Indonesia tahun 2010-2019

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, (data diolah)



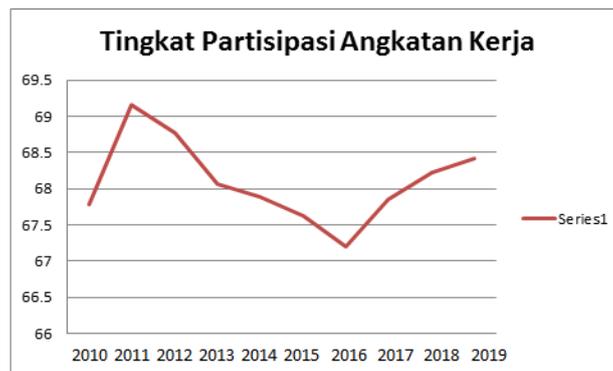
Gambar 8. Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia tahun 2010-2019

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, data diolah

Variabel pengeluaran pemerintah bidang kesehatan memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Dengan nilai probabilitas $0.025 < 0.05$. Artinya ketika belanja kesehatan menurun sebesar 1 miliar Rp, maka pertumbuhan ekonomi inklusif akan menurun sebesar 0.4528105 persen secara rata-rata, dengan asumsi variabel lain tidak berubah. Begitupun sebaliknya apabila belanja kesehatan meningkat maka pertumbuhan ekonomi inklusif akan meningkat. Hal ini sesuai dengan teori Wagner, pengeluaran pemerintah akan meningkat karena adanya interaksi dalam masyarakat yang salah satunya yaitu pada perbaikan tingkat kesehatan. Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan juga termasuk dalam investasi modal manusia, karena kebutuhan mendasar manusia adalah kesehatan, sehingga pembangunan kesehatan melalui pengeluaran pemerintah juga merupakan suatu kebijakan yang terus ditingkatkan oleh pemerintah. Sehingga meningkatnya produktivitas juga terjadi karena dari peningkatan pada tingkat kesehatan masyarakat. Hal tersebut yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang dibarengi dengan peningkatan pembangunan sumber daya manusia sehingga masyarakat dapat berupaya menyesuaikan dalam pasar tenaga kerja sehingga dapat mengarah pada percepatan pencapaian pertumbuhan ekonomi inklusif. Maka berdasarkan hasil penelitian ini, sejalan dengan hasil penelitian (Raheem et al., 2018) menyatakan “*the view that human capital development via spending on health conclusive can aid the attainment of inclusive growth tends to be supported by the panel evidence reported in this study*”.

Variabel tingkat pengangguran terbuka (TPT) memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Dengan nilai probabilitas $0.467 > 0.05$. Artinya, ketika Tingkat Pengangguran Terbuka menurun sebesar 1 persen maka pertumbuhan ekonomi inklusif akan menurun sebesar 0.215043 persen secara rata-rata, dengan asumsi variabel lain tetap. Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik menunjukkan dalam satu dekade terakhir persentase tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) cenderung menurun di beberapa tahun pada Gambar 9. Dengan adanya tingkat kemiskinan yang belum dapat ditekan. Hal ini dapat disebabkan karena adanya faktor internal tenaga kerja ataupun faktor

eksternal tenaga kerja. Faktor eksternal tersebut dapat terjadi karena adanya pergeseran penyerapan tenaga kerja pada berbagai sektor atau lapangan usaha. Pendapatan masyarakat antar sektor usaha dapat bergeser, ketika jumlah pengangguran satu sektor di Indonesia mengalami peningkatan dan disamping itu terdapat penurunan jumlah pengangguran pada sektor lain. Menurut Badan Pusat Statistik, pada tahun 2018 ke tahun 2019 lapangan pekerjaan utama di Indonesia yang meningkat yaitu Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (0,05 persen), Industri Pengolahan (0,024 persen), dan Perdagangan (0,20 persen). Sementara itu pada tahun 2016 ke tahun 2017 lapangan pekerja utama yang meningkat diantaranya sektor Industri (0,93 persen), sektor Perdagangan (0,74 persen), dan sektor Jasa Kemasyarakatan (0,49 persen). Pada tahun 2014 ke tahun 2015 peningkatan lapangan pekerjaan utama ada pada sektor Kontruksi (12,77%), sektor Perdagangan (3,42%) dan sektor Keuangan (7,92%). Pada tahun 2012 ke tahun 2013 peningkatan lapangan lapangan pekerjaan utama ada pada sektor Jasa Kemasyarakatan (6,49%), sektor Perdagangan (2,50%), dan sektor Keuangan (9,40%). Selanjutnya, pada tahun 2010 ke 2011 peningkatan lapangan pekerjaan utama terjadi pada sektor 1 yaitu Pertanian, Perburuan, Perikanan menyerap tenaga kerja hingga (35,86%). Dalam hal ini terdapat perubahan distribusi pendapatan masyarakat tersebut berdampak pada pergeseran daya beli yang sebelumnya dari pemilik faktor produksi kecil berubah perannya kepada pemilik faktor produksi yang tengah berkembang, sehingga yang terjadi di Indonesia adanya perubahan struktur ekonomi mengakibatkan adanya pergeseran pada sektor usaha dengan elastisitas penyerapan tenaga kerja yang rendah ke sektor usaha dengan elastisitas penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Dengan hal tersebut pada sektor usaha dengan elastisitas penyerapan tenaga kerja yang rendah memungkinkan adanya peningkatan kemiskinan dan ketimpangan. Namun di sisi lain, pada sektor usaha dengan elastisitas penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat pada sektor tersebut hingga meningkatkan pendapatan dan lebih inklusif.



Gambar 9. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Indonesia tahun 2010-2019

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, (data diolah)

Pada hasil penelitian ini, sesuai dengan penelitian milik Azwar (2016) yang menyatakan bahwa variabel pengangguran memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan agar dalam penelitian ini diketahui layak tidaknya model regresi yang digunakan untuk menganalisa variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini. Dalam pengujian regresi time series yang baik apabila telah memenuhi asumsi klasik. Asumsi-asumsi yang harus dipenuhi apabila analisis berganda berbasis OLS (ordinary least square) digunakan, dimana variabel terikat sebagai penjas dari variabel bebas.

Uji Normalitas

Skewness/Kurtosis tests for Normality					
Variable	Obs	Pr(Skewness)	Pr(Kurtosis)	joint	
				adj chi2(2)	Prob>chi2
resid3	10	0.7863	0.8541	0.11	0.9478

Gambar 10. Hasil Uji Normalitas dengan menggunakan Uji Skewness Kurtosis

Sumber: data diolah (2020)

Berdasarkan Gambar 10 hasil dari uji tersebut menunjukkan nilai sebesar 0.9478. Keputusan yang diambil dalam penelitian ini dari nilai Prob>chi2 uji skewness kurtosis. Nilai Prob>chi2 sebesar 0.9478

lebih besar dari taraf signifikansi 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa data distribusi residual dalam penelitian ini berdistribusi normal dan terbebas dari asumsi klasik normalitas.

Uji Multikolinieritas

```
. vif // cek non-multikolinieritas
```

Variable	VIF	1/VIF
ln kes	12.66	0.078971
ln pend	10.65	0.093860
ln_tpt	4.46	0.223982
Mean VIF	9.26	

Gambar 11. Hasil Uji Multikolinieritas

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan Gambar 11 menunjukkan bahwa rata-rata nilai *Varian Inflation Factors (VIF)* dalam model ini tidak melebihi 10.0. Maka dapat disimpulkan masing-masing variabel bebas dalam penelitian ini tidak memiliki korelasi satu sama lain, dengan kata lain variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan tidak memiliki hubungan korelasi dengan variabel bebas lain, variabel pengeluaran pemerintah bidang kesehatan tidak memiliki hubungan korelasi dengan variabel bebas lain, dan variabel tingkat pengangguran terbuka tidak memiliki hubungan korelasi dengan variabel bebas lain.

Uji Heterokedastisitas

```
. hettest //cek non-heterokedastisitas
```

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity
Ho: Constant variance
Variables: fitted values of igp

chi2(1)	=	0.33
Prob > chi2	=	0.5630

Gambar 12. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan Gambar 12 menunjukkan bahwa hasil dari Uji Breusch-Pagan dengan nilai $\text{Prob} > \chi^2$ lebih besar dari tingkat signifikansi 0.05. Pengambilan keputusan dalam penelitian ini apabila nilai dari $\text{Prob} > \chi^2$ uji breusch-pagan lebih besar dari 0.05 maka model dalam penelitian tidak mengandung asumsi klasik heteroskedastisitas. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan nilai 0.5630 yang lebih besar dari 0.05. sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model penelitian ini terbebas dari asumsi klasik heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

```
Breusch-Godfrey LM test for autocorrelation
```

lags (p)	chi2	df	Prob > chi2
1	0.177	1	0.6744

H0: no serial correlation

Gambar 13. Hasil Uji Autokorelasi menggunakan LM Test

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan Gambar 12 menunjukkan bahwa nilai dari uji autokorelasi dengan menggunakan *Lagrange Multiplier*, pada hasil tersebut nilai dari $\text{Prob} > \chi^2$ lebih besar dari tingkat signifikansi 0.05. Pengambilan keputusan dalam penelitian ini dari Uji *Lagrange Multiplier* dilakukan dengan melihat dari nilai $\text{Prob} > \chi^2$. Apabila nilai $\text{Prob} > \chi^2$ lebih besar dari 0.05 maka dalam model regresi tidak terjadi asumsi klasik autokorelasi. Dan sebaliknya, apabila nilai $\text{Prob} > \chi^2$ kurang dari 0.05 maka dalam model regresi ditemukan asumsi autokorelasi. Dalam model ini didapatkan nilai $\text{Prob} > \chi^2$ dari uji LM sebesar 0.6744 yang lebih besar dari 0.05 sehingga artinya dalam model regresi ini tidak ditemukan asumsi klasik autokorelasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, bahwa pertumbuhan ekonomi dalam mencapai inklusifitas terwujud pada tahun 2013-2015 dalam satu dekade terakhir dan tidak konsisten dalam 10 tahun terakhir. Hasil dari analisis regresi linier berganda data time series yaitu variabel pengeluaran

pemerintah bidang pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif, adapun kebijakan di bidang pendidikan oleh pemerintah selama periode pengamatan seperti perbaikan sistem pendidikan yang lebih modern, pembangunan sarana dan prasarana sekolah, dll, namun pengaruh dari hasil berbanding terbalik. Variabel pengeluaran pemerintah bidang kesehatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Variabel tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Sehingga variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan bidang kesehatan merupakan faktor pendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia, namun melalui pengeluaran pemerintah bidang pendidikan belum maksimal hasil yang dicapai.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan metode yang berbeda dan menambahkan variabel di luar model yang dapat mempengaruhi secara signifikan percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan beberapa hal yang dapat menunjang mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif melalui implikasi kebijakan pemerintah, diantaranya melalui pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terdapat penguatan kebijakan seperti meningkatkan pemberian insentif melalui Program Indonesia Pintar (PIP) yaitu Kartu Indonesia Pintar, beasiswa bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah kebawah secara merata hingga diadakan penguatan pendidikan vokasi yang baru saja ditegaskan. Dan disisi lain, pada program kesehatan melalui peningkatan penambahan sarana prasarana, jumlah tenaga medis hingga program Kartu Indonesia Sehat juga pada BPJS kesehatan. Juga melakukan pelatihan-pelatihan keterampilan terhadap tenaga kerja. Maka dengan adanya kebijakan tersebut merupakan beberapa upaya bagi pembangunan sumber daya manusia, dengan adanya perbaikan pada pembangunan sumber daya manusia akan mengarah pada produktivitas, terjadinya kesesuaian antara *supply* tenaga kerja terhadap permintaan tenaga kerja hingga peningkatan output secara agregat dan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalina, D. H., Hutagaol, M. P., & Asmara, A. (2013). Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Di Kawasan Indonesia Bagian Barat Dan Indonesia Bagian Timur. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 2(2), 85–112.
- Azwar. (2016). Pertumbuhan Inklusif Di Provinsi Sulawesi Selatan Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. *Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 9(2), 1–31.
- Bastias, D. D. (2010). *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Atas Pendidikan, Kesehatan Dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1969-2009*. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Tahun 2009-2010*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, B. (n.d.-a). *Indeks Gini Indonesia*.
<https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/946/distribusi-pembagian-pengeluaran-per-kapita-dan-indeks-gini-2010-2019.html>
- Badan Pusat Statistik, B. (n.d.-b). *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia*.
<https://www.bps.go.id/dynamictable/2020/02/19/1774/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-menurut-provinsi-1986---2019.html>
- Dianaputra, I. G. K. A., & Aswitari, L. P. (2017). Pengaruh Pembiayaan Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Kualitas Manusia Serta Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2011-2015. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 6(3), 286–311.
- Fathurahman, M., & Haeruddin. (2011). Pemodelan Regresi Linier untuk Data Deret Waktu Linear Regression Modeling for Time Series Data. *Eksponensial*, 2(ISSN 2085-7829), 35–42.
- Fitrianda, M. I. (2013). *Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Pengangguran Dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur Tahun 1988-2018*. Digital Repository Universitas Jember.
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2013). *Analisis Multivariat Dan Ekonometrika*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Habito, C. F. (2009). *Patterns of Inclusive Growth in Developing Asia: Insights from an Enhanced Growth-Poverty Elasticity Analysis* (ADB Working Paper Series). Asian Development Bank Institute. <http://www.adbi.org/working-paper/2009/08/12/3265.patterns.inclusive.growth.dev.asia/>
- Hidayah, Z. M. (2020). *Pengaruh Indikator Pembangunan Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Timur*.

- Kementerian Keuangan. (2019a). *Anggaran Kesehatan*. Direktorat PAPBN. <http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id/Dataset/Details/1008>
- Kementerian Keuangan. (2019b). *Anggaran Pendidikan*. Direktorat PAPBN. <http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id/Dataset/Details/1007>
- Klasen, S. (2010). Measuring and Monitoring Inclusive Growth : Multiple Definitions, Open Questions, and Some Constructive Proposals. *ADB Sustainable Development Working Paper Series*, Asian Development Bank, 12.
- Maipita, I., Jantan, M. D., & Razak, N. A. A. (2010). Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi Dan Angka Kemiskinan Di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 12(4), 421–456.
- Martono, N. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Meyer, D., & Meyer, N. (2019). Assessment of Inclusive Growth performance: A comparative analysis of the BRICS countries. *Acta Universitatis Danubius. Œconomica*, 15(4), 191–207.
- Mutijo, Kusriatmi, Suryono, Waluyo, Oktavia, G., Pafriada, M., Astuti, F. P., & Nurita. (2016). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Daerah Istimewa Yogyakarta 2011-2015. *Laporan Akhir*. Bappeda DI Yogyakarta.
- Prabandari, D. A. N., & Santoso, D. B. (2018). Analisis Inklusivitas Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Timur Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 7 (2), 1-12.
- Prasetyo, T. H., & Sulistyningrum, E. (2013). *Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Studi Kasus: Provinsi Sulawesi Barat, 2006-2013*.
- Raheem, I. D., Isah, K. O., & Adedeji, A. A. (2018). Inclusive growth , human capital development and natural resource rent in SSA. *Economic Change and Restructuring*, 51(1), 29–48. <https://doi.org/10.1007/s10644-016-9193-y>
- Safira, Djohan, S., & Nurjanana. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Bidang Infrastruktur Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Forum Ekonomi*, 21(2), 211–216.
- Sholihah, D. H. A. (2014). *Pertumbuhan inklusif: faktor-faktor yang memengaruhi dan dampaknya terhadap pertumbuhan kelas menengah di Indonesia* [Institut Pertanian Bogor]. <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/74697>
- Sheraphim, G. K. (2018). Pengaruh Tingkat Inklusi Keuangan, Tingkat Pengganguran Terbuka (TPT), Dana Pihak Ketiga (DPK), Dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Di 33 Provinsi Indonesia Periode 2011-2016. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 1-22.
- Sugianto, & Permadhy, Y. T. (2020). Perencanaan Pembangunan Inklusif Melalui Peran Partisipatif Pemerintah Daerah. *EcceS: Economics Social and Development Studies Abstract: Inclusive Development Planning Through The*. 7(1), 87–109. <https://doi.org/10.24252/ecc.v7i1.13565>
- Sukirno, S. (2011). *Ekonomi Pembangunan* (Agus (ed.); Kedua). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Suparno, H. (2014). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan, Dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi Kalimantan Timur. *Journal of Innovation in Business & Economics*, 5(1), 1–22.
- Tambunan, T. (2016). *Pembangunan Ekonomi Inklusif (Pertama)*. Jakarta: LP3ES.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Ekonomi Pembangunan* (D. Barnadi, S. Suraydi, & H. Wibi (eds.); sembilan). Jakarta: Erlangga.
- Utama, Z. S., Khusaini, M., & Wahyudi, S. T. (2017). Kebijakan Fiskal Di Persimpangan, Pro Growth Atau Pro Poor?. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 67–81.
- Wibowo, M. E. (2014). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pertanian, Pendidikan, Kesehatan, Dan Infrastruktur Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah). *Tesis. Repository Universitas Diponegoro*. <http://eprints.undip.ac.id/44748/>
- World Bank. (n.d.). Produk Domestik Bruto Indonesia Tahun 2010-2019. <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?lo>

Potensi dan Strategi Pengembangan Industri Sasirangan Kota Banjarmasin

Akhsanul Rakhmatullah

Faculty of Economics and Business, Lambung Mangkurat University, Indonesia

* E-mail corresponding author: akhsanul.rahmatullah@ulm.ac.id

Received: 27-02-2021;
Accepted: 19-04-2021;
Available online: 30-04-2021

Ecoplan Vol. 4 No. 1, April 2021,
hlm 45-53.

ISSN p: 2620-6102
e: 2615-5575

Keywords: *Empowerment of Sasirangan Craft industry, Value Chain, SWOT, Analytical Hierarchy Process*

Abstract - Banjarmasin has strategic potential in supporting economic growth and has enormous potential to contribute to the Sasirangan Handicraft Industry sub-sector economy. This study aims to: a) analyze the Sasirangan handicraft industry value chain, b) analyze the strategic position of the Sasirangan handicraft industry, c) analyze the empowerment strategy of the Sasirangan handicraft industry in Banjarmasin City. The data used includes primary data obtained through interviews with 40 respondents of Sasirangan artisans in Banjarmasin City. From the research results, the results of the integration of VSA (Value Chain, SWOT, and Analytical Hierarchy Process) are a) The value chain of Sasirangan handicrafts consists of; Suppliers, Manufacturers of Sasirangan Handicraft products, traders, and end consumers. Lack of supply of raw materials for fabrics originating from the island of Java and capital. Meanwhile, the downstream side still lacks support from the Government in product marketing at the national level, b) From the results of the SWOT analysis, this industry is quite strong but faces significant challenges; these results indicate a strategy to improve skills and expertise as well as investment to improve the quality and production capacity to achieve efficiency, c) AHP results obtained marketing strategy to be a priority factor that determines the prospect of Sasirangan Craft. Recommendations from this study include a) Development of the One Village One Product program, in this case, One Sasirangan Village One Product Design, b) Development of the Sasirangan craft industry cluster, c) The government is more communicative regarding financing regulations for artisans, d) Establishing financial institutions and insurance in supporting the capital of MSMEs, e) Involving crafters, creative communities and business people intensively in promotional activities and exhibitions through roadshows, digital marketing, websites and government cooperation.

Abstrak - Banjarmasin memiliki potensi strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi dan memiliki potensi yang sangat besar dalam menyumbang kontribusi Ekonomi dalam subsektor Industri Kerajinan Sasirangan. Penelitian ini bertujuan untuk : a) menganalisis rantai nilai industri kerajinan Sasirangan, b) menganalisis posisi strategis industri kerajinan Sasirangan, c) menganalisis strategi pemberdayaan industri kerajinan Sasirangan di Kota Banjarmasin. Data yang dipergunakan mencakup data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan 40 responden perajin Sasirangan di Kota Banjarmasin. Dari hasil penelitian diperoleh hasil integrasi VSA (Value Chain, SWOT, dan Analytical Hierarchy Process) yaitu : a) Rantai nilai kerajinan Sasirangan terdiri dari ; Pemasok, Produsen produk Kerajinan sasirangan, trader dan konsumen akhir. Kekurangan pasokan bahan baku kain bahan yang berasal dari pulau Jawa dan modal. Sedangkan sisi hilir masih kurangnya dukungan Pemerintah dalam pemasaran produk dalam tingkat Nasional, b) Dari hasil analisis SWOT, Industri ini cukup kuat namun menghadapi tantangan yang besar, hasil ini mengindikasikan pada strategi peningkatan ketrampilan dan keahlian serta investasi untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi untuk mencapai efisiensi, c) Hasil AHP diperoleh strategi pemasaran menjadi faktor prioritas yang menentukan prospek Kerajinan Sasirangan. Rekomendasi dari studi ini antara lain: a) Pengembangan program One Village One Product dalam hal ini Satu Kampung Sasirangan Satu Design Produk, b) Pengembangan kluster industri kerajinan Sasirangan, c) Pemerintah lebih komunikatif terkait regulasi pembiayaan bagi perajin, d) Membentuk lembaga keuangan dan asuransi dalam menunjang permodalan UMKM, e) Melibatkan perajin, komunitas kreatif dan para pelaku bisnis secara intensif dalam kegiatan promosi dan pameran melalui roadshow, digital marketing, website dan kerjasama pemerintah.

Kata Kunci: Pemberdayaan industri Kerajinan Sasirangan, Value Chain, WOT, AHP

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan belum memiliki regulasi baik Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur secara khusus dan spesifik tentang ekonomi kreatif, padahal sektor perbankan telah membuka peluang yang besar bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk memanfaatkan pinjaman lunak dalam mengembangkan bisnis-bisnis yang mengedepankan kreativitas. Di sisi lain pembinaan yang diberikan kepada pelaku ekonomi kreatif juga belum merata pada tiap-tiap kabupaten, padahal pembinaan kepada pelaku ekonomi kreatif berbasis ekonomi lokal dapat memperluas jaringan dan inovasi sehingga produk yang dihasilkan dapat memiliki nilai jual yang tinggi. Satu hal yang perlu diperhatikan kembali adalah sarana pemasaran. Meskipun di Kalimantan Selatan sudah ada pasar yang menjual kerajinan khas Kalimantan Selatan, akan tetapi sarana promosi dan ruang khusus bagi pemasaran produk industri kreatif belum terkelola dengan baik.

Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) telah melaksanakan kunjungan ke Kota Banjarmasin tahun 2016. Setelah melakukan telaahan, disepakati bahwa Produk Unggulan Ekonomi Kreatif Kota Banjarmasin adalah pada subsektor Kriya, yaitu Kerajinan Sasirangan. Atas dasar hal tersebut, fokus kajian ini adalah subsektor Kriya dengan produk sasirangan konvensional dan sasirangan ramah lingkungan (pewarna alam).

Namun dalam perkembangannya, industri Kerajinan Sasirangan mengalami pasang surut bahkan 3 (tiga) tahun terakhir walaupun jumlah perajin meningkat dari 40 pengrajin pada tahun 2017 ada 9 perajin yang tidak meneruskan kembali usaha sasirangannya ditahun 2020, pada tahun 2020 terdapat 101 jumlah pengrajin sasirangan di Kota Banjarmasin. Selain itu, industri kerajinan Kerajinan Sasirangan juga mengalami permasalahan berupa terbatasnya modal dan sumber daya manusia, berdasarkan hasil survei awal menunjukkan bahwa banyak perajin yang mengalihkan Kegiatannya dari menjadi perajin sasirangan beralih profesi menjadi pedagang atau profesi yang lain yang lebih cepat mendatangkan uang terutama di kalangan generasi muda.

Selain masalah internal, industri kerajinan sasirangan juga menghadapi permasalahan yang berasal dari eksternal industri yang berupa ketatnya iklim persaingan usaha, terbatasnya sarana prasarana, implikasi otonomi daerah yang meningkatkan biaya produksi, implikasi perdagangan bebas yang menuntut agar industri bekerja dengan skala produksi yang efisien dan terbatasnya akses pasar yang membuat industri Kerajinan Sasirangan harus melakukan evaluasi. Kondisi ini memerlukan upaya serius dari pemerintah daerah untuk terus mengembangkan industri Kerajinan Sasirangan mulai dari hulu hingga hilir.

Berdasarkan potensi yang sangat besar atas keberadaan industri kerajinan Kerajinan Sasirangan di Kota Banjarmasin sebagai sektor penting dalam menyediakan lapangan kerja yang berarti sebagai salah satu penopang ketersediaan lapangan kerja dan sekaligus keberadaannya sebagai sumber kesejahteraan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dilain pihak permasalahan yang dihadapi oleh industri Kerajinan Sasirangan juga dapat mengancam keberlangsungan hidup industri kecil yang secara otomatis menjadi ancaman bagi perusahaan hulu hilirnya, maka sangat layak sekali dilakukan studi lebih mendalam melalui penelitian tentang posisi strategis industri kerajinan Kerajinan Sasirangan dalam memberikan *backward* dan *forward linkage* bagi perkembangan sektor lainnya. Keterkaitan hulu hingga hilir melalui analisis rantai nilai (*value chain*) menjaga keberlangsungan industri Kerajinan Sasirangan, sehingga upaya untuk mendukung pemberdayaan industri kerajinan Sasirangan menjadi lebih integratif dan komprehensif.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah terjemahan dari *empowerment*, sedang memberdayakan adalah terjemahan dari *empower*. Menurut Merriam Webster dan *Oxford English Dictionary* dalam Hutomo (2000), kata *empower* mengandung dua pengertian, yaitu:

- 1) *to give power* atau *authority to* atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain;
- 2) *to give ability to* atau *enable* atau usaha untuk memberi kemampuan atau keperdayaan.

Terdapat 4 konsep pemberdayaan ekonomi menurut Sumodiningrat (1999) dalam Hutomo (2000), secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri;
- 2) Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural;

- 3) Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian. Langkah-langkah proses perubahan struktur, meliputi: a) pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya; b) penguatan kelembagaan; c) penguasaan teknologi; dan d) pemberdayaan sumberdaya manusia;
- 4) Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang;
- 5) Kebijakannya dalam pembedayaan ekonomi rakyat adalah: a) pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal); b) memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekadar *price taker*; c) pelayanan pendidikan dan kesehatan; d) penguatan industri kecil; e) mendorong munculnya wirausaha baru; dan f) pemerataan spasial;
- 6) Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup: a) peningkatan akses bantuan modal usaha; b) peningkatan akses pengembangan SDM; dan c) peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.

Pemberdayaan usaha kecil

Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak terlepas dari perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Terkait dengan pemberdayaan masyarakat dalam memperluas kesempatan kerja, maka dipengaruhi salah satunya oleh kebijakan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pengembangan UMKM terutama Usaha Kecil Menengah (UKM), memiliki potensi yang strategis dalam rangka pemberdayaan masyarakat, mengingat pertumbuhan dan aktifnya sektor riil yang dijalankan oleh UKM mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat, yaitu tersedianya lapangan kerja dan meningkatnya pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok UKM dapat menjadi penyeimbang pemerataan dan penyerapan tenaga kerja.

Salah satu hal yang dapat mendukung berkembangnya suatu UKM agar tercipta perekonomian yang kokoh adalah faktor modal. Hingga saat ini faktor modal berupa kredit usaha masih diusahakan pemerintah dan tercantum dalam kebijakannya. Seperti yang telah disebutkan dalam kebijakan pemerintah di atas, pemerintah melakukan kegiatan pokok di bidang permodalan di antaranya adalah memperluas, memperkuat, dan memfasilitasi sumber-sumber pembiayaan serta meningkatkan kredit skala mikro dan kecil. Dengan demikian, permodalan menjadi faktor yang penting bagi kemajuan UKM dalam rangka menguatkan ekonomi nasional meskipun dalam kenyataannya, beberapa pelaku UKM masih mengalami kesulitan dalam memperoleh kredit tersebut.

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah dalam upaya mengembangkan UKM melalui pemberdayaan, salah satunya melalui kebijakan Pemerintah yang dituangkan dalam UU No. 20/2008 tentang UMKM, khususnya dalam pasal 7 ayat 1 sangat jelas dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek: 1) Pendanaan, 2) Dukungan Pemerintah, 3) Kemitraan.

Analisis industri

Suatu industri didefinisikan sebagai suatu perusahaan yang menawarkan produk atau jasa yang saling mengganti satu sama lain dan memberikan kepuasan yang sama bagi konsumen. Tugas yang dihadapi oleh seorang manajer adalah menganalisis kekuatan pesaing dalam lingkungan industri yang dapat memberikan peluang dan ancaman bagi perusahaan. Untuk keperluan itu, maka kerangka kerja yang dikembangkan oleh Michael E. Porter dapat membantu manajer dalam membuat analisis yang disebut dengan Model Lima Kekuatan (*The Five Forces Model*) adalah sebagai berikut : 1) Persaingan antar unit-unit di dalam industri (*Rivalry Among Existing Firms*), 2) Resiko masuknya pesaing baru (*Threat of New Entrants*), 3) Kemampuan tawar menawar dari pembeli (*Bargaining Power of Buyers*), 4) Kemampuan tawar menawar dari supplier (*Bargaining Power of Suppliers*), 5) Ancaman jasa pengganti (*Threat of Substitute Services*).

Strategi pemberdayaan industri kecil

Strategi pengembangan industri kecil adalah pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam pengembangan industri kecil (Deperindag, 2002).

1. Pendekatan Pembangunan

Dalam menyelesaikan objek pengembangan industri baik yang bersifat pemecahan masalah (*problem solving*) maupun bersifat pengembangan ke depan (*development oriented*), strategi pemberdayaan yang ditempuh didasarkan pada pola pendekatan melalui dua langkah simultan yang bersinergi seperti :

- a. Memperkuat daya tarik faktor-faktor pada sisi permintaan pada produk industri (demand pull industri) melalui berbagai upaya yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan.
- b. Memperkuat daya dukung faktor pendorong pada sisi kemampuan daya pasok (supply push strategy) untuk memperlancar kegiatan produksi secara berdaya saing sesuai kondisi dan kebutuhan.

2. Penerapan Strategi Pemberdayaan

Pendekatan pembangunan dapat diterapkan pada semua skala pembinaan dari level sektor maupun kelompok industri di tingkat nasional secara makro sampai tingkat sentra industri dan unit usaha secara mikro, namun pertimbangan efisiensi karena keterbatasan sumber daya maka dilakukan penetapan prioritas pembinaan atau pengembangan industri kecil. Pendekatan sentra industri kecil menengah ditempuh dengan kecenderungan pada persaingan yang menuntut bergesernya pola persaingan individu ke arah pola persaingan secara kolektif menuju daya saing global.

Rantai nilai

Secara definisi rantai nilai adalah alat analisis strategik yang digunakan untuk memahami secara lebih baik terhadap keunggulan kompetitif, untuk mengidentifikasi dimana *value* pelanggan dapat ditingkatkan atau penurunan biaya, dan untuk memahami secara lebih baik hubungan perusahaan dengan pemasok/supplier, pelanggan, dan perusahaan lain dalam industri. *Value Chain* mengidentifikasi dan menghubungkan berbagai aktivitas strategik di perusahaan.

Tujuan dari analisis *value-chain* adalah untuk mengidentifikasi tahap-tahap *value chain* di mana perusahaan dapat meningkatkan *value* untuk pelanggan atau untuk menurunkan biaya. Penurunan biaya atau peningkatan nilai tambah (*Value added*) dapat membuat perusahaan lebih kompetitif.

Strategi diferensiasi biasanya menekankan pada kualitas unggulan. Beberapa perusahaan yang sukses melakukan hal ini antara lain: Apple dari USA yang bergerak di bidang teknologi berhasil menempatkan produknya mempunyai nilai unggul, dalam hal kualitas dan branding yang sangat baik, sehingga seperti: produk smartphone maupun Personal Computer menggunakan design Apple sebagai acuanya dibandingkan pesaing yang menawarkan harga murah sampai mempunyai pelanggan yang fanatik, begitu juga dengan produk Apple.

METODOLOGI PENELITIAN

LOKASI PENELITIAN

Lokasi penelitian ditentukan di Kota Banjarmasin dengan pertimbangan karena Kota Banjarmasin memiliki industri kecil Kerajinan Sasirangan dengan jumlah unit usaha sebanyak 40 Pengrajin Sasirangan.

METODE DAN OBJEK PENELITIAN

Dalam studi ini sesuai dengan tujuan penelitian akan digunakan beberapa alat analisis baik melalui metode kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan mampu menjawab permasalahan dan tujuan yang akan dicapai. Subjek penelitian adalah Perajin Sasirangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta SKPD terkait Pemerintahan Kota Banjarmasin.

Objek penelitian merupakan apa yang hendak diselidiki dalam penelitian. Dalam studi ini objek penelitiannya adalah menganalisis rantai nilai industri kerajinan Sasirangan, menentukan posisi strategis industri kerajinan kerajinan Sasirangan dan penentuan strategi pemberdayaan industri kerajinan kerajinan Sasirangan di Kota Banjarmasin.

DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL

- 1) Variabel dalam Rantai Nilai terdiri dari : a. Pasar akhir (*end market*) adalah masyarakat pengguna barang untuk kegiatan konsumsi. b. Lingkungan Penunjang adalah faktor-faktor diluar industri yang berperan menunjang aktifitas perusahaan, c. Pasar pendukung (*supporting markets*) adalah jasa pendukung aktifitas industri.
- 2) Variabel dalam analisis SWOT terdiri dari : Kekuatan (*strengths*), Kelemahan (*weakness*), Peluang (*opportunities*), Ancaman (*threats*).
- 3) Variabel dalam *Analytical Hierarchy Process* (AHP) terdiri dari:
 - a. Hierarki level 1 untuk mengetahui proyeksi pengembangan kerajinan sasirangan.
 - b. Hierarki level 2 untuk melihat proyeksi pengembangan kerajinan sasirangan dalam strategi pengelolaan keuangan, pengembangan SDM, Pemasaran dan pelayanan publik.
 - c. Hierarki level 3 untuk melihat faktor yang mempengaruhi proyeksi pengembangan kerajinan sasirangan yang terdiri dari pengelolaan keuangan, harga pokok produksi, kredit perbankan, Pendidikan dan pelatihan, sistem pengupahan, pemasaran lokal, digital marketing, design dan inovasi,

- standarisasi produk, penelitian pasar, pembinaan, fasilitas pameran produk hak paten produk.
- d. Hierarki level 4 untuk melihat proyeksi pengembangan kerajinan sasirangan yang terdiri dari scenario optimis, sekenario status quo dan skenario pesimis.
 4. Analisis rantai nilai adalah analisis yang diperoleh dari tanggapan responden terkait dengan tahapan aktifitas produksi mulai dari input hingga pemasaran produk sampai ke tangan konsumen melalui pengisian pertanyaan terstruktur dan wawancara mendalam pada sampel perajin sasirangan di Kota Banjarmasin.
 5. SWOT adalah analisis yang bertujuan untuk menentukan strategi sektor unggulan yang dapat di rumuskan berdasarkan pembobotan penilaian responden atas pertanyaan terstruktur.
 6. AHP adalah suatu model permasalahan yang tidak mempunyai struktur untuk memecahkan masalah yang terukur (kuantitatif) yang memerlukan pendapat (*judgement*) responden yang *expert* pada permasalahan industri kecil kerajinan Sasirangan di Kota Banjarmasin.

JENIS DAN SUMBER DATA

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer kuantitatif dan kualitatif yang diperoleh dengan melakukan survei lapangan serta data sekunder sebagai *supporting data* berupa *existing statistic data*.

- 1) Data Primer. Data ini diperoleh melalui survei lapangan (*face to face interview*).
- 2) Data Sekunder. Pengumpulan data yang berupa *existing statistic data* dilakukan dengan mengumpulkan data-data statistik daerah yang berasal dari berbagai laporan yang diberikan oleh lembaga pemerintah seperti BPS, Disperindag, Dinas Koperasi dan UMKM, Disnaker, Pemerintah Kota Banjarmasin.

POPULASI DAN SAMPEL

Populasi dalam penelitian ini adalah industri kecil kerajinan sasirangan yang tergolong dalam UMKM di Kota Banjarmasin berdasarkan jumlah pekerja. Jumlah industri adalah sebanyak 40 perajin sasirangan. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pengrajin sasirangan di Kota Banjarmasin sebanyak 40 perajin.

TEKNIK ANALISIS DATA

ANALISIS EKONOMI RANTAI NILAI

- a. End Market (Pasar Akhir)
- b. Usaha dan Lingkungan Penunjang
- c. Hubungan Vertikal
- d. Hubungan Horizontal
- e. Suppoorting MarketS
- f. (Pasar Pendukung)

ANALISIS SWOT

Untuk Melihat Posisi Strategis Industri Kerajinan Sasirangan.

ANALYTICAL HIERARCY PROCESS (AHP)

Untuk Melihat Strategi Pemberdayaan Industri Kerajinan Sasirangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Rantai Nilai Industri Kerajinan Sasirangan

Nilai jual tinggi produk kerajinan sasirangan ditentukan oleh nilai tambah yang didapatkan dalam setiap mata rantai produksi produk kerajinan. Nilai ekonomis produk akhir di pasar sangat bergantung pada tahapan produksi mulai dari penyediaan input produksi, proses produksi hingga penanganan pasca produksi. Rantai nilai produk merupakan aktifitas yang berawal dari bahan baku hingga penanganan purna jual dan mencakup aktifitas yang saling terkait hubungan dengan pemasok (*supplier linkage*) dan hubungan dengan konsumen (*consumer linkage*).

Industri kerajinan sasirangan merupakan salah satu industri yang memiliki rangkaian rantai nilai yang sederhana. Pelaku usaha yang terlibat didalam rantai nilai kerajinan sasirangan mulai dari pemasok bahan baku, perajin, pedagang, dan konsumen atau pengguna akhir dari produk sasirangan. Kualitas dan kuantitas hasil produksi ditentukan oleh peran pelaku usaha dalam memberikan kontribusi pada tiap tahapan rantai nilai. Oleh karena itu setiap pelaku usaha saling berkaitan dengan pelaku usaha lain dalam menunjang kontinuitas distribusi produk.

Rantai nilai industri kerajinan sasirangan di Kota Banjarmasin. Dalam rantai tersebut terdapat banyak

organisasi dan jaringan kerja yang terlibat dengan fungsi-fungsi penting yang saling berinteraksi. Masing-masing pelaku pada rantai nilai memiliki sebuah peran dan fungsi yang berbeda. Hubungan antar fungsi mencerminkan kekuatan dan kelemahan yang penting dari sebuah sistem kelembagaan. Seluruh hubungan terjadi dalam koridor kebijakan, hukum, insentif dan serangkaian sumberdaya yang memungkinkan beroperasinya sejumlah lembaga.

Berikut adalah peran dan fungsi dari masing-masing pelaku usaha dalam rantai nilai kerajinan sasirangan.

1. Industri Inti

Industri inti atau utama adalah perusahaan pembuat produk jadi kerajinan sasirangan yaitu perajin yang siap untuk dipasarkan. Usaha-usaha ini dapat memasarkan produknya secara langsung kepada pembeli di luar negeri dan dalam negeri (merangkap sebagai pedagang/eksportir) atau hanya produsen murni. Skala perusahaan yang berada dalam kelompok industri ini terdiri dari perusahaan kecil, mikro dan menengah.

Dalam upaya untuk memenuhi permintaan pasar, perajin melakukan spesialisasi terhadap produk sasirangan yang dapat berasal dari bahan baku atau jenis pewarnaan alam/ramah lingkungan, desain dan kualitas. Segmentasi pasar bagi produk sasirangan dilakukan untuk menjaga daya saing industri terhadap pesaing baik dari dalam dan luar negeri. Oleh karena itu dibutuhkan keahlian yang memadai dari perajin untuk selalu mengembangkan inovasi produk baik terhadap model dan kualitas bahan baku. Kendala permodalan juga masih dihadapi oleh perajin dalam mengembangkan usaha. Masih minimnya aksesibilitas pembiayaan usaha melalui lembaga keuangan khususnya perbankan menjadi permasalahan klasik.

Dari sisi kelembagaan, masih kurangnya dukungan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam proses pendampingan dan pembinaan perajin sasirangan untuk pemberdayaan usahanya, baik melalui pelatihan sumberdaya manusia maupun pemanfaatan teknologi tepat guna. Kurangnya dukungan Dinas Pariwisata dalam proses promosi dimana industri produksi sasirangan dapat dijadikan sebagai suatu tempat destinasi wisata edukasi, sehingga perajin melakukan promosi secara individu untuk meningkatkan hasil penjualannya. Kurangnya dukungan Dinas Koperasi khususnya dalam pembinaan koperasi atau kelompok-kelompok perajin sasirangan agar dapat mengembangkan usahanya melalui manajemen kelompok.

2. Industri Pendukung

a. Industri Sasirangan Primer.

Industri Sasirangan primer merupakan sumber bahan baku dari industri kerajinan sasirangan. Keberadaan Industri primer ini tidak berada dalam suatu wilayah yang sama dengan lokasi industri kerajinan sasirangan, meskipun demikian yang penting adalah terdapatnya suatu yang tak terputus. Perusahaan penyedia bahan baku merupakan bagian dari industri pendukung.

b. Industri Pelapis Permukaan.

Industri ini menyediakan bahan-bahan untuk melapisi permukaan sasirangan yang menjadi proses *finishing* dalam produk sasirangan. Peranan industri ini sangat penting dalam memberikan nilai tambah produk sasirangan.

c. Industri Pengemasan dan Jasa Transportasi.

Industri pengemasan dan jasa transportasi merupakan industri pendukung dalam membantu kelancaran usaha industri kerajinan sasirangan dalam memenuhi permintaan pasar.

3. Industri Penyedia Jasa

Dukungan penelitian dan pemberdayaan baik itu milik pemerintah dan swasta akan memberikan kontribusi sebagai contoh dalam bahan baku baru (alternatif) dan sifat-sifatnya, serta uji kualitas produk.

Sementara khusus untuk produk sasirangan berorientasi ekspor, peran jasa pelabuhan atau kepabeanan menjadi sangat penting agar dapat mempertahankan daya saing. Prosedur kepabeanan perlu dipermudah tanpa mengurangi pengawasan agar pengiriman barang ekspor sesuai dengan jadwal kontrak dan biaya-biaya yang ditimbulkan tidak membebani industri. Lembaga keuangan seperti perbankan daerah memiliki peranan yang penting untuk mendukung permodalan yaitu modal kerja dan investasi dalam peningkatan kemampuan produksi industri kerajinan sasirangan.

4. Lembaga Pendukung

a) Pemerintah Daerah, b) Pemerintah Pusat, c) Asosiasi Perajin Sasirangan, d) Kamar Dagang dan Industri (KADIN), e) Perguruan Tinggi, f) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan.

2. Analisis posisi strategis industri kerajinan sasirangan kota Banjarmasin

Analisis *Strengths, Weakness, Opportunity* dan *Threats* (SWOT) merupakan teknik analisis yang dapat memetakan posisi strategis keberadaan industri kerajinan sasirangan. Analisis SWOT adalah indentifikasi terhadap berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang

dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengambilan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan (Rangkuti, 2000).

Pemetaan posisi strategis industri kerajinan sasirangan di Kota Banjarmasin Berikut adalah identifikasi faktor- faktor posisi strategis industri kerajinan sasirangan di Kota Banjarmasin. Faktor kekuatan dalam matrik SWOT mencakup beberapa komponen yang menjadi kekuatan internal industri kerajinan sasirangan yaitu antara lain keberadaan dalam kluster, ketersediaan tenaga kerja, stabilitas harga produk, adanya pola kemitraan, keterampilan dan proses produksi yang sederhana, potensi pasar, kualitas bahan baku dan fleksibilitas diversifikasi usaha.

Di sisi lain industri kerajinan sasirangan memiliki beberapa kendala internal antara lain keterbatasan aksesibilitas modal, penguasaan teknologi yang rendah dan kualitas manajerial rendah, terbatasnya pasar dan masih rendahnya inovasi produk. Sementara dari sisi eksternal, industri kerajinan sasirangan memiliki beberapa peluang yaitu membaiknya kondisi perekonomian sehingga permintaan semakin meningkat, adanya dukungan pemerintah dan peluang pasar internasional. Ancaman juga akan dihadapi industri antara lain dinamika bisnis dan perekonomian dan dinamika pasar global yang semakin cepat dan tanpa ada batas antar negara.

Tabel 1 : Diagram Matriks SWOT Posisi Strategis Industri Kerajinan Sasirangan

<p style="text-align: center;"><u>Strategi S-O</u></p> <p>Strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, yaitu:</p> <p style="text-align: center;">“Strategi Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Produksi Untuk Perluasan Pasar”</p>	<p style="text-align: center;"><u>Strategi W-O</u></p> <p>Strategi yang meminimalisir kelemahan untuk memanfaatkan peluang:</p> <p style="text-align: center;">“Strategi Peningkatan Intensitas Pelatihan Untuk Spesialisasi Produk dan Dukungan Modal Guna Meningkatkan Kapasitas Produksi ”</p>
<p style="text-align: center;"><u>Strategi S-T</u></p> <p>Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman</p> <p style="text-align: center;">“Strategi Peningkatan ketrampilan dan Investasi Guna Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Produksi Untuk Mencapai Efisiensi”</p>	<p style="text-align: center;"><u>Strategi W-T</u></p> <p>Strategi yang meminimalisir kelemahan untuk mengatasi ancaman</p> <p style="text-align: center;">“Strategi Penggunaan Teknologi Tepat Guna dan Mendatangkan Investor”</p>

Beberapa strategi terpadu tersebut adalah (1) Strategi meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi untuk perluasan pasar, (2) Strategi peningkatan intensitas pelatihan untuk spesialisasi produk dan dukungan permodalan, (3) Strategi peningkatan ketrampilan dan investasi untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi untuk mencapai efisiensi, (4) Strategi penggunaan teknologi tepat guna dan meningkatkan daya tarik investasi

3. Analytical Hierarchy Process (AHP) Industri Kerajinan Sasirangan

Berdasarkan hasil analisis dengan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) pada sepuluh orang yang dianggap *expert* dalam pengembangan industri kerajinan sasirangan, diperoleh hasil sebagaimana bahwa strategi pemasaran menjadi faktor prioritas yang menentukan prospek kerajinan sasirangan di Kota Banjarmasin. Keterbatasan perajin dalam mengakses pasar menjadi kendala utama bagi para perajin dalam memasarkan produk sasirangan. Promosi merupakan salah satu aspek penting dalam pemasaran terutama memberikan informasi pada pasar mengenai produk yang dijual. Teknik pemasaran melalui media digital menjadi pilihan prioritas

dibandingkan dengan pemasaran lokal dan rencana cluster yang selama ini dilakukan. Media digital dianggap sebagai media paling efektif sejalan dengan semakin berkembangnya teknologi informasi.

Pemerintah Kota Banjarmasin wajib memiliki program bidang pemasaran yang dilakukan melalui promosi besar-besaran dibidang pariwisata ke manca Negara melalui Sasirangan Pewarna Alam karena Sasirangan ramah lingkungan ini mempunyai market besar di dunia Internasional, sedangkan untuk pasar nasional bisa menggunakan sasirangan konvensional dengan motif yang sederhana dan warna pastel sedangkan untuk pasar lokal tetap dengan warna terang dengan design penuh corak yang paling disukai oleh masyarakat lokal.

Berdasarkan hasil analisis AHP diketahui bahwa pemberdayaan industri kerajinan sasirangan merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan guna mewujudkan kerajinan sasirangan yang memiliki kemampuan bersaing (*competitive advantage*) di pasar domestik, regional maupun internasional, dengan mengemban misi peningkatan mutu produk, memperluas pangsa pasar dan memperkuat jaringan pemasaran bagi produk-produk sasirangan. Sementara itu lingkungan strategis industri sasirangan masih dihandalkan pada berbagai kendala baik intern maupun ekstern. Kendala intern terlihat dari rendahnya mutu SDM, terbatasnya modal, teknologi dan kerjasama usaha. Sedangkan kendala ekstern ditandai oleh belum kondusifnya lingkungan bisnis dan belum memadainya infrastruktur.

Disisi lain industri sasirangan mempunyai celah-celah yang dapat menjadi peluang untuk bangkit dalam memenangkan persaingan yaitu globalisasi dan reformasi ekonomi, keberpihakan pemerintah yang kuat terhadap industri Sasirangan oleh karena itu industri kerajinan sasirangan ditantang untuk meningkatkan daya saing dan pangsa pasarnya, menguatkan dan memperluas basis usaha dan kewirausahaannya, memperkuat struktur dunia usaha yang diisi oleh UMKM dan memulihkan serta mengembangkan kemampuan untuk keluar dari krisis ekonomi maupun pandemic COVID-19 yang saat ini sedang dihadapi. Untuk kepentingan tersebut, dukungan Pemerintah terhadap pemberdayaan industri kerajinan sasirangan menjadi faktor sangat penting.

Pemerintah seyogyanya mampu membuat berbagai kebijakan yang memperkuat daya tarik industri kerajinan sasirangan seperti menciptakan iklim usaha yang baik yang didukung oleh tumbuhnya kemitraan dari industri hulu dan hilir maupun kemudahan mendapatkan HKI. Selain itu juga, diperlukan juga kebijakan Pemerintah yang memperkuat daya dukung faktor-faktor pendorong daya saing industri kerajinan Sasirangan yang terkait dengan ketersediaan bahan baku Sasirangan yang semakin sulit didapat, dukungan permodalan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam melakukan inovasi produk.

PENUTUP

Dari tiga model analisis yang di gunakan dalam penelitian diperoleh hasil untuk pemberdayaan ekonomi industri kerajinan sasirangan secara optimal adalah sebagai berikut : 1) Berdasarkan hasil analisis rantai nilai diketahui bahwa rantai nilai kerajinan sasirangan terdiri dari; Pemasok, Produsen produk sasirangan dan Konsumen akhir. Kendala yang dihadapi perajin di tingkat hulu yaitu proses produksi kekurangan pasokan bahan baku kain yang berasal dari pulau Jawa dan modal. Sedangkan kendala di hilir kurangnya kolaborasi pentahelix ABCGM (Akademisi, Pelaku Bisnis, Komunitas, Pemerintah dan Media) dalam proses pemasaran dan sarana pameran produk hasil kerajinan sasirangan di tingkat nasional maupun global.

2) Berdasarkan hasil analisis SWOT, diperoleh hasil pemetaan posisi strategis industri kerajinan sasirangan ada pada kuadran II yang menandakan industri cukup kuat namun menghadapi tantangan yang besar, hasil ini mengindikasikan pada strategi peningkatan ketrampilan dan keahlian serta investasi untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi untuk mencapai efisiensi.

3) Hasil Analytical Hierarchy Process (AHP) posisi strategis industri kerajinan sasirangan berada pada skenario yang optimis. Untuk menjalankan skenario optimis dalam pemberdayaan industri kerajinan sasirangan dibutuhkan strategi prioritas yaitu strategi pemasaran terutama melalui *Digital Marketing*.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyana, A. and Sukayasa, K. W. (2009) *Kajian Karakteristik Bahan Baku dan Proses Produksi Kria Tradisional Anyaman di Tasikmalaya Jawa Barat*. Bandung.
- Dedi Purwana ES.2017."Pemanfaatan Digital Marketing Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Malaka Sari, Duren Sawit". *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani (JPMM)*. Vol. 1 No. 1 Juli
- Intan, A.H. E., Gumbira, S., dan Saptono I. T. 2003. *Strategi Pengembangan Industri Pengolahan Sabut Kelapa Nasional (Strategy on the Development of National Coir Processing Industry)*. *Jurnal Manajemen & Agribisnis*. Vol. 1 No. 1 April 2003. P. 42-54.
- Kodrat, D. S. *Manajemen Strategi: Membangun Keunggulan Bersaing Era Global di Indonesia Berbasis Kewirausahaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu

- Kuncoro, M. 2001. *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- Kurniawan Paulus K dan Supomo, I. A. 2003. *Analisis Formasi Kerekaitan, Pola Kluster dan Orientasi Pasar: Studi Kasus Sentra Industri keramik di kasongan Kabupaten Bantul D.I Yogyakarta*. *Jurnal Empirika*, Volume 16. Juni. No.1. p. 1-20.
- Lila Bismala, 2016. “*Model Manajemen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk Meningkatkan Efektivitas Usaha Kecil Menengah*”. *Jurnal Entrepreneur dan Entrepreneurship*, Volume 5, Nomor 1, Hal 23
- Ni Nyoman Sunariani , AAN. Oka Suryadinatha Ida IDM Rai Mahaputra. 2017 “*Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Program Binaan di Provinsi Bali*” *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis* :Volume 2 No 1.Hal 5-16
- Supriyadi, H. (2007) *Kewirausahaan UMKM, Pemikiran dan Pengalaman; Membangun Hubungan Pemasaran Relational pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Surabaya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soebagiyo, D. dan Wahyudi, M. 2008. Analisis Kompetensi Produk Unggulan Daerah Pada Batik Tulis dan Cap Solo di Dati II Kota Surakarta. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 9. No. 2. Desember. Hal 184-197.
- Sondhy Purwoko, Agung Budi Darmawan.2015.”*Model Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan One Village One Product (OVOP) Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional dan Globa*”*l*.Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah.

Dampak Relokasi Pasar Tradisional terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang di Pasar Kertosono Kabupaten Nganjuk

Ermita Yusida¹⁾, Frada Nadya Megatara Putra^{2)*}, Hadi Sumarsono³⁾

^{1) 2) 3)} Universitas Negeri Malang, Indonesia

* E-mail corresponding author: ermita.yusida.fe@um.ac.id

Received: 28-02-2021;
Accepted: 18-03-2021;
Available online: 30-04-2021

Ecoplan Vol. 4 No. 1, April 2021,
hlm 54-66.

ISSN p: 2620-6102
e: 2615-5575

Keywords: Kertosono
Market traders, market
relocation, socio-
economic impact

Abstract - This study aims to determine traders' responses regarding the relocation policy of Kertosono Market, accessibility to the Kertosono Market before and after relocation, the impact of the relocation of Kertosono Market social-economic conditions of traders. This research is quantitative descriptive. The population in this study were all traders who sell at Kertosono Market. The results showed that 83.07% of respondents did not agree with the relocation. Accessibility to Kertosono Market before and after relocation was 63.07% of the respondents' residences were > 1 km away before relocation, 55.38% were > 1 km out after relocation. The impact of relocating Kertosono Market on the social-economic conditions was 92.30% of respondents were comfortable selling, 7.69% encountered problems, 96.92% were able to advance, and after relocation, namely 84.61% of respondents were uncomfortable when selling, 15.38% found no issues, 92.30% were unable to progress. After relocation, the economic condition of traders increased by 81.53% in the very low classification, decreasing 33.84% in the high category. Therefore, capital assistance for small traders is very much needed. So, in addition to providing capital assistance, the government should also offer training in the form of financial planning and digital marketing so that traders can expand their business. In the future, there needs to be a particular study regarding the comparison of traders in traditional markets and modern markets.

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggapan pedagang menyikapi kebijakan relokasi Pasar Kertosono, aksesibilitas menuju Pasar Kertosono sebelum dan sesudah relokasi, dampak relokasi Pasar Kertosono terhadap kondisi ekonomi sosial pedagang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pedagang yang berjualan di Pasar Kertosono. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 83,07% responden tidak setuju dengan adanya relokasi. Aksesibilitas menuju Pasar Kertosono sebelum dan sesudah relokasi yaitu 63,07% tempat tinggal responden berjarak >1 Km sebelum relokasi, 55,38% berjarak >1 Km setelah relokasi. Dampak relokasi Pasar Kertosono terhadap kondisi ekonomi sosial pedagang sebelum relokasi yaitu 92,30% responden nyaman saat berjualan, 7,69% menjumpai permasalahan, 96,92% dapat maju, dan sesudah relokasi yaitu 84,61% responden tidak nyaman saat berjualan, 15,38% tidak menjumpai permasalahan, 92,30% tidak dapat maju. Kondisi ekonomi pedagang sesudah relokasi meningkat 81,53% pada klasifikasi sangat rendah, menurun 33,84% pada klasifikasi tinggi. Bantuan modal bagi pedagang kecil ini sangat dibutuhkan. Sehingga, selain bantuan modal, pemerintah juga harus memberikan edukasi mengenai perencanaan keuangan dan digital marketing agar pedagang dapat melakukan ekspansi usahanya. Kedepan, perlu adanya telaah lebih lanjut mengenai perbedaan pedagang pasar tradisional dan pasar modern baik dari sisi ekonomi maupun sosialnya.

Kata Kunci: pedagang Pasar Kertosono, relokasi pasar, dampak sosial ekonomi.

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan jaman dan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat di segala sektor kehidupan, maka masyarakat dituntut untuk dapat mempunyai penghasilan yang lebih untuk memenuhi segala macam kebutuhannya. Oleh karena itu, masyarakat tidak hanya mengandalkan satu mata pencaharian. Bahkan dewasa ini masyarakat mulai berani meninggalkan mata pencaharian yang dinilai kurang untuk mencukupi kebutuhan hidup, yaitu mata pencaharian di sektor pertanian. Susilowati (2014) menemukan bahwa dari tahun 2013 hingga 2017 jumlah tenaga kerja di sektor pertanian semakin berkurang.

Sektor pertanian mulai ditinggalkan sebagai mata pencaharian utama masyarakat salah satu dipengaruhi oleh faktor pendapatan dan tingkat upah tenaga kerja pertanian yang rendah disertai dengan pandangan bahwa pertanian tidak menjamin kontinuitas dan stabilitas pendapatan serta beresiko tinggi (Susilowati, 2016). Sebagian masyarakat memilih berdagang untuk meningkatkan pendapatannya. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti, banyak masyarakat yang beralih menjadi pedagang karena dinilai keuntungan yang diperoleh dari berdagang mampu untuk mencukupi kebutuhannya selama masih banyaknya minat pembeli dan adanya tempat untuk berdagang salah satunya yaitu pasar tradisional.

Pasar tradisional yakni pasar yang dikelola sekaligus dibangun oleh BUMD, BUMN, pemerintah, maupun pihak swasta (Perpres RI No. 112 Tahun 2007). Bentuk kerjasama yang dilakukan dengan pihak swasta dapat berupa kerjasama tempat usaha yang dioperasikan oleh pedagang, koperasi, maupun swadaya masyarakat, di mana proses jual beli dilakukan dengan tawar menawar. Pendirian pasar tradisional harus memenuhi persyaratan yakni setiap 100 m² harus menyiapkan tempat parkir minimal untuk satu unit kendaraan beroda empat, luas lapak dagang memperhitungkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat, serta menjamin pasar tradisional tetap tertib, aman, bersih, higienis, sehat, dan menyediakan ruang publik yang nyaman.

Seiring dengan perkembangan jaman dan perkembangan teknologi, berdirinya pusat perbelanjaan modern mendesak keberadaan pasar tradisional (Pramudyo, 2014). Pusat perbelanjaan modern menawarkan pelayanan yang lebih baik dan nyaman sehingga masyarakat akan memilih untuk berbelanja di *supermarket*, *minimarket*, dan *hypermarket* (Nurjanah, 2020). Semakin banyaknya pasar modern menyebabkan pasar tradisional mulai dilupakan dan diabaikan. Adanya sebagian masyarakat yang menganggap bahwa pasar tradisional itu tidak nyaman, kotor, dan barang yang ditawarkan tidak berkualitas menyebabkan pasar tradisional semakin tertinggal. Anggapan tersebut sesuai dengan kondisi fisik pasar tradisional yang tua tanpa renovasi yang menyebabkan pasar tradisional semakin kalah saing dengan ritel modern (Muslimin, Indriati and Widayanti, 2018). Bahkan, pasar tradisional dianggap sebagai *slum area* yang mengakibatkan pembeli beralih ke pasar modern (Masitoh, 2013).

Apabila diamati lebih lanjut, pasar tradisional memiliki kelebihan secara sosial dibandingkan dengan pasar modern. Misalnya, kegiatan tawar menawar yang sebenarnya dapat menciptakan kontak sosial tersendiri antara pedagang dan pembeli yang tidak akan ditemui di pasar modern (Yudha, 2017). Barang yang ditawarkan penjual memiliki kualitas setara bahkan sama dengan barang yang dijual di pasar modern. Contohnya, buah dan sayur yang masih segar, sembilan bahan pangan pokok yang berkualitas, serta pakaian yang memiliki kualitas dan harga beragam, dari yang mahal sampai yang harganya murah, sehingga konsumen dapat menyesuaikan dengan *budget* yang dimiliki. Berbanding terbalik dengan pasar modern di mana tidak ada kegiatan tawar-menawar dikarenakan harga sudah ditentukan.

Pasar tradisional memiliki peran penting dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan menyediakan lapangan kerja untuk warga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah (Ars, 2015). Pasar tradisional juga berfungsi untuk meningkatkan pendapatan. Di pasar tradisional juga terbentuk komunitas yang anggotanya berasal dari berbagai unsur, mulai dari pedagang, kuli angkut, tukang becak, pedagang kaki lima, pembeli, hingga para *supplier*. Oleh sebab itu, pasar tradisional harus dipertahankan eksistensinya sebagai sarana interaksi sosial budaya dan sarana konsepsi hidup (Aliyah, Setioko and Wisnu, 2015).

Sampai saat ini pasar tradisional Kertosono atau disebut Pasar Kertosono menjadi pusat kegiatan sosial ekonomi bagi masyarakat Kertosono karena Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk telah berkomitmen untuk menjaga eksistensi pasar tradisional. Tujuannya, agar pasar tradisional tetap terjaga keberadaannya karena merupakan sektor utama perekonomian masyarakat Kertosono dan merupakan salah satu aset daerah. Pasar Kertosono masih bertahan di tengah maraknya pasar modern yang sudah berkembang pada saat ini. Pasar Kertosono masih menjadi tumpuan warga masyarakat Kecamatan Kertosono terutama di Kelurahan Banaran dan sekitarnya sebagai sumber pendapatan sehari-hari untuk

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian, perlu dilakukannya relokasi ke tempat lain karena musibah yang menimpa Pasar Kertosono lama yaitu kebakaran atau bencana alam yang dialami seluruh pedagang Pasar Kertosono mengakibatkan kerugian besar-besaran bagi seluruh pedagang. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, lokasi Pasar Kertosono baru menempati bekas tempat imigrasi dan halaman Balai Kelurahan di Jalan Ronggo Warsito.

Kondisi Pasar Kertosono Baru setelah relokasi sangat berbeda dengan kondisi di Pasar Kertosono Lama. Setelah relokasi pasar ini diberlakukan adanya persamaan rata lapak (bedak toko) yang sebelumnya pada pasar lama pedagang ada yang mempunyai lapak berukuran lebih besar daripada pedagang yang lain. Lalu adanya sistem zonasi yang berfungsi untuk penataan pedagang. Akan tetapi dengan adanya sistem zonasi masih belum optimal dan masih berantakan, mengingat pembeli yang mempunyai pedagang langganan akan sulit untuk mencari atau mengingat pedagang A berdekatan dengan pedagang B. Maksud diadakannya sistem zonasi yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah adalah untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada konsumen serta memudahkan pembeli dalam mendapatkan barang. Tentu saja dengan adanya sistem zonasi membuat persaingan pedagang meruncing karena pedagang yang menjual barang dagangan sejenis berada dalam satu lokasi yang sama, sehingga persaingan untuk mendapatkan pelanggan juga semakin kuat.

Hal ini tentunya dapat berpengaruh pada kondisi ekonomi pedagang dimana dengan lokasi berdagang yang berbeda dan juga kondisi pasar yang berbeda dapat berpengaruh pada pendapatan pedagang. Pasca relokasi kondisi sosial pedagang tentu juga akan mengalami perubahan terutama dari segi Paguyuban yang terbentuk oleh pedagang di Pasar Kertosono lama ini tentunya akan mempengaruhi kondisi sosial pedagang setelah relokasi pasar terjadi. Kebaruan dari penelitian ini yaitu tidak hanya melihat dari kondisi ekonomi saja tetapi juga melihat dari persepsi masyarakat dengan lokasi pasar yang baru dalam kemajuan usahanya kedepan.

Berdasarkan pemaparan masalah di atas, peneliti bermaksud untuk mengetahui secara mendalam terkait kondisi sosial ekonomi pedagang terdampak relokasi pasar. Peneliti tergerak untuk melakukan riset yang berjudul "Dampak Relokasi Pasar terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang di Pasar Kertosono Kabupaten Nganjuk". Tujuan umum riset ini adalah untuk mengetahui dampak relokasi Pasar Kertosono terhadap kondisi ekonomi dan kondisi sosial pedagang, serta sebagai evaluasi jalannya instansi dengan kesesuaian teori dan keadaan ideal yang diharapkan.

TINJAUAN PUSTAKA

Relokasi

Tarigan (2006) menyebutkan teori lokasi sebagai suatu ilmu yang menelusuri tentang alokasi geografis dari berbagai sumber yang berpotensi, serta kaitannya dengan keberadaan bermacam-macam aktivitas. Selain itu, Sari (2006) menyebutkan relokasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan mengonstruksi kembali prasarana umum, perumahan, meliputi tanah produktif di tempat lainnya. Perencanaan dan pembangunan relokasi akan berdampak pada *stakeholder* di dalamnya. Lokasi pada berbagai aktivitas seperti pertokoan, rumah tangga, pertanian, sekolah, rumah sakit, hingga tempat ibadah menunjukkan susunan dan pola yang dapat dipejari dan dipahami.

Tempat relokasi dan lokasi yang baru merupakan faktor utama dalam perencanaan relokasi, sebab lokasi sangat menentukan tingkat aksesibilitas ke tempat usaha, pekerjaan lapangan usaha, jaringan sosial, dan peluang pasar (Musthofa, 2011). Masing-masing tempat memiliki peluang dan keterbatasan tersendiri. Pemilihan lokasi yang memiliki karakteristik sama baik dengan kawasan yang sebelumnya akan meningkatkan kemungkinan berhasilnya relokasi dan pemulihan pendapatan pedagang. Musthofa (2011) menyatakan bahwa untuk mempertahankan ikatan masyarakat dan jaringan sosial yang terjalin dengan baik sebelumnya maka sebaiknya tempat relokasi baru dekat dengan tempat lama.

Di bawah ini adalah persyaratan yang harus dilengkapi untuk mencapai keseimbangan ekonomi ruang (Losch, 1954):

- 1) Pembeli memiliki sikap *indifferent* terhadap penjual mana pun dan harga yang rendah merupakan satu satunya pertimbangan untuk membeli barang tersebut.
- 2) Masing-masing tempat usaha menjamin keuntungan maksimal bagi pembeli maupun penjual.
- 3) Banyak usaha pertanian yang menyebar secara merata sehingga seluruh permintaan konsumen dapat dipenuhi.

Pasar

Menurut Wicaksono dalam Hasnawati (2016) pasar adalah interaksi antara pembeli dan penjual yang melayani transaksi jual beli. Pasar sebagai area perdagangan barang maupun jasa dengan lebih dari satu penjual, baik dalam bentuk pasar tradisional, pusat perdagangan, pusat perbelanjaan, *plaza*, *mall*, dan lain sebagainya (Permendagri No. 70/M- DAG/PER/12/2013)

Masyarakat secara umum mengetahui dua jenis pasar yaitu pasar modern dan pasar tradisional. Keduanya memiliki karakteristik yang berbeda apabila dipandang dari sudut pandang tempat berdagang, bangunan, dan sistem jual beli yang ada. Pada umumnya, pasar tradisional terdiri deretan tenda yang bersifat non-permanen, dan lingkungan yang kotor, bau, becek sehingga pembeli merasa tidak nyaman dan tidak aman. Menurut Izza (2010), pasar modern umumnya mempunyai fasilitas memadai, bangunan megah dan permanen, banyaknya diskon yang ditawarkan, aman, nyaman, dan harga yang tercantum adalah tetap, tidak bisa ditawar. Wiryomartono (1995) mendefinisikan pasar tradisional sebagai tempat terjadinya peristiwa interaksi ekonomi dan interaksi sosial yang berkembang secara periodik. Kata pasar berasal dari Bahasa Jawa yaitu 'peken' yang artinya kumpul.

Widodo (2008) mendefinisikan pasar modern sebagai pasar yang didirikan oleh pihak swasta, pemerintah, atau koperasi, seperti *Supermarket, Mall*, dan pusat perbelanjaan yang dikelola secara modern dan memprioritaskan rasa nyaman bagi konsumen dalam berbelanja, pengelolaan dipegang oleh satu tangan, dilengkapi dengan harga yang pasti, dan modal usaha yang relatif besar. Muta'ali (2015) mengemukakan bahwa pasar modern tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan pasar tradisional. Perbedaannya, di pasar modern, konsumen dan pedagang tidak melakukan transaksi secara langsung. Konsumen cukup melihat label harga yang tertera, pelayanan dilakukan oleh pramuniaga maupun secara mandiri, dan berada di dalam bangunan besar.

Kondisi Sosial Ekonomi

Kemudian, masyarakat dikelompokkan menurut kondisi sosial ekonomi menjadi kelompok bawah, menengah, dan atas berdasarkan tingkat pendapatan dan lingkungannya (Koentjaraningrat, 1981). Kondisi sosial ekonomi diartikan sebagai berbagai hal yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan. Kondisi sosial dan ekonominya masyarakat dapat dilihat dari tingkat pendidikan, tingkat pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pekerjaan, dan kesehatan (Melly G.Tan dalam Hasnawati, 2016). Notoadmodjo dalam Hasnawati (2016) berpendapat bahwa kondisi ekonomi dan sosial sebagai suatu konsep, yang dapat diukur melalui variabel tingkat pendidikan, variabel pendapatan keluarga, dan variabel pekerjaan. Hasnawati (2016) juga mengemukakan bahwa sosial ekonomi merupakan gambaran keadaan suatu masyarakat atau individu yang dilihat dari sudut pandang ekonomi dan sosial, seperti tingkat pendidikan, kesehatan, pendapatan dan indikator lainnya.

Kondisi sosial ekonomi mencerminkan kedudukan seseorang menempatkannya pada posisi tertentu di masyarakat yang diatur secara sosial. Pemberian posisi tersebut diikuti dengan kewajiban dan hak yang harus dilaksanakan oleh penerima status sosial ekonomi tersebut (Hasnawati, 2016).

Konsep Pedagang

Secara umum, pedagang dikenal sebagai badan atau individu yang menjual barang atau jasa kepada konsumen. Studi sosiologi ekonomi yang dilaksanakan oleh Mai dan Bucholt dalam Hasnawati (2016) tentang pedagang menemukan bahwa pedagang diklasifikasikan menjadi:

- 1) Pedagang semu: orang yang berdagang hanya untuk mendapatkan melakukan hobinya dan mengisi waktu luang. Ia tidak menjadikan kegiatan dagang sebagai sumber keuntungan, sehingga mungkin saja ia justru mengalami kerugian.
- 2) Pedagang semiprofessional: orang yang berdagang dan melakukan kegiatannya untuk mendapatkan uang, tetapi keuntungan dari hasil perdagangan tersebut bukanlah sumber pendapatan utama, melainkan sebagai sumber pendapatan tambahan.
- 3) Pedagang profesional: orang yang berdagang dan menganggap kegiatan berdagangnya sebagai sumber penghasilan utama bagi ekonomi keluarga.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pedagang yaitu orang yang berusaha untuk menjual barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dan membuat barang/jasa yang ditawarkannya semenarik mungkin untuk menarik konsumen.

METODE PENELITIAN

Riset ini adalah berjenis deskriptif kuantitatif berdasarkan angket yang telah disebar dengan jenis pertanyaan tertutup. Peneliti menetapkan populasi dalam riset ini yaitu semua pedagang yang berdagang di Pasar Kertosono dengan jumlah 654 orang, dan sampel sebanyak 65 orang yaitu 10 persen dari populasi dengan pertimbangan jumlah populasi yang relative kecil. pedagang dengan teknik *simple random sampling*. Perhitungan sampel ini berdasarkan pada Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, wawancara, dan observasi. Data hasil penelitian diolah melalui tahapan *editing* dan tabulasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tahun 2019.

HASIL DAN PEMBAHASAN

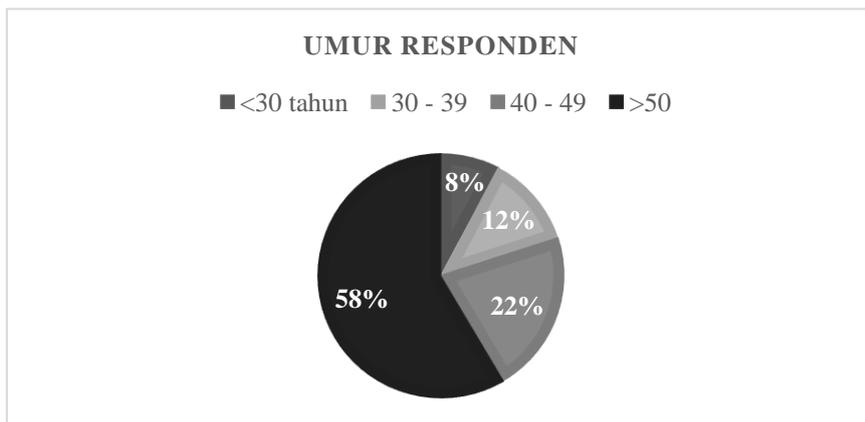
Riset yang dilakukan di Pasar Kertosono, diperoleh data sebagai berikut:



Gambar 1. Jenis Kelamin Pedagang di Pasar Kertosono

Sumber: Dokumen peneliti

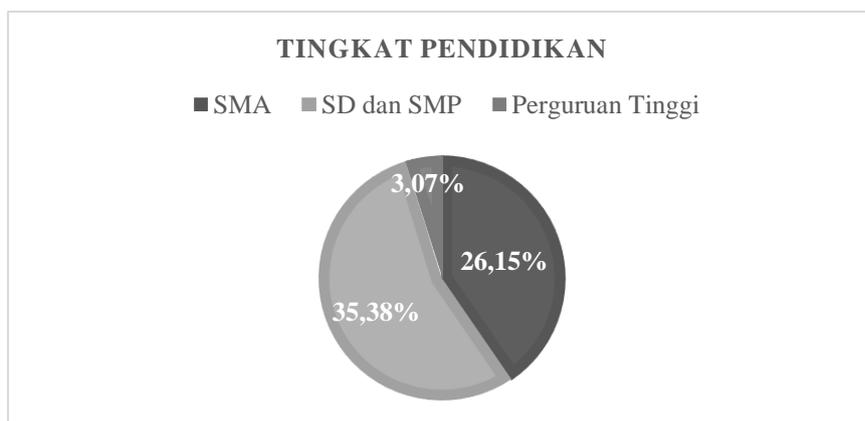
Berdasarkan data pada Gambar 1, diketahui bahwa mayoritas pedagang yang direlokasi di Pasar Kertosono berjenis kelamin perempuan dengan persentase mencapai 58%.



Gambar 2. Umur Pedagang di Pasar Kertosono

Sumber: Dokumen peneliti

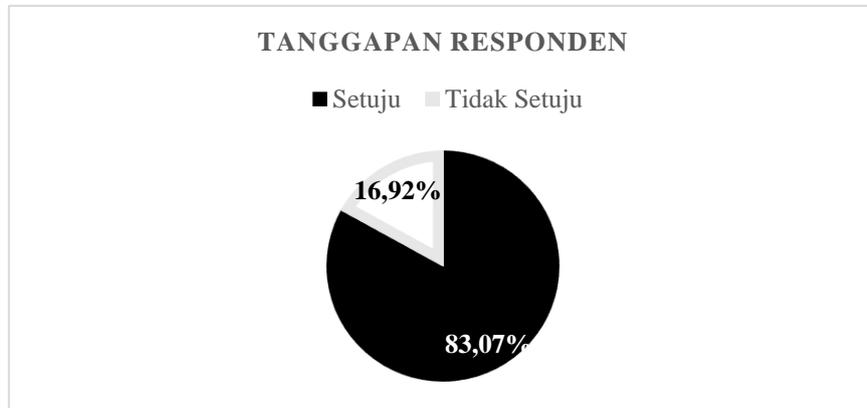
Berdasarkan Gambar 2, diketahui bahwa mayoritas pedagang di Pasar Kertosono adalah pedagang dengan usia kerja yang masih produktif. Responden yang berasal dari Kelurahan Banaran, Kecamatan Kertosono, dan beberapa Kecamatan terdiri dari beberapa desa yang berbeda, dengan dikelompokkan menjadi Banaran, Kertosono, dan Luar Kertosono. Pedagang terbanyak yaitu pedagang yang berasal dari Kelurahan Banaran yang berada di sekitar Pasar Kertosono dengan jumlah pedagang terbanyak yaitu mencapai 49,23% yang merupakan lokasi keberadaan Pasar Kertosono lama maupun Pasar Kertosono baru.



Gambar 3. Tingkat Pendidikan Pedagang di Pasar Kertosono

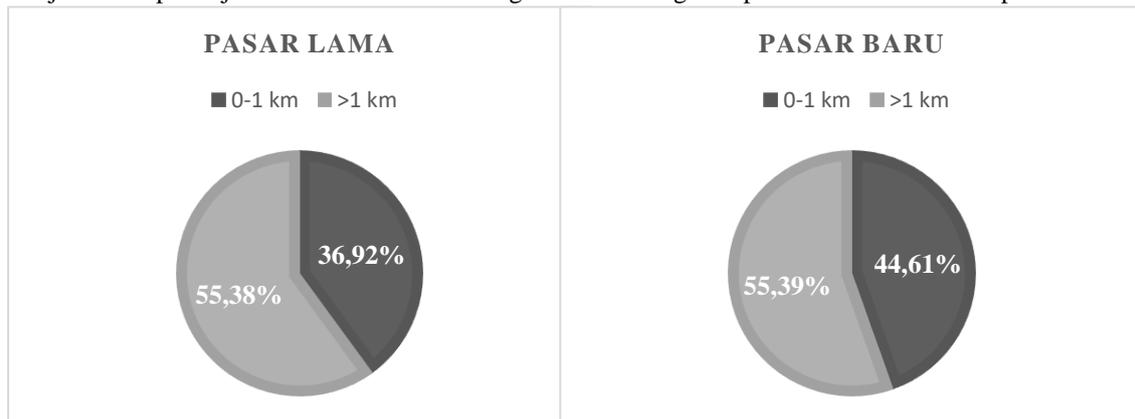
Sumber: Dokumen peneliti

Berdasarkan hasil penelitianv (Gambar 3), diketahui bahwa mayoritas pendidikan pedagang di Pasar Kertosono adalah SD dan SMP, sedangkan tidak ada pedagang yang tidak tamat sekolah dasar. Ini berarti seluruh pedagang di Pasar Kertosono merupakan orang terdidik dan melek huruf.



Gambar 4. Tanggapan Pedagang terhadap Relokasi di Pasar Kertosono
Sumber: Dokumen peneliti

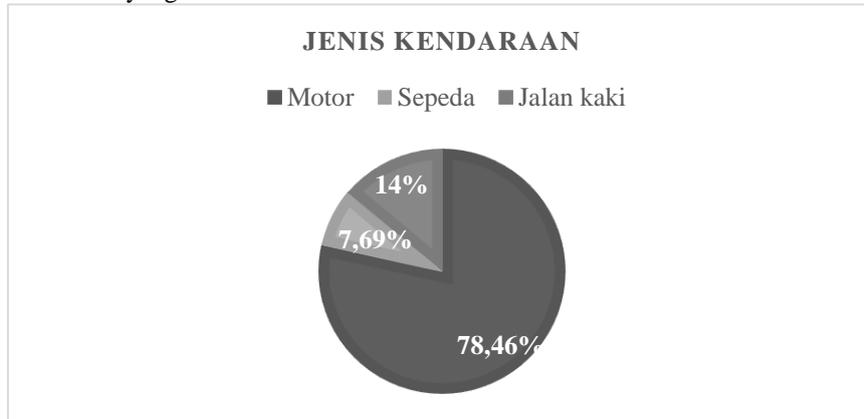
Berdasarkan grafik di atas (Gambar 4), diketahui bahwa mayoritas responden tidak setuju dengan adanya relokasi pasar. Pedagang tidak menyetujui adanya relokasi pasar karena tempatnya kurang luas, penataan lapak kurang rapi, dan masih kurangnya lahan parkir, serta tempat yang kurang strategis. Ketidaksetujuan pedagang tersebut sejalan dengan Zunaidi (2013) yang menemukan bahwa pedagang menolak direlokasi karena kekhawatiran mahalnnya harga lapak dan penurunan pendapatan. Akses jalan keluar masuk pasar kurang memadai menjadi salah satu alasan penolakan pedagang. Mengingat lahan yang digunakan relokasi pasar adalah lahan imigrasi dan lahan balai kelurahan. Hal tersebut selaras dengan hasil penelitian Manzanaris, Rares and Kiyai (2018) yang menyatakan bahwa sulitnya aksesibilitas ke pasar yang baru merugikan pedagang dan masyarakat sebagai konsumen. Sebanyak 16,92% responden menyatakan setuju terhadap kebijakan relokasi tersebut dengan alasan mengikuti peraturan dan tidak ada pilihan lain.



Gambar 5. Jarak Tempat Tinggal Pedagang dengan Pasar Kertosono
Sumber: Dokumen peneliti

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa sebanyak 36,92% responden rumahnya berjarak 0-1 km dengan Pasar Kertosono lama. Hal tersebut dikarenakan hampir dari setengah responden yang bertempat tinggal tidak jauh dari lokasi pasar lama. Setelah direlokasi sebanyak 44,62% responden rumahnya berjarak 0-1 km dengan Pasar Kertosono baru. Hal tersebut dikarenakan lokasi Pasar Kertosono baru lebih dekat dari lokasi Pasar Kertosono lama. Semakin jauhnya lokasi Pasar Kertosono baru menyebabkan sebanyak 55,38% responden harus menempuh jarak 1,1-2 km menuju Pasar Kertosono baru.

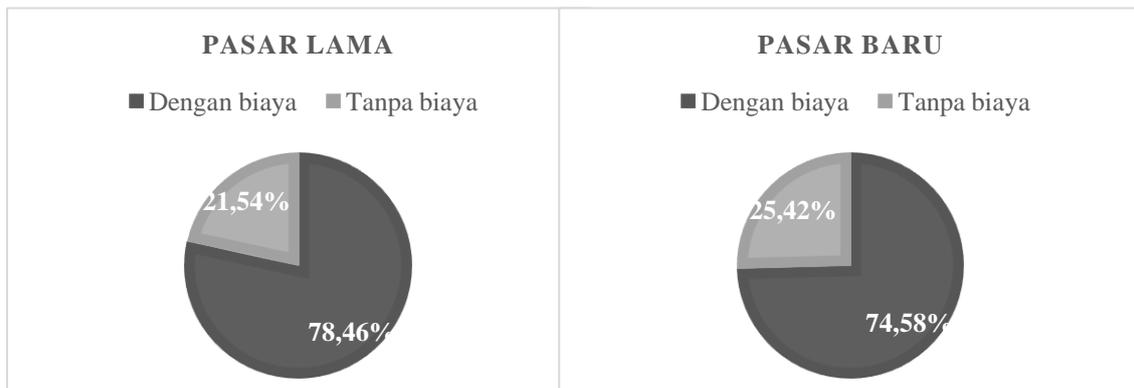
Jarak rumah responden dari pasar lama dan baru tidak berubah secara signifikan. Hal tersebut dikarenakan jarak pasar lama ke lokasi pasar baru berdekatan dan berlokasi sama yang berada di Kelurahan Banaran, sehingga hanya terdapat perubahan jarak pada beberapa responden saja dari pasar lama ke pasar yang baru. Hal tersebut berbeda dengan hasil penelitian (Susilowati, 2015) yang menunjukkan bahwa paska relokasi pasar, biaya transportasi yang dikeluarkan semakin besar.



Gambar 6. Jenis Kendaraan Pedagang di Pasar Kertosono
Sumber: Dokumen peneliti

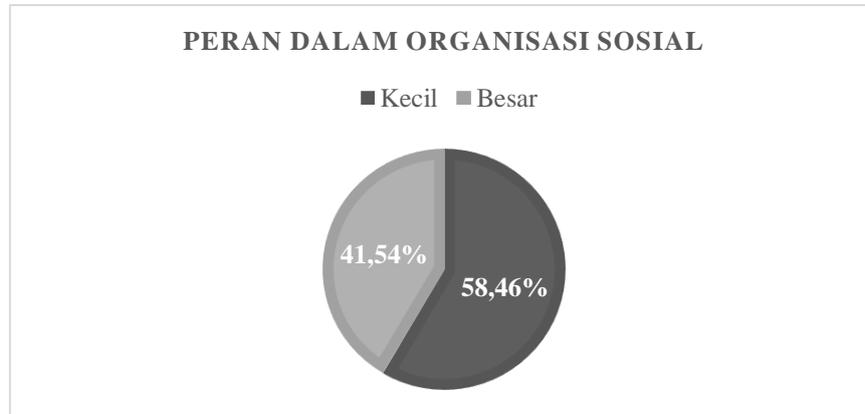
Berdasarkan data di atas (Gambar 6), dapat diketahui bahwa sebagian besar pedagang di Pasar Kertosono menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi menuju pasar. Setelah direlokasi terjadi perubahan jenis kendaraan yang dipakai responden, dikarenakan pasar baru yang lebih dekat daripada pasar lama, maka responden lebih memilih jalan kaki dan bersepeda.

Pedagang mengeluarkan biaya transportasi untuk menuju Pasar Kertosono sebelum dan sesudah relokasi setiap harinya berbeda-beda. Mayoritas responden mengeluarkan biaya transportasi untuk menuju lokasi pasar, baik sebelum direlokasi maupun sesudah direlokasi. Namun, persentase responden yang mengeluarkan biaya transportasi pasca relokasi mengalami penurunan (Gambar 7) dikarenakan lokasi Pasar Kertosono baru yang semakin dekat dengan tempat tinggal para pedagang.



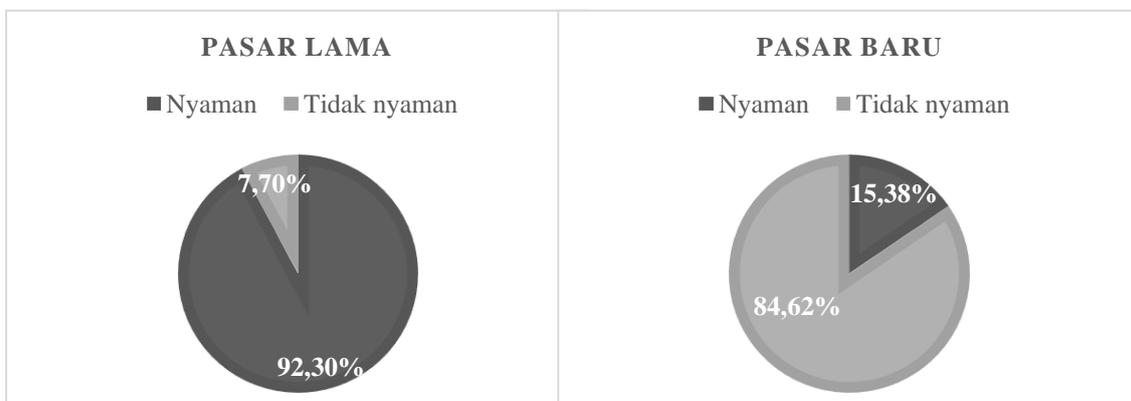
Gambar 7. Pedagang di Pasar Kertosono yang Mengeluarkan Biaya Transportasi.
Sumber: Dokumen peneliti

Peran pedagang dalam paguyuban di pasar lama dan pasar baru tidak jauh berbeda, hanya di pasar baru organisasi pedagang ditiadakan dikarenakan lokasi lapak yang masih belum tertata dengan rapi sehingga mempersulit untuk mengoordinir satu sama lain. Selaras dengan hasil penelitian Junaidi, Ramayanto and Nurlailatul (2018) yang menemukan bahwa belum adanya organisasi sosial pedagang paska relokasi karena interaksi yang kurang intens antar pedagang. Seberapa besar peran pedagang dalam paguyuban pasar tergantung dengan keaktifan dan posisi pedagang di dalam organisasi tersebut.



Gambar 8. Peran Pedagang dalam Organisasi Sosial di Pasar Kertosono
Sumber: Dokumen peneliti

Berdasarkan data di atas (Gambar 8), diketahui bahwa di pasar lama, mayoritas pedagang memiliki peran yang kecil, artinya pedagang tidak terlibat aktif dan hanya menjadi anggota organisasi pasif dengan alasan malas dan waktu kerja sudah cukup mengurus tenaga dan waktu. Sedangkan 41,54% pedagang memiliki peran yang besar karena responden sadar akan adanya organisasi pedagang di Pasar Kertosono dan menduduki jabatan yang penting dalam organisasi. Mereka merelakan waktu dan tenaganya lebih banyak demi kemajuan dan kerukunan bersama antar sesama pedagang.



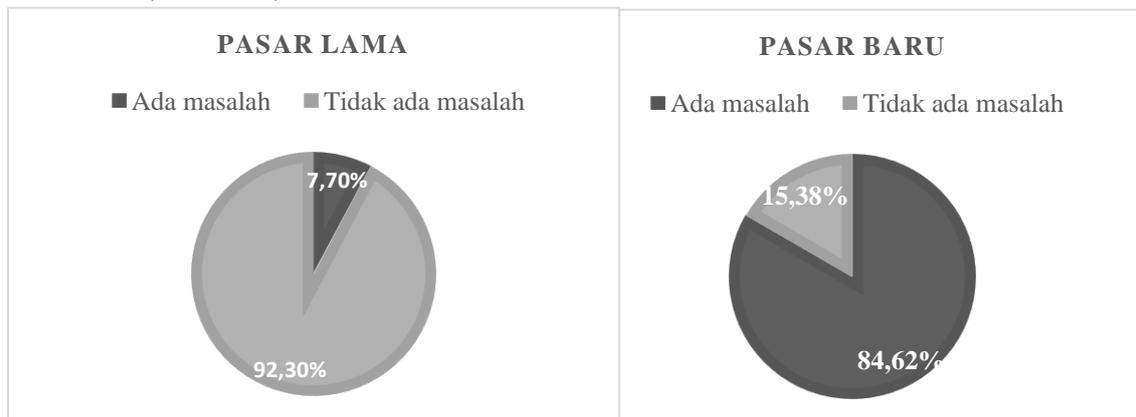
Gambar 9. Kenyamanan Pedagang Pasar Kertosono Sebelum dan Setelah Relokasi
Sumber: Dokumen peneliti

Berdasarkan grafik di atas (Gambar 9), diketahui bahwa mayoritas pedagang merasa tidak nyaman berada di Pasar Kertosono pasca relokasi. Rasa ketidaknyamanan yang dirasakan oleh pedagang dipicu oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah tempat berjualan. Pasar yang baru kurang luas (sempit) dan tidak tertata dengan rapi sesuai zona. Kedua, lahan. di lokasi pasar yang baru, lahan parkir yang cukup sempit sehingga seluruh konsumen yang mengunjungi Pasar Kertosono tidak dapat memarkir kendaraannya dengan nyaman. Ketiga, area berjualan. Tempat berjualan di Pasar Kertosono lama, menggunakan lapak permanen dengan menggunakan rool penutup, seperti bedak (toko) yang dibangun dengan biaya pedagang sendiri tanpa bantuan dari pemerintah, sehingga pasar terlihat luas dan tertata rapi untuk menyimpan barang yang ditinggal. Di lokasi pasar yang baru pedagang masih menggunakan lapak semi permanen dengan menggunakan bambu atau kayu. Kondisi lapak pedagang di pasar baru yang lebih sempit dan terbuat dari bambu atau kayu tersebut menjadi salah satu masalah dalam relokasi pasar sesuai dengan hasil penelitian

(Fauzi and Firdaus, 2019) yang menyatakan bahwa bangunan pasar baru tidak sesuai dengan ekspektasi pedagang sehingga menimbulkan protes dari pedagang pasar. Di pasar baru lokasinya kurang tertata dengan baik sesuai zona seperti di pasar lama, sehingga pedagang kehilangan pelanggan tetapnya. Dilakukannya relokasi Pasar Kertosono juga disayangkan oleh banyak pedagang karena kenyamanan yang berlawanan dengan pendapatan yang diperoleh pedagang, karena pendapatan yang semakin menurun dibandingkan sebelum terjadinya relokasi. Sejalan dengan Endrawanti and Wahyuningsih (2014) yang menyatakan bahwa pasar modern pasca relokasi terlihat lebih bersih, aman, dan nyaman namun tidak diikuti dengan kenaikan pendapatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan salah satu dampak negatif relokasi pasar bagi pedagang, sebagaimana Safitri (2020) yang menemukan bahwa pasar menjadi sepi pembeli pasca dilakukannya relokasi.

Pedagang merasa lebih nyaman di pasar lama sebelum relokasi disebabkan oleh beberapa faktor. Luasnya lokasi pasar merupakan faktor utama karena banyaknya pembeli dan lapak pedagang yang tertata dengan rapi sesuai zona-zona yang ditentukan. Lokasinya yang sangat luas dengan akses jalan yang baik untuk pengunjung atau pembeli maupun pedagang yang menuju pasar. Di pasar lama, ketersediaan lahan parkir luas, sehingga banyak calon konsumen yang datang untuk berbelanja di sana. Di pasar lama, pedagang juga menyatakan nyaman saat berjualan karena mereka sudah memiliki pelanggan tetap ketika berjualan lama di sana.

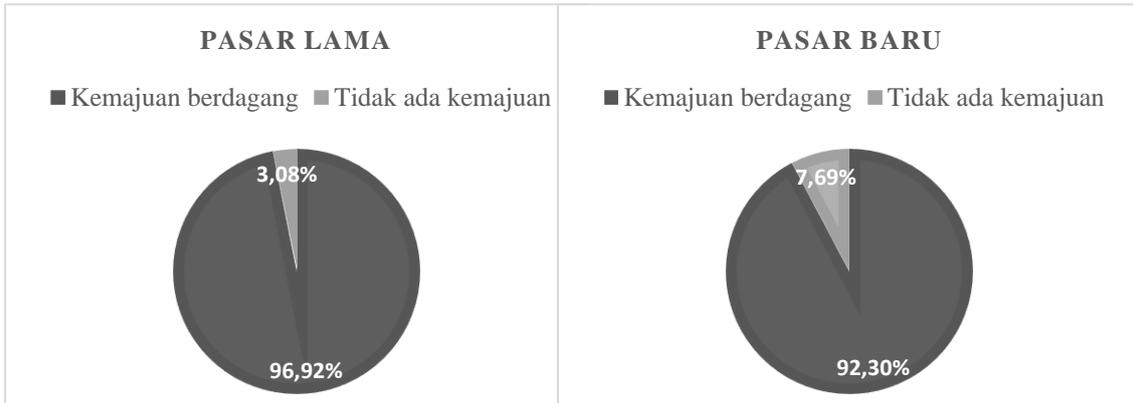
Selain rasa nyaman yang dirasakan pedagang saat berdagang, masalah lain berkaitan dengan relokasi pasar berhubungan dengan keamanan, kebersihan, keterbatasan lahan parkir, lapak yang sempit, dan lain sebagainya. Sebelum relokasi, sebanyak 92,30% responden tidak menjumpai permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan berdagang. Biasanya, masalah yang muncul di pasar lama yaitu masalah lingkungan pasar yang kotor. Tetapi, hal tersebut tidak menjadi permasalahan utama. Permasalahan besar yang dijumpai pedagang sebelum relokasi yaitu banyak pedagang yang kehilangan barang dagangan yang tidak dapat diselamatkan dari kebakaran pasar lama tersebut. Hal tersebut tidak diharapkan oleh semua pedagang, yang sebelum adanya kebakaran aktivitas dalam pasar aman dan berjalan dengan lancar. Intinya, selama berdagang di pasar lama, pedagang hanya menjumpai permasalahan kecil yang dapat langsung diselesaikan (Gambar 10).



Gambar 10. Permasalahan dalam berdagang di Pasar Kertosono Sebelum dan Setelah Relokasi

Sumber: Dokumen peneliti

Berdasarkan grafik di atas (Gambar 10) diketahui bahwa sesudah terjadinya relokasi, sebanyak 84,61% responden menjumpai masalah yang berarti selama berjualan, artinya terjadi peningkatan permasalahan yang dihadapi pedagang sebesar 76,94%. Permasalahan yang biasanya muncul di pasar baru yaitu: kenyamanan pedagang, sempitnya lokasi pasar dan terbatasnya lahan parkir, menjadikan pedagang dan konsumen kurang nyaman saat beraktivitas jual beli, dan sebagainya. Pada kenyataannya setelah masalah tersebut teratasi muncul permasalahan baru yang dihadapi pedagang, salah satunya menurunnya pendapatan pedagang setelah direlokasi ke lokasi pasar yang baru. Banyak bermunculan pedagang-pedagang menjadi salah satu keluhan yang menyebabkan menurunnya pendapatan pedagang dikarenakan akses jalan menuju ke pasar baru sempit, maka pelanggan mengurungkan niatnya yang hendak pergi pasar. Jumlah pembeli yang relatif tetap tidak sebanding dengan luas pasar baru yang lebih kecil dari luas pasar lama.



Gambar 11. Kepastian Usaha di Pasar Kertosono Sebelum dan Setelah Relokasi
 Sumber: Dokumen peneliti

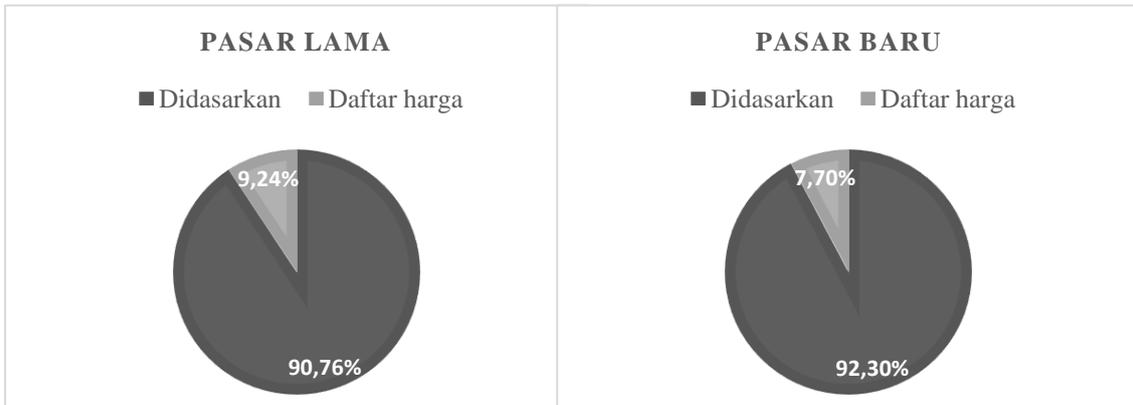
Berdasarkan grafik di atas (Gambar 11), diketahui bahwa sebelum direlokasi sebanyak 96,92% responden menyatakan dapat maju sewaktu berjualan, sisanya menyatakan tidak dapat maju. Sebagian besar responden merasa usaha dagangnya dapat berkembang karena telah mempunyai pelanggan tetap. Sesudah direlokasi, jumlah responden yang menyatakan dapat maju sewaktu berjualan terjadi penurunan sebesar 4,62%. Responden menyatakan tidak dapat maju sewaktu berjualan karena kehilangan pelanggan tetap. Banyak pelanggan yang berpindah ke pedagang lain. Akan tetapi mayoritas pedagang yang menyatakan usahanya akan lebih maju, jika pemerintah bisa lebih memperhatikan dan membangun kondisi pasar menjadi lebih baik sehingga dapat memberikan rasa nyaman bagi pedagang, walaupun kemajuan yang dirasakan sedikit demi sedikit, membutuhkan waktu dan adaptasi yang cukup lama.

Hasil interview juga menunjukkan bahwa di Pasar Kertosono yang lama para pedagang diwajibkan membayar biaya retribusi sebesar Rp500,- sampai dengan Rp2.000,- setiap harinya oleh pemerintah daerah setempat atau petugas pasar yang berwenang, sesuai luas lapak masing-masing pedagang. Setelah terjadinya relokasi ke lokasi Pasar Kertosono yang baru, pemerintah daerah setempat memutuskan tidak akan memungut biaya retribusi setiap harinya yang harus dibayar oleh pedagang, akan tetapi petugas pasar memungut biaya retribusi untuk listrik sebesar Rp50.000,- setiap bulan. Pemungutan retribusi listrik tidak dilakukan secara langsung pasca relokasi. Dinas Pengelolaan Pasar melakukan pendampingan dan memberikan waktu kepada pedagang untuk beradaptasi dengan lokasi Pasar Kertosono baru.

Modal yang dikeluarkan pedagang banyak berubah. Banyak pedagang yang beralih modal sedikit daripada saat sebelum direlokasi, ini disebabkan karena pedagang takut apabila modalnya ditambah tetapi jumlah pembeli tetap atau sedikit, maka mereka akan rugi. Apalagi pedagang takut jika kehilangan pelanggan tetap, dikarenakan pelanggan juga harus mencari lagi pedagang langganannya. Selain itu, tidak semua pedagang bisa membawa dagangan ke pasar baru akibat kebakaran. Pasca relokasi, hampir semua pedagang membutuhkan modal operasional senilai ±Rp20.000.000,00. Padahal, sebelum direlokasi, modal operasional yang dikeluarkan pedagang sangat besar yakni mencapai ±Rp35.000.000,00 hingga ±Rp60.000.000,00. Menurunnya modal operasional yang dikeluarkan pedagang karena sebagian besar modalnya bersumber dari pinjaman bank, sebab sebagian barang dagangan pedagang hangus terbakar. Hal serupa terjadi di Pasar Induk Wua-Wua Kota Kendara dimana pedagang pasar direlokasi akibat terjadinya kebakaran sehingga berdampak pada modal usaha pedagang yang menurun (Asiah, Moita and Supiyah, 2020).

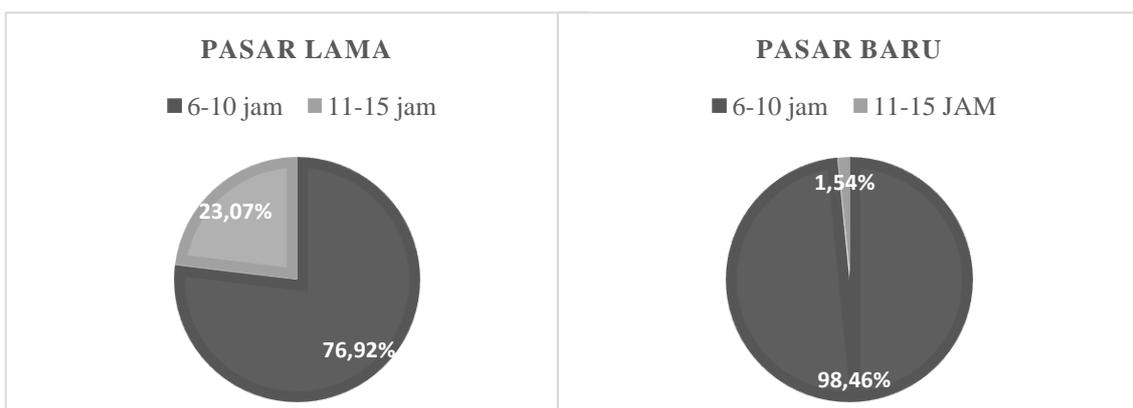
Besar pendapatan yang diperoleh responden di Pasar Kertosono sebelum maupun sesudah relokasi dalam waktu satu bulan mengalami perubahan. Sebelum relokasi sebanyak 15,38% responden memiliki pendapatan sangat rendah, akan tetapi sesudah direlokasi responden dengan pendapatan yang sama meningkat sebesar 66,15%. Sebelum relokasi, sebanyak 84,61% responden memiliki pendapatan sangat tinggi dan sesudah relokasi terjadi penurunan pada pendapatan sebesar 50,77%. Secara umum, terjadi penurunan pendapatan yang diperoleh responden setelah direlokasi. Rata-rata pendapatan pedagang sebelum direlokasi mencapai Rp15.000.000,00 – Rp40.000.000,00, sedangkan di pasar baru sebesar Rp5.000.000,00 hingga <Rp10.000.000,00. Salah satu penyebab menurunnya pendapatan pedagang karena berpindahannya lokasi dagang yang berbeda dengan sebelumnya sehingga pelanggan lama kesulitan untuk

menemukan lokasi pedagang yang baru. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Armi *et al.* (2016) yang menemukan bahwa konfigurasi kios pedagang yang berbeda dari sebelumnya. Semakin membaiknya kondisi pasar saat ini belum mampu meningkatkan hasil pendapatan pedagang. Kenyamanan yang dirasakan beberapa pedagang di pasar yang baru juga belum sebanding dengan pendapatan yang mereka peroleh. Pedagang-pedagang lama banyak yang kehilangan pelanggan sehingga berdampak pada pendapatan mereka. Pedagang menawarkan harga serendah mungkin dengan keuntungan yang kecil demi mendapatkan pembeli supaya barang dagangan yang mereka jajakan dapat laku terjual.



Gambar 12. Cara Pemasaran Di Pasar Kertosono Sebelum Dan Setelah relokasi
Sumber: Dokumen peneliti

Sebelum relokasi pasar, sebanyak 90,76% responden memasarkan barang dagangannya dengan cara didasarkan pada lapak dan ditawarkan kepada pembeli secara lisan, sisanya memasarkan barang dagangannya dengan cara membuat daftar harga. Sedangkan sesudah terjadinya relokasi pasar sebanyak 92,30% responden memasarkan barang dagangannya dengan cara didasarkan di lapak dan menawarkan pada pembeli secara lisan, sisanya memasarkan barang dagangannya dengan cara membuat daftar harga. Berdasarkan hasil penelitian tersebut terjadi peningkatan sebesar 0,98% cara pemasaran dengan didasarkan pada lapak dan menawarkan secara lisan, sementara itu terjadi penurunan sebesar 1,20% cara pemasaran dengan membuat daftar harga. Sebagian besar pedagang masih mempertahankan cara pemasaran dari sebelum terjadinya relokasi yang dianggap lebih mudah dan efektif, tetapi ada beberapa pedagang yang merubah cara pemasarannya yang dipengaruhi karena tempat berjualan mereka yang memungkinkan untuk merubah cara pemasarannya dengan tujuan memperoleh pendapatan yang lebih baik.



Gambar 13. Curahan Waktu Kerja di Pasar Kertosono Sebelum dan Setelah Relokasi
Sumber: Dokumen peneliti

Setelah menempati Pasar Kertosono yang baru jam kerja 6-10 jam per hari semakin meningkat sebesar 21,54%, dan jam kerja 11-15 jam menurun sebesar 21,54%. Hal ini dikarenakan barang dagangan yang seharusnya sudah habis terjual pada saat menempati lokasi lama ternyata masih tersisa setelah

direlokasi ke lokasi yang baru dan barang dagangan yang seharusnya ditinggal di lapak (bedak toko) menjadi dibawa pulang setelah relokasi pasar yang hampir semuanya belum membuat lapak permanen, sehingga memaksa pedagang untuk mengurangi jam kerjanya agar dapat berberes lebih awal. Penurunan jam operasional pedagang tersebut sejalan dengan hasil penelitian (Soelistiyono, Adrianto and Kuniawati, 2018) yang menunjukkan bahwa setelah diadakannya relokasi pasar, jam operasional pasar berkurang dan jam operasional pasar juga telah diatur. Jam kerja antara 11-15 jam per hari biasanya dilakukan oleh pedagang yang sudah membuat lapak permanen dan menjual barang yang tidak langsung habis terpakai, seperti pakaian jadi, kain, alat pertanian, dan sebagainya.

KESIMPULAN

Hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa mayoritas responden tidak setuju terhadap adanya relokasi Pasar Kertosono disebabkan pasar baru memiliki lahan yang sempit, akses jalan dan lahan parkir yang tidak memadai. Aksesibilitas menuju Pasar Kertosono baru lebih dekat dengan rumah pedagang di mana pedagang yang tempat tinggalnya berjarak 0-1 km meningkat sebesar 7,69%, sehingga mudah dijangkau dengan berjalan kaki, sepeda, dan sepeda motor. Relokasi Pasar Kertosono berdampak pada kondisi sosial pedagang yaitu hilangnya organisasi sosial di pasar lama, kenyamanan dalam berdagang meningkat 7,69%, dan pedagang yang mengalami permasalahan dalam berdagang meningkat mencapai 86,16%. Sedangkan, relokasi Pasar Kertosono berdampak terhadap kondisi ekonomi pedagang yaitu tidak dipungutnya retribusi lapak dan hanya membayar retribusi listrik sebesar Rp50.000,00/bulan, modal operasional yang dikeluarkan menjadi lebih kecil, pendapatan pedagang menurun, dan curahan waktu kerja pedagang menurun.

SARAN

yang dapat diberikan yaitu dibutuhkan bantuan modal khususnya bagi pedagang kecil yang ada di Pasar Kertosono. Dimana pedagang ini tidak bisa melakukan ekspansi usaha karena keuntungan yang didapatkan tidak besar. Selain itu hasil dari berdagang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu diperlukan pula *sharing knowledge* mengenai perencanaan keuangan agar para pedagang dapat membedakan mana uang yang harus dikelola untuk berdagang dan mana uang yang harus digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Serta di era digital ini, pedagang di pasar kertosono juga perlu diajarkan pemasaran digital agar usaha dapat terus berjalan meskipun di masa pandemik Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, I., Setioko, B. and Wisnu, P. (2015) 'Eksistensi Pasar Tradisional dalam Kearifan Budaya Jawa (Obyek Studi: Pasar Gede Kota Surakarta)', *SEMINAR NASIONAL: Menuju Ruang Arsitektur & Perkotaan Yang Ber-Kearifan Lokal*.
- Armi, A. et al. (2016) 'Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pasar', *Jurnal Administrasi Publik*.
- Ars (2015) *Peran Pasar Tradisional Sebagai Pondasi Dasar Ekonomi Kerakyatan*, 17.05.2015.
- Asiah, N., Moita, S. and Supiyah, R. (2020) 'The Socio-Economic Impacts After Relocation of Pasar Panjang Traders to the Wua-Wua Central Market Kendari City', *Indonesian Journal of Social and Environmental Issues*, 1(1). Available at: <https://ojs.literacyinstitute.org/index.php/ijsei>.
- Endrawanti, S. and Wahyuningsih, C. D. (2014) 'Dampak Relokasi Pasar Studi Kasus di Pasar Sampangan Kota Semarang', *Serat Acitya-Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, 3(1).
- Fauzi, H. M. and Firdaus, A. Y. (2019) 'Impacts of Traditional Market Revitalization on the Traders' Capital Expenditure in Situbondo', in *The International Seminar Series of Regional Dynamics Proceeding*.
- Hasnawati (2016) *Dampak Relokasi Pasar Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Pasar Laino Raha*. Universitas Halu Oleo Kendari.
- Izza, N. (2010) *Pengaruh Pasar Modern terhadap Pedagang Pasar Tradisional (Studi Pengaruh Ambarukmo Plaza terhadap Perekonomian Pedagang Pasar Desa Caturtunggal Nologaten Depok Sleman Yogyakarta)*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Junaidi, M., Ramayanto and Nurlailatul (2018) 'Dampak Relokasi Pasar terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Pasar Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima', *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1). doi: DOI: <https://doi.org/10.31764/jiap.v6i1.659>.
- Koentjaraningrat (1981) *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Losch, A. (1954) *Economic of Location*. New York: John Wiley & Sons, Inc.

- Manzanaris, M. R., Rares, J. and Kiyai, B. (2018) 'DAMPAK KEBIJAKAN RELOKASI PASAR TRADISIONAL RAWAJAYA DI WILAYAH KOTA TOBELO KABUPATEN HALMAHERA UTARA', *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 4(52).
- Masitoh, E. Al (2013) 'Upaya Menjaga Eksistensi Pasar Tradisional: Studi Revitalisasi Pasar Piyungan Bantul', *Jurnal PMI*.
- Muslimin, L., Indriati, F. and Widayanti, T. (2018) 'KAJIAN MODEL PENGEMBANGAN PASAR TRADISIONAL', *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*. doi: 10.30908/bilp.v1i2.296.
- Musthofa, Z. (2011) *Evaluasi Pelaksanaan Program Relokasi Permukiman Kumuh (Studi Kasus Kelurahan Pucangsawit, Kota Surakarta)*. Universitas Sebelas Maret.
- Muta'ali, L. (2015) *Teknik Analisis Regional untuk Perencanaan Wilayah Tata Ruang dan Lingkungan*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi.
- Nurjanah, N. (2020) 'Selamatkan Pasar Tradisional', *Umbara*. doi: 10.24198/umbara.v3i2.29639.
- Pramudyo, A. (2014) 'Menjaga eksistensi pasar tradisional di yogyakarta', *Jbma*.
- Safitri, D. (2020) *Analisis Dampak Relokasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Pedagang Sebelum dan Sesudah Relokasi (Studi di PasarA ngso Duo)*. Universitas islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin.
- Sari, R. K. (2006) 'Sistem Penentuan Daerah Relokasi Pemukiman Masyarakat di Kota Banda Aceh Berbasis Sistem Informasi Geografis', *Jurnal Fakultas Teknologi Industri Jurusan Teknik Informatika Universitas Gunadarma*.
- Soelistiyono, A., Adrianto, A. T. and Kuniawati, E. (2018) 'Analyzing the Impact of Traditional Market Relocation in Surrounding Traders and Communities (Case studi of Demak Mranggen Marker', *Economics and Business Solutions Journal*, 2(1).
- Susilowati, S. (2015) 'The Impact of Traditional Market Relocation on the Seller Dinoyo Market in Malang', *Jurnal Vokasindo*, 3(1).
- Susilowati, S. H. (2014) 'Attracting the Young Generation to Engage in Agriculture', *FFTC-RDA International Seminar on Enhanced Entry of Young Generation into Farming*.
- Susilowati, S. H. (2016) 'Fenomena Penuaan Petani dan Berkurangnya Tenaga Kerja Muda serta Implikasinya bagi Kebijakan Pembangunan Pertanian', *Forum penelitian Agro Ekonomi*. doi: 10.21082/fae.v34n1.2016.35-55.
- Tarigan, R. (2006) *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi (Edisi Revisi)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, E. (2008) *Perancangan Kembali Pasar Tanjung Kota Mojokerto*. Universitas Brawijaya.
- Wiryomartono, B. P. (1995) *Seni Bangunan dan Senin Binakota di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Yudha, M. R. A. (2017) *Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Sebelum dan Sesudah Relokasi (Studi Kasus di Pasar SMEAP Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung)*. Universitas Lampung.
- Zunaidi, M. (2013) 'Kehidupan Sosial Ekonomi Pedagang Di Pasar Tradisional Pasca Relokasi Dan Pembangunan Pasar Modern', *Jurnal Sosiologi Islam*.

Potensi Ekonomi Rencana Kawasan Transmigrasi Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu Kalimantan Timur

Dirgahayu Erri ^{1)*}, Hasta Herlan Asyamar ²⁾

¹⁾²⁾ Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas Bina Sarana Informatika, Jakarta, Indonesia

* E-mail corresponding author: dirgahayu.dge@bsi.ac.id

Received: 28-02-2021;
Accepted: 08-04-2021;
Available online: 30-04-2021

Ecoplan Vol. 4 No. 1, April 2021,
hlm 67-76.

ISSN p: 2620-6102
e: 2615-5575

Keywords: Economic
Potential, Transmigration
Area Plan

Abstract - *In planning the development of transmigration areas, it is necessary to efficiently and effectively realize the development of transmigration areas. The planning process is excellent and correct, and the implementation of the Transmigration Regional Plan (RKT) is agreed upon by all stakeholders both in the center and the region. Transmigration development is one of the efforts to accelerate growth, especially outside Java, to increase its role as a driver of regional development and improve regional competitiveness that is still low. Planning of transmigration settlement areas is carried out with a participatory approach intended for the local community around to act as a subject instead of an object in the planning process of the development of the Transmigration Development Area (WPT) and the Location of Transmigration Settlements (LPT). This is done because they have a direct relationship and interests with the development of settlements transmigration to the economy, management of natural resources, human resources, and the environment. The analysis work is intended to examine the carrying capacity and capacity of the land of the planning site as an agricultural production system and natural resource management that has functional and hierarchical interrelationships with the growth center in a single development system. The preparation of the economic potential of The Transmigration Regional Plan in Long Apari District is done by collecting primary data and secondary data based on the dominant types of commodity cultivation, among others: crops, plantations, industrial plantation forests. The existing economic potential is then implemented in the Determination of Transmigration Business Patterns that also consider investor interest in commodities to be developed in the concession area to improve the regional economy of the Long Apari Transmigration Area Plan.*

Abstrak - Dalam perencanaan pembangunan kawasan transmigrasi, perlu diwujudkan pengembangan kawasan transmigrasi secara efisien dan efektif. Proses perencanaan secara baik dan benar serta implementasi Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) yang disepakati oleh semua pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah. Pembangunan transmigrasi merupakan salah satu upaya percepatan pembangunan terutama diluar pulau Jawa, untuk meningkatkan perannya sebagai penggerak pembangunan daerah dan meningkatkan daya saing daerah yang masih rendah. Perencanaan wilayah permukiman transmigrasi dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang dimaksudkan agar masyarakat lokal disekitar bertindak sebagai subyek bukan obyek di dalam proses perencanaan pembangunan Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) dan Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT). Hal ini dilakukan karena mereka memiliki keterkaitan dan kepentingan langsung dengan rencana pembangunan wilayah permukiman transmigrasi terhadap perekonomian, pengelolaan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan lingkungannya. Pekerjaan analisis dimaksudkan untuk mengkaji daya dukung dan daya tampung lahan

lokasi perencanaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam yang memiliki keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan dengan pusat pertumbuhan dalam satu kesatuan sistem pengembangan. Penyusunan potensi ekonomi Rencana Kawasan Transmigrasi di kecamatan Long Apari dilakukan dengan pengumpulan data primer dan data sekunder berdasarkan jenis budidaya komoditi yang dominan, antara lain: tanaman pangan lahan kering, perkebunan, hutan tanaman industri. Dari potensi ekonomi yang ada kemudian diimplementasikan dalam Penentuan Pola Usaha Transmigrasi yang mempertimbangkan juga minat investor terhadap komoditi yang akan dikembangkan pada areal konsesi sehingga bisa meningkatkan perekonomian daerah Rencana Kawasan Transmigrasi Long Apari.

Kata Kunci: Potensi Ekonomi, Rencana Kawasan Transmigrasi.

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU No.26/2007), penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan meliputi penataan ruang kawasan strategis nasional (KSN), penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota. Sejalan dengan Undang-Undang No. 29 Tahun 2009 Tentang Ketransmigrasian yang mengatur perencanaan pembangunan kawasan transmigrasi, maka dalam rangka perwujudan pengembangan kawasan transmigrasi secara efisien dan efektif yang penyusunan rencana kawasannya diamanatkan oleh PP Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, perlu suatu proses perencanaan secara baik dan benar serta implementasi RKT yang disepakati oleh semua pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah.

Untuk mewujudkan hal tersebut pembangunan transmigrasi dilaksanakan berbasis kawasan yang memiliki keterkaitan dengan kawasan sekitarnya membentuk suatu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah. Pembangun Kawasan Transmigrasi dirancang secara holistik dan komprehensif sesuai dengan Rencanan Tata Ruang Wilayah dalam bentuk Wilayah Pengembangan Transmigrasi atau Lokasi Permukiman Transmigrasi. Pengembangan Wilayah Transmigrasi diarahkan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan baru sebagai Kawasan Perkotaan Baru, sedangkan Lokasi Permukiman Transmigrasi diarahkan untuk mendukung pusat pertumbuhan yang telah ada atau yang sedang berkembang sebagai Kawasan Perkotaan baru. (Raharjo, 2008)

Pembangunan Kawasan Transmigrasi sekaligus untuk mengintegrasikan upaya penataan persebaran penduduk yang serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan dengan mengakui hak orang untuk bermigrasi, mengadopsi visi jangka panjang untuk tata ruang urban demi perencanaan penggunaan lahan yang lestari dan mendukung strategi urbanisasi secara terpadu. Dengan demikian, pembangunan transmigrasi merupakan salah satu upaya percepatan pembangunan kota-kota kecil terutama diluar pulau Jawa, untuk meningkatkan perannya sebagai motor penggerak pembangunan daerah untuk meningkatkan daya saing daerah yang masih rendah sebagai akibat dari; (1) lebarnya kesenjangan pembangunan antar wilayah, terutama antara kawasan perdesaan-perkotaan, kawasan pedalaman-pesisir, Jawa-luar Jawa dan antara kawasan Timur-Barat, serta (2) rendahnya keterkaitan antara pusat pertumbuhan dengan daerah belakang (*hinterland*), termasuk antara kota dan desa.

Menyusun dokumen perencanaan RKT sebagai acuan bagi kegiatan selanjutnya yaitu perwujudan kawasan transmigrasi. Tersusunnya RKT berupa rencana struktur dan peruntukan kawasan transmigrasi, terintegrasi dengan kawasan perdesaan, sebagai dasar dalam penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten yang bersangkutan. Sebagai landasan kebijakan dalam pembangunan permukiman transmigrasi, terutama untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam kaitannya dengan optimalisasi sumber daya tenaga kerja. Ruang lingkup wilayah kerja meliputi satu atau beberapa kecamatan yang diindikasikan berpotensi sebagai kawasan transmigrasi, pada lingkup kabupaten yang telah ditentukan, yaitu Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur.

Mekanisme prosedur pengusulan Perencanaan Kawasan Transmigrasi pada prinsipnya adalah Bupati/Walikota menyampaikan usulan RKT kepada Menteri untuk ditetapkan menjadi Kawasan transmigrasi melalui Gubernur. Berdasarkan usulan tersebut, gubernur melakukan sinkronisasi dengan kebijakan pembangunan daerah provinsi. Berdasarkan hasil sinkronisasi Gubernur dapat meneruskan usulan yang sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah provinsi kepada menteri; atau mengembalikan

usulan RKT disertai dengan penjelasan tertulis kepada Bupati/Walikota untuk dilakukan perbaikan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja. Selanjutnya usulan tersebut dilakukan penilaian oleh Menteri. Kemudian berdasarkan hasil penilaian, Menteri dapat menetapkan kawasan transmigrasi atau mengembalikan usulan RKT disertai dengan penjelasan tertulis kepada Gubernur untuk dilakukan perbaikan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja. Prosedur selanjutnya adalah Menteri menyampaikan RKT yang telah ditetapkan menjadi Kawasan Transmigrasi kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan tata ruang.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 29 tahun 2009 (Undang-Undang Ketransmigrasian RI, 2009), Kawasan transmigrasi terdiri dari Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) yang membentuk pusat pertumbuhan baru dan Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT) yang mendukung pertumbuhan yang sudah ada atau yang sedang berkembang. Dalam Perencanaan Kawasan Transmigrasi, apabila diperlukan Daerah dapat mengikutsertakan Unit Kerja Teknis Pusat yang membidangi perencanaan wilayah sebagai fasilitator, memberikan asistensi dan dampingan teknis dalam setiap proses perencanaan wilayah permukiman transmigrasi. Disamping itu perencanaan wilayah permukiman transmigrasi harus melibatkan stakeholder yang ada guna mendapatkan masukan dan arahan sesuai dengan kondisi dan potensi ekonomi setempat. Perencanaan wilayah permukiman transmigrasi dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang dimaksudkan agar masyarakat lokal (setempat) disekitar WPT-LPT bertindak sebagai subyek bukan obyek didalam proses perencanaan pembangunan WPT dan LPT, hal ini dilakukan karena mereka memiliki keterkaitan dan kepentingan langsung dengan rencana pembangunan wilayah permukiman Transmigrasi terhadap perekonomian, pengelolaan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan lingkungannya. Berdasarkan pemaparan peneliti di atas sebagai salah satu dokumen kelengkapan, maka perlu dilakukan penyusunan dan penelitian Potensi Ekonomi Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur.

TINJAUAN PUSTAKA

Visi pembangunan transmigrasi adalah mewujudkan kawasan transmigrasi sebagaimana dituangkan pada PP Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Ps.12). Disebutkan bahwa pelaksanaannya dilakukan melalui pembangunan *Wilayah Pengembangan Transmigrasi* (WPT) dan *Lokasi Permukiman Transmigrasi* (LPT) untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah yang baru. Kontribusi pembangunan transmigrasi untuk membentuk pusat-pusat pertumbuhan sudah mulai nampak, dari yang sudah berhasil menumbuhkan eks UPT menjadi ibukota kabupaten/kecamatan dan desa-desa baru, membuka daerah-daerah terisolir, aksesibilitas lebih baik, membuka lapangan kerja, memperluas areal pertanian, pembangunan prasarana jalan, dan PAD daerah (Peraturan Pemerintah RI Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997, 2014). Paradigma baru transmigrasi tidak sekadar memindahkan penduduk dari daerah yang padat penduduk ke daerah yang masih kekurangan penduduk. Lebih dari itu, transmigrasi menjadi cara bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya, sekaligus sebagai usaha membangun ketahanan pangan. (Suparno, 2006)

Kebijakan Ditjen PSKT (Ditjen PSKT Departemen Tenaga Kerja RI, 2003) dalam menetapkan kawasan diartikan sebagai satu kesatuan hamparan lahan dalam kawasan budidaya (dalam wilayah otonom) yang terdiri atas PTA, PTD, PTB, Desa Setempat (PDS) dan Areal Potensial (PTC), berpotensi untuk pengembangan komoditas unggulan yang memenuhi skala ekonomi, dihubungkan dalam satu kesatuan jaringan transportasi yang dapat merangsang tumbuhnya Pusat Pertumbuhan Ekonomi serta tersedianya sarana dan prasarana penunjang ekonomi sosial dan budaya.

Lokasi pemukiman transmigrasi yang merupakan satuan wilayah terkecil ditetapkan dan dilaksanakan melalui transmigrasi umum dan atau transmigrasi swakarsa berbantuan dan atau transmigrasi swakarsa mandiri (Mirwanto, 2004). Peruntukan kawasan sebagai rencana Lokasi Permukiman Transmigrasi harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah/daerah. Selain itu kawasan tersebut harus memenuhi syarat:

1. Memiliki potensi untuk pengembangan usaha primer, sekunder, dan atau primer;
2. Tersedia prasarana dan sarana permukiman;
3. Tingkat kepadatan penduduk rendah.

Setiap Wilayah Pengembangan Transmigrasi dilengkapi sarana berupa: Pusat kegiatan ekonomi wilayah; Pusat kegiatan industri pengelolaan hasil; Pusat pelayanan jasa dan perdagangan; Pusat pelayanan kesehatan; Pusat pendidikan tingkat menengah; Pusat pemerintahan. Untuk setiap Satuan Kawasan Pengembangan (Ps 18) dilengkapi dengan: industri kecil/industri rumah tangga; pasar harian; pertokoan; pelayanan jasa perbankan; perbengkelan; pelayanan pos; pendidikan tingkat pertama; puskesmas pembantu; pelayanann pemerintahan. Satu diantara Satuan Permukiman yang ada ditetapkan sebagai desa

utama dan memiliki persyaratan sudah berkembang: warung atau koperasi; pasar; sekolah dasar; balai pengobatan; balai desa; tempat ibadah. (Peraturan Pemerintah RI Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997, 2014)

METODE PENELITIAN

Untuk keperluan pengenalan karakteristik kawasan dan penyusunan rencana kawasan transmigrasi, dilakukan pengumpulan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dapat meliputi:

1. Penjarangan aspirasi masyarakat yang dapat dilaksanakan melalui temu wicara, wawancara orang per-orang, *Focus Group Discussion*, dan lain sebagainya;
2. Penjarangan informasi kebijakan pembangunan dilakukan dengan melakukan wawancara di instansi tingkat kabupaten, dan
3. Pengenalan kondisi fisik dan sosial ekonomi wilayah secara langsung melalui kunjungan beberapa bagian wilayah terpilih di kawasan transmigrasi.

Teknik Analisis Data

Penelitian dan analisis dimaksudkan untuk mengkaji daya dukung dan daya tampung lahan lokasi perencanaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam yang memiliki keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan dengan pusat pertumbuhan dalam satu kesatuan sistem pengembangan. Metode yang dapat digunakan dalam analisis potensi dan masalah kawasan perencanaan adalah dengan menggunakan prinsip analisis SWOT.

Analisis Pengembangan Ekonomi Kawasan Transmigrasi

1. Analisis Sektor dan Komoditas Unggulan
Analisis sektor dan komoditas unggulan diperlukan untuk mengetahui sumbangan/kontribusi sektor dan komoditas terhadap PDRB pada Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT). Sektor yang memberikan sumbangan relatif yang cukup besar terhadap PDRB di suatu kawasan sehingga sektor tersebut dikatakan sebagai sektor basis (dominan). Variabel yang dapat digunakan sebagai indikator keunggulan suatu sektor diantaranya: penyerapan tenaga kerja masing-masing sektor, luas usaha dan produktivitas masing-masing sektor, serta kontribusi tiap-tiap sektor terhadap PDRB di RKT.
2. Analisis Potensi dan Peluang Pengembangan Komoditas Unggulan
Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) memiliki potensi perkonomian yang besar dan membutuhkan adanya dukungan dari seluruh pihak agar potensi pekonomian dapat berjalan lancar. Hal ini mengakibatkan bahwa potensi perekonomian suatu daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dalam masa kini maupun masa depan. Salah satu daerah yang potensinya dipengaruhi oleh berbagai keadaan yang berkembang adalah perekonomian daerah tersebut yang secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh fenomena-fenomena yang berkembang saat ini dan yang akan datang, baik pada tatanan perkembangan lingkungan eksternal maupun internal. Perkembangan lingkungan eksternal perekonomian RKT sangat dipengaruhi oleh kebijakan perekonomian regional dan nasional.
3. Analisis Sistem Pemasaran
Setiap daerah/kawasan harus mampu memenuhi kebutuhan penduduknya. Oleh karena itu, setiap daerah/kawasan perlu memiliki sistem pemasaran produk yang telah dihasilkan. Pemasaran merupakan upaya untuk mempromosikan, menginformasikan dan menawarkan kepada konsumen mengenai sebuah produk usaha atau layanan jasa yang dikelola oleh sebuah usaha sebagai upaya untuk meningkatkan angka penjualan dari produk yang dihasilkan. Analisis sistem pemasaran penting dilakukan untuk mengembangkan suatu komoditas unggulan di kawasan transmigrasi.
4. Analisis Studi Kelayakan Komoditas Unggulan
Studi kelayakan merupakan bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan, apakah menerima atau menolak dari suatu kegiatan yang direncanakan dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang saling berkaitan yang secara bersama-sama menentukan bagaimana keuntungan yang diperoleh dari suatu penanaman investasi tertentu dan mempertimbangkan seluruh aspek tersebut pada setiap tahap dalam perencanaan proyek dan siklus pelaksanaannya. Aspek-aspek analisis kelayakan meliputi aspek teknis, aspek manajerial dan administratif, aspek organisasi, aspek komersial, aspek finansial, dan aspek ekonomis. Jadi kelayakan suatu komoditas unggulan pada Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) sangat ditentukan oleh aspek-aspek tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Long Apari secara geografis terletak pada 113° 48' 49" Bujur Timur s.d 114° 34' 22" Bujur Timur. 01° 31' Lintang Utara s.d. 0° 31' Lintang Utara. Sebelah utara berbatasan dengan Malaysia

Timur. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Long Pahangai dan Kabupaten Malinau. Batas selatan dengan Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan batas barat dengan Provinsi Kalimantan Barat. Kecamatan Long Apari, terdiri 10 desa yaitu; Long Apari, Long Keriok, Long Pananeh I, Long Pananeh II, Long Pananeh III, Naha Buan, Naha Silat, Naha Tifab, Tiong Bu'u, Tiong Ohang. Kecamatan Long Apari memiliki luas 5.490,70 Km² yang terbagi dalam 10 wilayah administrasi desa sebagai berikut

Tabel 1
Luas Desa di Kecamatan Long Apari

No	D E S A	LUAS	PERSENTASE
01.	Long Pananeh I	446,05	8,12
02.	Tiong Ohang	849,62	15,47
03.	Long Keriok	382,33	6,96
04.	Long Pananeh III	223,47	4,07
05.	Long Pananeh II	312,41	5,69
06.	Tiong Bu'u	424,81	7,74
07.	Naha Buan	212,41	3,87
08.	Naha Tifab	403,57	7,35
09.	long Apari	1.236,47	22,52
10.	Naha Silat	999,56	18,2
J U M L A H		5.490,70	100

Sumber: Kabupaten Mahakam Ulu Dalam angka

Analisa Potensi Ekonomi Berdasarkan Komoditas Unggulan

Komoditas pertanian unggulan di Kecamatan Long Apari adalah Padi ladang, sedangkan komoditas perkebunannya adalah kelapa, kopi dan karet. Padi ladang adalah komoditas pertanian yang diusahakan sebagian besar masyarakat di Kecamatan Long Apari dengan luas panen total sebesar 800Ha dengan hasil perhektarnya 30,31 Kw/Ha. Untuk komoditas perkebunan ada Karet dengan produktivitas sebesar 183,33 Kg/Ha dengan produksi sebesar 8,25 ton. Kopi dengan produktivitas sebesar 10 Kg/Ha yang memproduksi sebesar 0,05 ton, sedangkan kelapa berproduktivitas sebesar 13,1 Kg/Ha dengan produksi sebesar 0,26 ton.

Kondisi pertanian di Kecamatan Long Apari umumnya adalah petani ladang berpindah. Lahan di Kecamatan Long Apari mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai lahan persawahan dan lahan perkebunan. Pada lahan persawahan ditanam padi sawah sedangkan pada lahan keringnya cocok juga ditanami padi ladang dan palawija seperti jagung, kacang hijau dan kacang tanah. Dari sektor peternakan, di Kecamatan Long Apari tercatat produksi daging ternak yaitu sapi dengan populasi sebanyak 25 ekor, kambing sebanyak 48 ekor dan babi sebanyak 200 ekor. Untuk jenis unggas tercatat populasi ayam buras sebesar 4.100 ekor, ayam potong sebanyak 300 ekor dan itik sebanyak 100 ekor

Berdasarkan Penyerapan Tenaga Kerja

Di kecamatan Long Apari, sumber daya manusia lokal yang relatif masih rendah, baik dari tingkat pendidikan formal, keterampilan, dan bidang keahlian yang dimiliki menyebabkan penyerapan tenaga kerja didominasi di sektor-sektor yang berbasis alam yang tidak memerlukan tingkat pendidikan tinggi dan bidang keahlian tertentu. Hal ini dapat dilihat dari tingkat penyerapan tenaga di sektor pertanian yang dominan yaitu sekitar 90%. Namun demikian, rendahnya keterampilan yang dimiliki menyebabkan produktivitas hasil pertanian masih relatif rendah. Berdasarkan hal tersebut, maka sektor yang potensial untuk dikembangkan di Kecamatan Long Apari berdasarkan penyerapan tenaga kerja adalah sektor-sektor yang tidak memerlukan tingkat pendidikan tinggi dan bidang keahlian khusus sehingga mudah dimasuki oleh penduduk seperti sektor pertanian. Sektor pertanian, khususnya sektor perkebunan dan peternakan potensial untuk dikembangkan terutama karena pada saat telah ditempatkan ahli-ahli di setiap desa yang memberikan bimbingan dan keterampilan khusus kepada para petani sehingga diharapkan produktivitas hasil pertanian yang dihasilkan dapat meningkat.

Sektor Strategis

Sektor strategis adalah sektor yang dianggap mampu meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi wilayah berdasarkan kriteria-kriteria kesesuaian lahan, penyerapan tenaga kerja, perkembangan produksi, keterkaitan antar sektor dan peluang pasar baik internal maupun eksternal. Berdasarkan tradisi mata pencaharian penduduk di Kecamatan Long Apari maka penilaian kelompok sektor strategis dapat diklasifikasikan kedalam kelompok komoditi unggulan di Kecamatan Long Apari, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Komoditas Unggulan Kecamatan Long Apari

Klasifikasi komoditas unggulan di Kecamatan Long Apari seperti pada tabel berikut,

Tabel 2
Klasifikasi Komoditas Unggulan Kecamatan Long Apari

Sektor	Peringkat Unggulan		
	I	II	III
Pertanian	Padi Ladang		
Perkebunan	Karet	Kelapa	Kopi
Peternakan			
Hewan	Babi	Sapi	Kambing
Unggas	Ayam Buras	Ayam Potong	Itik
Perikanan	Ikan Patin	Ikan Nila	Ikan Bandeng

Sumber: Hasil Analisis Peneliti

Analisis SWOT

Proses kombinasi masing-masing komponen SWOT akan dijabarkan melalui Matrik Kombinasi Analisis Lingkungan Internal dan Analisis Lingkungan Eksternal pembangunan Kawasan Transmigrasi sebagai berikut:

Tabel 3
Identifikasi SWOT Pembangunan Kawasan Transmigrasi Long Apari

	Opportunity	Threat
	<ul style="list-style-type: none"> Merupakan kawasan strategis nasional yang merupakan wilayah perbatasan Merupakan salah satu kawasan sebagai pusat pengembangan pertanian pangan (padi ladang), kakao, karet, perikanan tangkap Tersedianya sumber dana baik dari pemerintah pusat dan provinsi dalam pembangunan kawasan transmigrasi 	<ul style="list-style-type: none"> Aksesibilitas keluar kawasan yang sangat buruk mengakibatkan ongkos transportasi tidak efisien dan menurunkan daya saing Adanya Taman Nasional mengakibatkan ekspansi kawasan menjadi terbatas Kesadaran masyarakat yang kurang dalam menjaga kawasan ekosistem Taman Nasional dengan merambah kawasan Tanaman Nasional.
Strength	Strategi SO	Strategi ST
<ul style="list-style-type: none"> Adanya potensi pengembangan lahan untuk permukiman transmigrasi SDM yang cukup terampil dalam pertanian dan perikanan Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan infrastruktur permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> Menciptakan pusat pertumbuhan baru sebagai pusat kawasan setara dengan PPK dengan membagi kawasan dalam KPB, SKP dan SP dengan menentukan pusat-pusat bagi masing-masing kawasan Mengembangkan permukiman transmigrasi baru dan 	<ul style="list-style-type: none"> Membangun, meningkatkan akses keluar kawasan dengan fungsi kolektor ke pusat-pusat pertumbuhan wilayah Mengoptimalkan lahan usaha dengan peningkatan produktivitas lahan pertanian.

terintegrasi dengan desa sekitar dan pusat pelayanan yang akan dikembangkan

- Mengotimalkan peran perusahaan swasta dalam menciptakan sistem perekonomian agribisnis dengan skala ekonomi yang luas dan peningkatan kualitas SDM (tenaga kerja)
- Peningkatan keterampilan SDM dalam pengelolaan lahan budidaya dan penciptaan nilai tambah dari hasil budidaya

Weakness	Strategi WO	Strategi WT
<ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian aktual lahan pertanian yang rendah harus ada masukan teknologi dan pupuk untuk menambah unsur hara. • Rendahnya pelayanan jaringan transportasi • Rendahnya pelayanan infrastruktur permukiman • Masih kurangnya sarana – fasilitas sosial masyarakat • Belum adanya aktivitas industri untuk mengolah hasil pertanian dan perkebunan serta perikanan • Aktivitas perdagangan dan jasa masih sangat kurang 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan usaha budidaya produktif komoditas unggulan pada lahan dengan menciptakan kesesuaian lahan potensial • Pembangunan, perluasan ,dan perbaikan infrastruktur permukiman dan kawasan • Meningkatkan ketersediaan sarana – fasilitas sosial dan ekonomi utama dalam KPB dan pusat-pusat SKP. • Mendorong perwujudan investasi dalam penciptaan nilai tambah secara ekonomis komoditas-komoditas potensial kawasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menegakan aturan pengendalian ruang, dalam mencegah potensi pengembangan lahan usaha pada zona Taman Nasional • Meningkatkan SDM dan Kesadaran ketaatan hukum masyarakat serta penegakan hukum

Sumber: Hasil analisis peneliti

Berdasarkan rumusan analisis yang dihasilkan pada tabel diatas, maka strategi pembangunan Kawasan Transmigrasi Long Apari adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Strategi Pembangunan Kawasan Transmigrasi Long Apari

	Kebijakan	Strategi
1	Menciptakan pusat pertumbuhan baik dalam struktur pelayanan wilayah (regional), pusat pertumbuhan kawasan dan pusat pertumbuhan lingkungan	<p>Membangun pusat pertumbuhan baru sebagai pusat Kawasan setara dengan PPK dengan membagi kawasan dalam KPB, SKP dan SP dengan menentukan pusat-pusat bagi masing-masing kawasan</p> <p>Meningkatkan ketersediaan sarana – fasilitas sosial dan ekonomi utama dalam KPB dan pusat-pusat SKP</p> <p>Mengembangkan permukiman transmigrasi baru yang layak huni dan layak usaha dan terintegrasi dengan desa sekitar dan pusat pelayanan yang akan dikembangkan</p> <p>Mengotimalkan peran perusahaan swasta dalam menciptakan sistem perekonomian agribisnis dengan skala ekonomi yang luas dan peningkatan kualitas SDM (tenaga kerja)</p>
2	Meningkatkan potensi sumber daya alam pertanian dan	Peningkatan usaha budidaya produktif komoditas unggulan pada lahan dengan menciptakan kesesuaian lahan potensial

Kebijakan	Strategi
perikanan dalam kerangka pengembangan agribisnis untuk mengembangkan kegiatan ekonomi sekunder (industri) dan tersier (perdagangan dan jasa)	Mengoptimalkan keterbatasan lahan usaha dengan peningkatan produktivitas lahan pertanian Mendorong perwujudan investasi dalam penciptaan nilai tambah secara ekonomis komoditas-komoditas potensial kawasan
3 Mewujudkan, menyediakan dan meningkatkan aksesibilitas keluar kawasan dan di dalam kawasan serta peningkatan infrastruktur kawasan permukiman transmigrasi.	<p>JARINGAN TRANSPORTASI</p> <p>Membangun, meningkatkan akses keluar kawasan dengan fungsi lokal ke pusat-pusat pertumbuhan wilayah</p> <p>Membangun dan meningkatkan aksesibilitas antar pusat-pusat lingkungan dan permukiman</p> <p>ENERGI</p> <p>Pembangunan dan peningkatan kapasitas energi listrik dan energi primer</p> <p>AIR MINUM</p> <p>Pembangunan Instalasi pengelolaan air minum dengan sistem perpipaan</p> <p>Pembangunan tempat penampungan air dengan kapasitas besar dengan sistem perpipaan</p> <p>AIR LIMBAH</p> <p>Peningkatan sarana <i>on-site system</i> sesuai dengan standar pengembangan</p> <p>Pembangunan IPAL komunal bagi industri skala kecil dan rumah tangga</p> <p>Peningkatan keadaran masyarakat dan penegakan hukum</p> <p>DRAINASE</p> <p>Pengembangan sistem drainase terpadu</p> <p>Pemeliharaan saluran drainase</p> <p>Pengendalian banjir</p> <p>PERSAMPAHAN</p> <p>Peningkatan pengelolaan sampah berbasis 3R</p> <p>Pembangunan pelayanan persampahan</p>
4 Meningkatkan kapasitas kelembagaan, instutusi pemerintah, peran serta masyarakat dan swasta dalam sistem pengelolaan pembangunan berkelanjutan dan sistem pembiayaan pembangunan Kawasan Transmigrasi Long Apari	<p>KELEMBAGAAN</p> <p>Meningkatkan kapasitas partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pengembangan usaha primer, sekunder dan tersier</p> <p>Membentuk kemitraan dengan berbagai pihak</p> <p>PERATURAN</p> <p>Menegakan aturan pengendalian ruang, dalam mencegah potensi pengembangan lahan usaha pada zona Taman Nasional</p> <p>Meningkatkan SDM dan kesadaran ketaatan hukum masyarakat serta penegakan hukum</p> <p>PEMBIAYAAN</p> <p>Mengoptimalkan sumber pembiayaan dari pemerintah, swasta dan masyarakat</p>

Potensi Ekonomi RKT Long Apari

Potensi Ekonomi di Kecamatan Long Apari berdasarkan jenis budidaya komoditi yang dominan, antara lain: Tanaman Pangan Lahan kering, Perkebunan, Hutan Tanaman Industri. Dari potensi ekonomi yang ada kemudian diimplementasikan dalam Penentuan Pola Usaha Transmigrasi yang mempertimbangkan juga minat investor terhadap komoditi yang akan dikembangkan pada areal konsesi, rencana pengembangan kegiatan usaha dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5
Pengembangan Kegiatan Usaha RKT Berdasarkan Potensi Ekonomi di Kecamatan Long Apari

No	Pusat Pelayanan			Lingkup Layanan	Arahan Pengembangan Penggunaan Lahan	
	Fungsi	Pusat	Kecamatan			
	RKT Apari	Long Tiong Ohang	Tiong Ohang	Long Apari	Lokal	
1	SKP A Ohang Ha	Tiong 9.602	Tiong Ohang	Long Apari	Lokal	Lahan Pekarangan, TPLK, Tanaman Tahunan Perkebunan (Karet, Kopi, Kakao)
2	SKP B Penaneh II 17.955Ha	Long	Long Penaneh II	Long Apari	Lokal	Lahan Pekarangan, TPLK, Tanaman Tahunan Perkebunan (Karet, Kopi, Kakao)
3	SKP C Keriok 11.200Ha	Long	Long Keriok	Long Apari	Lokal	Lahan Pekarangan, TPLK, Tanaman Tahunan Perkebunan (Karet, Kopi, Kakao)
4	SKP D Apari Ha	Long 14.452	Long Apari	Long Apari	Lokal	Lahan Pekarangan, TPLK, Tanaman Tahunan Perkebunan (Karet, Kopi, Kakao)

Sumber: Hasil analisis peneliti

KESIMPULAN

Dari arahan beberapa jenis komoditi yang sesuai untuk dikembangkan di masing-masing SKP, maka dapat ditentukan Pola Usaha Transmigrasi pada setiap SKP berdasarkan jenis budidaya komoditi yang dominan, antara lain: Tanaman Pangan Lahan kering, Perkebunan, Hutan Tanaman Industri. Penentuan Pola Usaha Transmigrasi tersebut disamping mempertimbangkan potensi lahan dasar, juga minat investor terhadap komoditi yang akan dikembangkan pada areal konsesi yang terletak dalam SKP. Oleh karena itu jenis kegiatan usaha atau pola usaha transmigrasi yang diusulkan dalam setiap SKP dapat lebih dari satu.

Untuk SKP dengan pola kombinasi usaha ini, maka beberapa SP mempunyai pola usaha non-pangan dan SP-SP lainnya mempunyai pola usaha tanaman pangan. Dalam hal ini pembentukan unit-unit kawasan perencanaan tidak berdasarkan pada azas homogenitas kegiatan usaha, tetapi berdasarkan nodal planning yaitu pembentukan sentra-sentra produksi dan pengaruh pusat-pusat kegiatan terhadap areal atau kawasan yang dilayani. Pola kegiatan usaha non-tanaman pangan yang dijalankan dengan sistem kemitrausahaan antara petani transmigran dengan perusahaan inti merupakan sistem yang paling efektif dan efisien yang akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan petani dan pengembangan wilayah. Guna membentuk sistem mitra usaha dengan perusahaan, maka perlu diberikan ketentuan atau peraturan oleh pemerintah kabupaten yang lebih mengarah pada pembuatan sistem mitra usaha tersebut dan sistem pemberian fasilitas kemudahan baik menyangkut perijinan, maupun dalam mendapatkan kredit investasi dengan suku bunga yang lebih rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ditjen PSKT Departemen Tenaga Kerja RI. (2003). Rencana Jangka Panjang dan Menengah Pelaksanaan Transmigrasi. In *Rencana Jangka Panjang dan Menengah Pelaksanaan Transmigrasi* (2003rd ed.). Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Mirwanto, M. (2004). *Mengenal dan Memahami Transmigrasi*. Pustaka Sinar Harapan.
- Peraturan Pemerintah RI Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997, Pub. L. No. Undang-Undang No 29 Tahun 2009 (2014).
- Raharjo, A. (2008). *Pengembangan Wilayah Konsep dan Teori*. Graha Ilmu.

- Suparno. (2006). *Paradigma Baru Sistem Penyelenggaraan Transmigrasi*. Departemen Komunikasi dan Informasi RI. www.depkominfo.go.id (1 Februari 2007)
- Undang-Undang Ketransmigrasian RI, Pub. L. No. UU 29 Tahun 2009 (2009).
- Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 15 tahun 1997 tentang ketransmigrasian.
- Asya'ari, Sapari Imam. 1990. *Sosiologi Kota dan Desa*. Surabaya : Penerbit PT. Usaha Nasional.
- BPS. 2013. Mahakam Ulu Dalam Angka, Bappeda Kabupaten Mahakam Ulu.
- BPS. 2013. Potensi Desa, Bappeda Kabupaten Mahakam Ulu.
- Hardjowigeno S. 1993. *Klasifikasi Tanah dan Pedogenesis*. Ed 1. Akademika Pressindo, Jakarta.
- Huraerah, Abu. 2003. "Isu-Isu Kesejahteraan Sosial", Bandung, Ceplas, Fisip Unpas.
- Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 534/KPTS/M/2001, Tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan, dan Permukiman.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai
- Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat. 1993. *Petunjuk Teknis Evaluasi Lahan*. Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat, Bogor.
- Rusli, Said. 2012. *Pengantar Ilmu Kependudukan*. Jakarta : Penerbit LP3ES
- Santun R.P. Sitorus. 1995. *Evaluasi Sumber Daya Lahan*. Penerbit Tarsito Bandung.
- Suparno, E. 2006 *Paradigma Baru Sistem Penyelenggaraan Transmigrasi*. www.depkominfo.go.id. (1 Februari 2007)

Asean Law And Economic Growth Asean

Nairobi ^{1)*}, Debby Anggun Kenita ²⁾,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung

* E-mail corresponding author: nairobi@feb.unila.ac.id

Received: 22-03-2021;
Accepted: 21-04-2021;
Available online: 30-04-2021

Ecoplan Vol. 4 No. 1, April 2021,
hlm 77-85.

ISSN p: 2620-6102
e: 2615-5575

Keywords: ASEAN,
Pertumbuhan Ekonomi,
Random Effect Model, dan
rule of law.

Abstrak- Masyarakat Ekonomi ASEAN atau biasa disebut AEC (ASEAN Economics Community) tahun 2015 yang merupakan wujud kerjasama anatar negara-negara anggota ASEAN melalui integrasi sektor ekonomi dalam suatu pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara. Hal ini juga menjadi jawaban atas pertanyaan investor tentang aksesibilitas negara tujuan investasi termasuk salah satu yang dimaksud ialah kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penegakan hukum terhadap pertumbuhan ekonomi. Adanya peran pemerintah dalam penegakan hukum diharapkan mampu mendoorooang pertumbuhan ekonomi suatu negara. Data yang digunakan alam penelitian ini antara lain pertumbuhan ekonomi, rule of law, voice and accountability, foreign direct investment, tenaga kerja, dan initial growth di 10 anggota ASEAN pada periode 2007-2018. Metode yang digunakan yaitu Random Effect Model. Hasil menunjukkan bahwa rule of law, foreign direct investment, tenaga kerja, dan initial growth berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN, sedangkan voice and accountability sidak beprngarh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN pada periode 2007-2018.

Abstract - The ASEAN Economic Community, commonly referred to as AEC (ASEAN Economic Community) in 2015, is a form of cooperation between ASEAN member countries by integrating the economic sector in a single market in the Southeast Asia region. This is also an answer to investors' questions regarding the accessibility of investment destination countries, including legal certainty. This study aims to analyze the effect of law enforcement on economic growth. The role of the government in law enforcement is expected to be able to support the economic development of a country. The data used in this study include economic growth, the rule of law, voice and accountability, foreign direct investment, employment, and the initial development of 10 ASEAN member countries for the 2007-2018 period. The method used is panel data regression and testing the significance of the model. The method used is the Random Effect Model. The results show that the rule of law, foreign direct investment, labor, and initial growth have a significant and positive effect on economic growth in ASEAN. In contrast, voice and accountability significantly impact ASEAN economic growth in the 2007-2018 period.

Keywords: ASEAN, Economic Growth, Random Effect Model, and the rule of law.

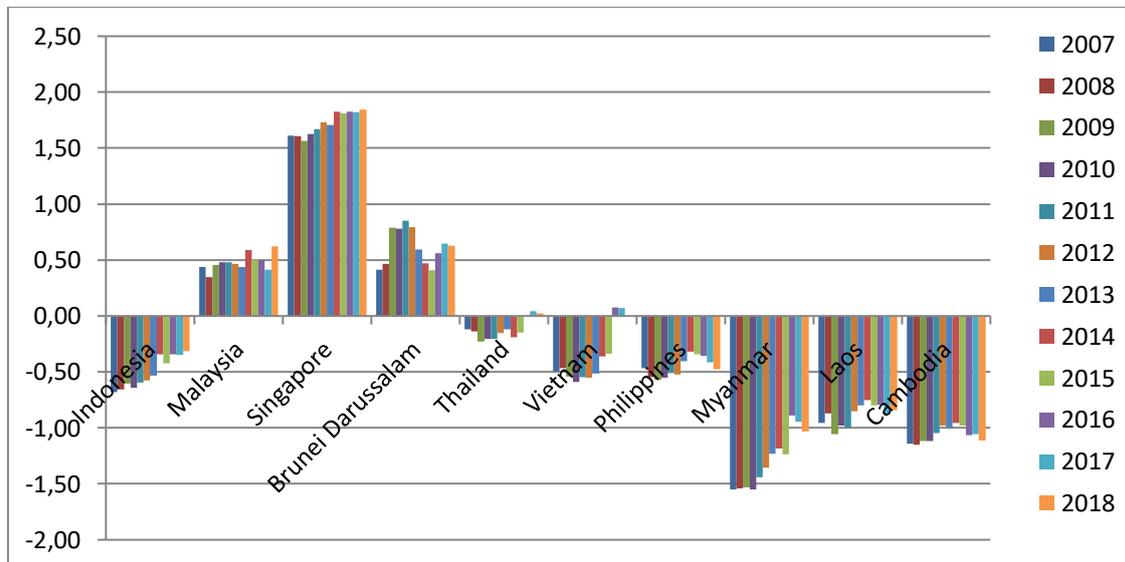
INTRODUCTION

Increasing economic growth is not a matter that can be carried out easily for some countries in the world. Problems commonly experienced such as low quality of health, high levels of poverty, low life expectancy, and income disparities often occur in developing countries and underdeveloped/poor countries, where it will also have an impact on the economic growth of each country (Syadullah & Wibowo, 2015).

Countries in Southeast Asia have stable economies and have economic resilience in the face of challenges from the global environment. Southeast Asian countries who are members of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) are also involved in promoting economic growth, reducing poverty, and improving people's lives. ASEAN's vision until 2020 is to strengthen the economy through economic strategies that promote sustainable growth among countries within a region (ASEAN & Forum, 2020).

2015 saw the realization of the AEC (ASEAN Economic Community), which is a form of cooperation between ASEAN member countries through the integration of the economic sector in a single market in the Southeast Asia region. This is also an answer to investors' questions regarding the accessibility of investment destination countries, including legal certainty (ASEAN & Forum, 2020).

Activities in the economic field require freedom in carrying out its activities, freedom to create and develop oneself according to their knowledge and will so that to obtain large profits with small capital can be achieved easily, but the law has a nature that limits human behavior to commit excessive actions. bad impact on the economy. Traditional theorists agree that a good legal system has been associated with well-defined property rights, reduced transaction costs, increased investment, and economic growth (Li & Li, 2013).



Source: World Bank, 2020

Figure 1. Development of the ASEAN Rule of Law for the 2007-2018 Period

Based on Figure 1, the rule of law index in each country is increasing, except for Brunei Darussalam. On average, in the 2007-2018 period, the highest level of compliance and law enforcement occurred in Singapore with 1,72 points, followed by Brunei Darussalam (0,62 points), Malaysia (0,48 points), and Thailand (-0,12 points). Meanwhile, the lowest level of compliance and law enforcement occurred in Myanmar with -1,29 points, followed by Cambodia (-1,06 points), Laos (-0,88 points), and Indonesia (-0,50 points).

According to Haggarrd (2010), there is a close correlation between law enforcement and economic growth, efficient transactions in an ideal market will occur when supported by the rule of law implemented by a government with good governance. The existence of political and legal institutions that carry out supervisory and balance functions (Checks on Government) such as the government, parliament, and independent courts allows control and prevention of various forms of abuse of power, both from political and legal institutions that inhibit economic growth.

According to Syadullah & Wibowo (2015), to measure the welfare of a country not only in terms of GDP but also through aspects of law enforcement and democracy. A good legal system has been associated with well-defined property rights, reduced transaction costs, increased investment, and economic growth (Man Li and Lut Li, 2013), but based on data on economic growth and law enforcement in ASEAN in 2007-2018 There is a gap between existing theory and data, where some countries with high levels of

law enforcement, actually show low levels of economic growth. This raises the question, "what is the influence of law enforcement on economic growth in the 10 ASEAN countries in the 2007-2018 period?". Using Levine & Renelt's (1992) growth model, is there the rule of law, FDI.

The Rule of Law has a significant positive effect on the dependent variable, namely economic growth. These results mean that if there is an increase in community compliance in obeying regulations and enforcing the law, it will increase the rate of economic growth (Syadullah & Wibowo, 2015).

Haggard (2010) also argues that the rule of law has a significant effect on economic growth in developed countries. The rule of law is an important indicator in creating good governance because the rule of law can limit government authority so that it does not become a corrupt government.

A government that obeys the law can carry out its duties, powers, and responsibilities. The rule of law can guarantee that the government runs cleanly and well so that in the end, it is expected to have a broad impact on economic progress and increase the rate of economic growth. Also, the rule of law is important for improving the welfare of a country because the rule of law does not only guarantee and protect people's rights to work, the right to establish a business, and the right to live a decent life. The rule of law also guarantees legal protection for property, business capital, and legal certainty in making investments. But in essence, the rule of law is more aimed at producing the basic pillars of an economy that is resilient to crises and capable of increasing the rate of economic growth.

Xu (2012) this factor is procedural, apart from the substantive content of the law, it is also very difficult to operationalize for empirical research, although it is expected in some investor guides. Researchers are increasingly studying the effects of government regulations on economic development. The new institutional economy may be depicted as positing the ideology of Laissez-Faire, in which the main role of government is to create property rights and enforce contracts and then get out of the way of the market. Coasean's theory calls for government intervention wherever it reduces transaction costs under a no-government intervention. Free markets may not promote development efficiency for many reasons, including information asymmetry. An empirical analysis is needed to understand the impact of government regulation. The most studied area of public regulation is securities law. A larger and more liquid securities market is contributing to economic growth.

Ozpolat et al. (2016) stated in their research that the rule of law index, the corruption control index, and the voting and accountability index are positively correlated with the GDP of high-income countries. Other studies, Roxas et al. (2012) dan Sihag (2007), also convey the same thing, where according to him, the rule of law index has a significant positive effect on economic growth. Increasing public compliance in obeying regulations and enforcing laws will increase the rate of economic growth. A government that obeys the law can carry out its duties, powers, and responsibilities. The rule of law can guarantee that the government runs cleanly and well so that in the end, it is expected to have a broad impact on economic progress and increase the rate of economic growth.

Resnick, D., and Birner (2006) reveal that governance indicators (political stability and the rule of law) have a positive relationship with economic growth but have given mixed results in terms of poverty alleviation. Huynh & Jacho-Chávez (2009) stated that the indicators of voice and accountability, political stability, and the rule of law significantly affect economic growth. Haggard & Tiede (2011) also states that the rule of law has a significant effect on economic growth in developed countries.

Febryani (2017) mentions the fact that economic growth in ASEAN countries is still dominated by public consumption. Theoretically, economic growth that is supported by consumption will not lead to sustainable economic growth, while sustaining economic growth is supported by investment. This is because an investment is considered a factor that will increase the productivity of a country and increase the country's economic growth.

In the economic market, some problems are not predicted by classical economic theory where there are economists who prioritize individual behavior so that what happens is moral hazard and free-rider behavior caused by the desire of individuals to maximize profits and not thinking about the impact experienced by other economic actors. To reduce the risk of free riders as well as the occurrence of moral hazard and asymmetric information, it is necessary to have strict and firm rules of the game that regulate individual behavior in economic transactions, namely in the form of the rule of law.

They were using the model proposed by Levine & Renelt (1992), where I was chosen based on the theory of economic growth, namely the Foreign Direct Investment variable or commonly referred to as direct investment as the initial capital and also the labor force variable and initial growth variables. M is the focus variable in this study, namely the rule of law, while Z is another variable in research related to growth that can also explain economic growth, namely the variable voice and accountability as a measure of voice and accountability. The variables mentioned in the previous statement were selected based on empirical studies related to this research.

Economic factors in research such as FDI, labor force, voice and accountability, and initial growth variables are included as variables in this study which represent all research conditions in economic growth, namely in terms of capital stock in the form of foreign direct investment as a direct investment leading to capital stock accumulation. , labor.

Voice and accountability variables are used as variables to measure democracy, the level of participation, and freedom of society in making policy decisions to be made by a country, because according to Stiglitz (2015), measuring welfare can also be done with indicators of democracy as an environmental instrument. Voice and accountability are also used based on an empirical study conducted by (Ozpolat et al., 2016). This research was conducted to analyze the effect of the legal influence that occurs in ASEAN on economic growth so that it can be used as a guide by the state in the law enforcement process to maintain the country's economic stability.

LITERATURE REVIEW

Law Enforcement Theory

Law enforcement, according to Akhmaddhian (2016), is a process to make legal desires come true. The legal desires referred to here are those of the legislative body formulated in these legal regulations. The formulation of the thoughts of lawmakers, as outlined in legal regulations, also determines how law enforcement is carried out. Thus, in turn, the law enforcement process culminates in its implementation by the law enforcement officials themselves. From this situation, with an extreme tone, it can be said that the success or failure of law enforcers in carrying out their duties has started since the legal regulations that had to be carried out were made.

The rule of law is widely used and is often associated with state development efforts—no agreed definition agreement. The definitions below, articulated by the Secretary-General of the United Nations in a report to the Security Council in 2004, provide the basis for the rule of law indicators. The United Nations states that the rule of law itself is a measure of the extent to which a person obeys the rules of society and enforces the law. The rule of law can guarantee that the government runs cleanly and well so that in the end, it is expected to have a broad impact on economic progress and increase the rate of economic growth (Matsuo, 2008).

The rule of law is also important for improving the welfare of a country because the rule of law not only guarantees and protects people's rights to work, the right to establish a business, and the right to live properly. The rule of law also guarantees legal protection for property, business capital, and legal certainty in making investments. But in essence, the rule of law is more aimed at producing the basic pillars of an economy that is resilient to crises and capable of increasing the rate of economic growth (Matsuo, 2008).

Economic Growth Theory

Economic growth is a very important indicator for assessing the performance of an economy, especially for analyzing the results of the economic development process in a country or region. The economy is said to experience growth if the production of goods and services increases from the previous year (Mankiw, 2019).

Economic growth shows the extent to which economic activity can generate additional income or social welfare in a certain period which can illustrate that the economy of the country or region is developing well. Every developing country wants to carry out development in all fields and is expected to achieve high economic growth, become a developed country, and be able to realize the goal of prospering society and even distribution of income in the context of realizing justice (Krugman & Wells, 2018).

Mankiw (2019), in general, the process of economic growth is influenced by two kinds of factors, namely economic and non-economic factors. The economic growth of a country is highly dependent on its natural resources, human resources, capital, business, technology, and so on. These are all economic factors. But economic growth is not possible as long as the social and cultural institutions, political and security conditions, and moral values in a nation are not supportive. In other words, without the support of such non-economic factors properly, economic growth may not materialize.

Voice and accountability

From an institutional point of view, other factors in government are also related to economic growth that describes the welfare and prosperity of a country. Stiglitz (2015) argues that the participation of public opinion about government decisions in making policies, but opinion polls consistently show that there is a big difference between what most voters want and what the political system provides. Voting and participating in voting for government decisions, as well as freedom of expression, freedom of association,

accountability, captures perceptions about the extent to which citizens can, and free media. Maune (2017) says that voice and accountability have a positive impact on GDP.

Relationship Between Law Enforcement and Economic Growth

There is a close correlation between the law enforcement system and economic growth; efficient transactions in an ideal market will occur when supported by the rule of law implemented by a government with good governance (Fickar, 2015). Haggarrd (2010) suggests four components of the rule of law that can support economic growth, including First, individual security (Security of Person), which means that economic actors must be free from all forms of obstacles, disturbances, and threats, both physical and/or psychological from any party in conducting transactions. Second, recognition and appreciation of the right to property and the right to freedom of contract (Property and Contracting Rights). These two rights can provide incentives for people to invest and trade. In this way, he will encourage economic growth as long as the state, through its legal institutions, can respect and enforce these civil rights. The right to property and the right to freedom of contract are human rights. However, its protection and promotion by the state do not appear to be sufficiently convincing to the market.

Third, the presence of political and legal institutions that carry out the function of supervision and balance (Checks on Government), such as the government, parliament, and independent courts. This check and balance function enables the prevention and control of various forms of abuse of power, both from political and legal institutions that impede economic growth. Fourth, consistency in the prevention and eradication of corruption (Corruption and the Rule of Law).

The four components described by Haggard are interdependent and complement each other to form a complex system of the rule of law as one of the determinants of national economic growth. We encounter these four components but have not yet formed a rule of law complex, the parts of which are aware of the complementary nature and depend on each other in coordination for growth and equitable distribution of welfare.

METHOD

This study uses panel data from 10 countries in ASEAN due to Timor Leste being a member of ASEAN in 2011 and the research year from 2007-2018, data obtained from World Bank publications (World Development Indicators and Worldwide Governance Indicators).

The dependent variable in this study is economic growth, while the independent variable consists of the rule of law, voice and accountability, Foreign Direct Investment, labor force, and initial growth. The economic growth model used adopts the growth model of Levine & Renelt (1992), namely:

$$Y = \beta_i I + \beta_m M + \beta_z Z + \mu \quad (1)$$

Where Y is economic growth, variable I is a variable that must exist theoretically in the growth model, M is the independent variable that is the researcher's interest, Z is another variable as a complement. In this study, I am FDI, labor force, and initial growth. The variable M is the rule of law variable, and Z is the voice and accountability variable. Then the structural equation is formed as follows:

$$EG_{it} = \beta_0 + \beta_1 RL_{it} + \beta_2 FDI_{it} + \beta_3 LF_{it} + \beta_4 VA_{it} + \beta_5 IG_{it} + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

Selection of the best model for panel data uses three methods (Baltagi, 2008), namely: Selection of the best model in the panel data method uses three methods (Beckett, 1975) as follows: a) Pooled Least Square (PLS) is the simplest estimate in panel data testing, which combines cross-section and time-series data. The test only uses the Ordinary Least Square without paying attention to individual dimensions (cross-section) and time dimensions (time series); b) Fixed Effect Model (FEM) in this approach assumes that the intercept between the cross-section dimensions is different but the slope of the time series dimensions remains the same; c) Random Effect (REM) which tends to see changes between cross-sections and between time series. The REM method is used to perfect the FEM model.

To determine the best model that can be used in analyzing and predicting three stages of testing, namely the Chow test to choose the best model between PLS and FEM, the Hausman test to choose the best model between FEM and REM, and the LM test to choose the best model between PLS and REM (Beckett, 1975).

RESULTS AND DISCUSSION

Table 1. Results of Panel Data Regression for Economic Growth Bound Variables

Variable	REM
Constant	10,4057 (0,0004) *
Rule of Law (RL)	2,2389 (0,0000) *
<i>Foreign Direct Investment</i> (FDI)	0,2829 (0,0000) *
<i>Labor Force</i> (LF)	0,1275 (0,0048) *
<i>Voice and Accountability</i> (VA)	0,2638 -0,5092
<i>Initial Growth</i> (IG)	0,275 (0,0005) *
Chow test	1,2739 -0,2598
Hausman Test	8,7803 -0,1182
Lagrange Multiplier (LM) Test	22,2884 -0,0459

Source: Eviews 9.0 output

Information: *) significant at $\alpha = 5\%$ and **) significant at $\alpha = 10\%$

Based on Table 1, using three approaches, it was found that the chow test resulted in a better FEM method than CEM, while in the Hausman test, the REM method was better than REM, and the LM test showed that the CEM method was better than REM. However, according to Gujarati & Porter (2013), if I (the number of cross-section units) is greater than t (the number of periods) then, the best and efficient model for analyzing the data of this research is the Random Effect Model (REM).

$$EG_{it} = 10,41 - 2,24RL_{it}^* + 0,28FDI_{it}^* - 0,13LF_{it}^* - 0,26VA_{it} + 0,27G_{it}^*$$

$$R^2 = 0,51$$

$$\text{Statistics} = 23,46$$

Note: *) Significant at 95% confidence level

**) Significant at 90% confidence level

The constant value is 10.41, which indicates that when all independent variables are zero, the economic growth will be 10.41 percent. The rule of law, Foreign Direct Investment, labor force, and initial growth have a significant and positive effect on economic growth, while voice and accountability do not have a significant effect on economic growth.

Classic Assumption Testing

Based on the results of the classical assumption testing that has been done, it shows that the research model has passed the classical assumption test.

Analysis of Calculation Results and Discussion

The rule of law has a positive and significant effect on economic growth. The results are by neoclassical economic theory, where economic growth and law are things that cannot be combined because the law has a limiting nature. This is due to the factor of law enforcement costs; the inefficiency factor in the law enforcement process of a country also influences growth so that an efficient law enforcement process is needed to create good economic growth.

The rule of law is an important indicator in creating good governance. Because the rule of law can limit the government's authority so that it does not become a corrupt government, a government that obeys the law can carry out its work, authority, and responsibility. The rule of law guarantees that the government runs cleanly and well so that it has a broad impact on economic progress and increases the rate of economic growth.

Also, the rule of law plays an important role in improving the welfare of a country because the rule of law not only guarantees and protects people's rights to work, the right to establish a business, and the right to live properly. The rule of law also guarantees legal protection for property, business capital, and legal certainty in making investments.

A good rule of law in a country will reduce the level of investment uncertainty and increase the confidence of investors in investing so that it can encourage business activities and, in turn, will increase the economic growth of a country. Conversely, if the rule of law of a country is bad, the transaction costs will definitely increase, and private companies will operate on a small scale, and they may even commit acts of corruption or criminal acts to run their business. This, of course, will reduce the economic growth of a country.

In essence, the rule of law aims to produce the basic pillars of an economy that is resilient to crises and can increase the rate of economic growth. Ozpolat et al. (2016) and Roxas et al. (2012) state that law enforcement has a positive and significant effect on economic growth.

Foreign Direct Investment has a positive and significant effect on economic growth. The results are following the economic growth theory of Levine & Renelt (1992), which states that there is an increase in economic growth due to an increase in the supply of inputs, one of which is capital (Ma'ruf & Wihastuti, 2008). Dkhili & Dhiab (2018), Alzaidy et al. (2017), Febryani (2017), Behname (2012), and Wibisono (2005) Foreign Direct Investment in a country can encourage the country's economic growth.

The labor force has a positive and significant effect on economic growth. A larger number of workers means an increase in the level of production, while a larger population growth means a larger size of the domestic market. However, it is questionable whether it is true that the rapid population growth rate will have a positive or negative impact on its economic development. Nawaz (2015), Wicaksono (2014), and Febryani (2017) state that the workforce has a positive influence on economic growth.

Voice and Accountability do not affect economic growth. The voting theory by Buchanan and Tullock states that there is a direct relationship between the desire for voting efficiency and costs, where we want efficient voting, namely satisfying everyone, then the cost required is greater, on the contrary, if the voting results are only to satisfy one person only. (king or dictator), the voting costs issued are also very low (Man Li & Li, 2013). These results are in line with previous research conducted by Moricz & Sjöholm (2014) and Wibowo (2013), which states that no matter how much citizen participation in choosing parties and leaders, as well as freedom of opinion, freedom of association, and freedom to determine public policy, it does not affect economic growth.

Initial growth has a positive and significant effect on economic growth. According to Levine & Renelt (1992), initial growth is a component that affects economic growth in a country. Therefore, in analyzing economic growth in a region, the core growth must be included in the research model. the regression result is positive, meaning that there is a convergence of economic growth in that country. These results are in line with previous research conducted by Nawaz (2015) and Klomp & de Haan (2009), who found that the GDP per capita lag had an effect on economic growth.

CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS

Based on the results of research which shows that the high value of the rule of law has an impact on economic growth in ASEAN, the higher the rule of law explains that there is a high level of legal compliance. From the results and discussion of the rule of law, foreign investment, labor force, and initial growth have a positive and significant effect on economic growth, while Voice and Accountability have no effect on economic growth.

The government further reminds and realizes an efficient law enforcement process to create harmony and balance in the economy of the people who then feel safe and protected by their rights, improve the quality of their governmental institutions by improving the aspects of law enforcement that are efficient, effective. Freedom of opinion, so that it can have an impact on increasing the country's economic growth.

REFERENCE

- Akhmaddhian, S. (2016). Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015). *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1–35. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i1.404>
- Alzaidy, G., Naseem, M., Niaz, B., & Lacheheb, Z. (2017). The Impact of Foreign-direct Investment on Economic Growth in Malaysia: The Role of Financial Development. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(3), 382–388.
- ASEAN, R., & Forum, W. E. (2020). ASEAN Services Integration Report. *ASEAN Report*.

- Baltagi, B. H. (2005). *Econometric Analysis of Panel Data*. In *John Wiley & Sons Ltd* (3th ed., Vol. 5, Issue 7). John Wiley & Sons Ltd. <https://doi.org/10.3109/00498257509056115>
- Behname, M. (2012). Foreign Direct Investment and Economic Growth: Evidence from Sothern Asia. *Atlantic Review of Economics*, 2. <https://doi.org/10.1504/AAJFA.2015.073487>
- Dkhili, H., & Dhiab, L. (2018). The Relationship between Economic Freedom and FDI versus Economic Growth: Evidence from the GCC Countries. *Journal of Risk and Financial Management*, 11(4), 81. <https://doi.org/10.3390/jrfm11040081>
- Febryani, T. (2017). Determinan Pertumbuhan Ekonomi di 4 Negara ASEAN. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 2(1), 10–20. <https://doi.org/10.20473/jiet.v2i1.5501>
- Fickar, A. (2015). Hukum dan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 5(1).
- Gujarati, D. N., & Porter, D. . (2009). Single-equation regression models. In *Introductory Econometrics: A Practical Approach* (5th ed.). Douglas Reiner.
- Haggard, S., & Tiede, L. (2011). The Rule of Law and Economic Growth: Where are We? *World Development*, 39(5), 673–685. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2010.10.007>
- Haggarrd, S. (2010). The Rule of Law and Economic Growth: Where Are We? *Conference on Measuring the Rule of Law*, 1–43.
- Huynh, K. P., & Jacho-Chávez, D. T. (2009). Growth and governance: A nonparametric analysis. *Journal of Comparative Economics*, 37(1), 121–143. <https://doi.org/10.1016/j.jce.2008.08.003>
- Klomp, J., & de Haan, J. (2009). Political institutions and economic volatility. *European Journal of Political Economy*, 25(3), 311–326. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2009.02.006>
- Krugman, P., & Wells, R. (2018). *Macroeconomics* (Fifth Edit). Worth Publishers.
- Levine, R., & Renelt, D. (1992). A Sensitivity Analysis of Cross-Country Growth Regressions. *American Economic Review*, 82(4), 942–963. <https://doi.org/10.2307/2117352>
- Li, R. Y. M., & Li, Y. L. (2013). Is there a positive relationship between law and economic growth? A paradox in China. *Asian Social Science*, 9(9), 19–30. <https://doi.org/10.5539/ass.v9n9p19>
- Ma'ruf, A., & Wihastuti, L. (2008). PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA: Determinan dan Prospeknya. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 9(1), 44–55. <https://doi.org/10.18196/jesp.9.1.1526>
- Man Li, R. Y., & Li, Y. L. (2013). Is there a positive relationship between law and economic growth? A paradox in China. *Asian Social Science*, 9(9), 19–30. <https://doi.org/10.5539/ass.v9n9p19>
- Mankiw, N. G. (2019). *Macroeconomis*, 10th Edition. In *Worth Publishers*.
- Matsuo, H. (2008). The Rule of Law and Economic Development: A Cause or a Result? *Center for Asian Legal Exchange*, 59–70. <https://doi.org/10.1002/9780470693650.ch32>
- Maune, A. (2017). The strength of sound corporate governance on economic growth in an emerging market context. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(5), 6.
- Moricz, S., & Sjöholm, F. (2014). The Effect of Elections on Economic Growth: Results from a Natural Experiment in Indonesia. *IFN Working Paper*, 1023.
- Nawaz, S. (2015). Growth effects of institutions: A disaggregated analysis. *Economic Modelling*, 45, 118–126. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2014.11.017>
- Ozpolat, A., Guven, G. G., Ozsoy, F. N., & Bahar, A. (2016). Does Rule of Law Affect Economic Growth Positively? *Research in World Economy*, 7(1). <https://doi.org/10.5430/rwe.v7n1p107>
- Resnick, D. and Birner, R. (2006). Does good governance contribute to Pro-Poor Growth?: A review of the evidence from cross-country studies *Development Strategy and Governance. International Food*

Policy Research Institute, 12, 1–22.

- Roxas, B., Chadee, D., & Erwee, R. (2012). Effects of rule of law on firm performance in South Africa. *European Business Review*, 24(5), 478–492. <https://doi.org/10.1108/09555341211254544>
- Sihag, B. S. (2007). Empirical studies on institutions, governance and economic growth: A review. *Humanomics*, 23(4), 204–220. <https://doi.org/10.1108/08288660710834694>
- Stiglitz, J. E. (2015). The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future. *Sustainable Humanity, Sustainable Nature: Our Responsibility*, 1–21. <https://doi.org/10.1080/09538259.2015.1067028>
- Syadullah, M., & Wibowo, T. (2015). Governance and Tax Revenue in Asean Countries. *Journal of Social and Development Sciences*, 6(2), 76–88. <https://doi.org/10.22610/jsds.v6i2.845>
- Wibisono, Y. (2005). Sumber-Sumber Pertumbuhan Ekonomi Regional: Studi Empiris Antar Propinsi di Indonesia, 1984-2000. In *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* (Vol. 5, Issue 2, pp. 91–120). <https://doi.org/10.21002/jepi.v5i2.137>
- Wibowo, E. (2013). Analisis Pengaruh Kualitas Pemerintahan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN. *Jurnal Ilmiah FEB Universitas Brawijaya*, 1–14.
- Wicaksono, M. N. (2014). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Angkatan Kerja, dan Belanja Modal Daerah terhadap Peningkatan PDRB Provinsi di Indonesia Tahun 2008-2012. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 3(1).
- Xu, G. (2012). Law and China's Economic Growth. *The Dovenschmidt Quarterly*, 1, 3–15.